



Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan

LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK**

TAHUN 2024

Seamless Transport Through Integration



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2024 merupakan publikasi instrumen pengukuran pencapaian sasaran program BPTJ di tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. BPTJ selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi akuntabilitas laporan melalui penyajian laporan yang menggambarkan kondisi sebenarnya dari kinerja tanpa mengubah data yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan utama akuntabilitas kinerja yang mana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar media untuk menunjukkan nilai capaian yang tinggi.

Laporan ini mencakup hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024 yang memiliki empat Sasaran Program, yaitu Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek, Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek, Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek, serta Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Empat sasaran program tersebut diukur menggunakan lima Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek, On Time Performance Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek, Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek, dan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah merealisasikan kinerjanya dengan baik di mana dua Indikator Kinerja Utama telah mencapai 100% yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek dan On Time Performance Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek. Sementara itu tiga Indikator Kinerja telah mencapai lebih dari 90% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek tercapai 99,977%, Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek tercapai 93,724%, dan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ tercapai sebesar 90,726%.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja konektivitas, pelayanan, dan keselamatan transportasi pada periode selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan unit layanan publik, perusahaan angkutan umum, dan menerapkan teknologi informasi untuk menunjang pemantauan dan pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kerja sama dengan perusahaan operator melalui pelaporan data yang akurat, dan pembangunan mekanisme komunikasi yang efektif. BPTJ juga akan mengambil langkah-langkah pengawasan, pengecekan standar pelayanan, penghargaan, serta pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana angkutan.

KATA PENGANTAR



Plt. Kepala BPTJ
Suharto

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2024 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan kinerja, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Sasaran Program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kinerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

Plt. KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suharto'.

Suharto
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660925 198903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	2
I.2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA.....	4
I.2.1. Tugas.....	4
I.2.2. Fungsi.....	4
I.3. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.3.1. Sekretariat	6
1.3.2. Direktorat Prasarana	6
1.3.3. Direktorat Lalu Lintas	6
1.3.4. Direktorat Angkutan	6
1.3.5. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jabodetabek	6
I.4. SUMBER DAYA MANUSIA	7
I.5. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	10
I.5.1. Potensi	10
I.5.2. Isu Strategis	10
I.5.3. Permasalahan.....	12
I.6. SISTEMATIKA LAPORAN	14
Bab II Perencanaan Kinerja.....	15
II.1. RENCANA STRATEGIS.....	17
II.2. PERJANJIAN KINERJA	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	25
III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	28
III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	29
A. Rumus Pengukuran Kinerja BPTJ	29

B.	Capaian Kinerja Organisasi.....	32
	Sasaran Program 1: Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek.....	34
	Sasaran Program 2: Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek ...	47
	Sasaran Program 3: Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	57
	Sasaran Program 4: Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	62
III.3.	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	67
III.4.	CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA	69
III.5.	REALISASI ANGGARAN	84
	III.5.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024	84
	III.5.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	85
Bab IV	Penutup	88

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data SDM BPTJ Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel I. 2 Data SDM BPTJ Berdasarkan Unit Kerja dan Status Pegawai	9
Tabel II. 1 Target Rencana Strategis 2020-2024	18
Tabel II. 2 Perbedaan IKU Rencana Strategis 2020-2024 dengan Penetapan IKU Hasil Reviu ...	19
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024	21
Tabel II. 4 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ	22
Tabel II. 5 Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja	22
Tabel II. 6 Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024	23
Tabel II. 7 Anggaran Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024	23
Tabel II. 8 Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024.....	24
Tabel II. 9 Anggaran Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024.....	24
Tabel II. 10 Total Panjang Trayek	38
Tabel III. 1 Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target PK BPTJ Tahun 2024	32
Tabel III. 2 Nilai Kinerja Sasaran Program Tahun 2024.....	32
Tabel III. 3 Komponen Realisasi IKP1.....	35
Tabel III. 4 Panjang Trayek Angkot	36
Tabel III. 5 Panjang Trayek Bus	37
Tabel III. 6 Panjang Jalan di Jabodetabek.....	38
Tabel III. 7 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan	40
Tabel III. 8 Luas Wilayah Jabodetabek	40
Tabel III. 9 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek	42
Tabel III. 10 Realisasi Kinerja IKP1 Sebelum Perubahan IKU	46
Tabel III. 11 Komponen IKP2.1	48
Tabel III. 12 Komponen IKP2.2	53
Tabel III. 13 On Time Performance AU Berbasis Jalan.....	54
Tabel III. 14 On Time Performance AU Berbasis Rel	54
Tabel III. 15 Komponen Realisasi IKP3.....	58
Tabel III. 16 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024	58
Tabel III. 17 Realisasi Kinerja IKP3 Sebelum Perubahan IKU	61
Tabel III. 18 Komponen Realisasi IKP5.....	63
Tabel III. 19 Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ.....	63
Tabel III. 20 Realisasi Kinerja IKP1 Sebelum Perubahan IKU	66
Tabel III.21 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	68
Tabel III.22 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan jenis belanja.....	84
Tabel III.23 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan.....	85
Tabel III.24 Realisasi anggaran per jenis belanja BPTJ tahun 2024	85
Tabel III.25 Realisasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan	86
Tabel III.26 Realisasi anggaran per IKP BPTJ tahun 2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	5
Gambar I. 2 Komposisi SDM BPTJ Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar I. 3 Komposisi SDM BPTJ Berdasarkan Unit Kerja	9
Gambar III. 1 Capaian Kinerja IKP1 Tahun 2024	35
Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	46
Gambar III. 3 Capaian Kinerja IKP2.1 Tahun 2024	47
Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP2.1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	52
Gambar III. 5 Capaian Kinerja IKP2.2 Tahun 2024	53
Gambar III. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP2.2 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	55
Gambar III. 7 Capaian Kinerja IKP3 Tahun 2024	57
Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP3 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	60
Gambar III. 9 Capaian Kinerja IKP5 Tahun 2024	62
Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP5 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	65
Gambar III. 11 Program Subsidi Bus Buy The Service (BTS).....	69
Gambar III. 12 Sosialisasi Safety Riding.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 13 Fasilitasi Teknis Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan	77
Gambar III. 14 Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek	79
Gambar III. 15 Pembangunan Jalur Sepeda	80
Gambar III. 16 Pembangunan Stasiun Pondok Rajeg	83
Gambar III. 17 Proporsi Alokasi Anggaran BPTJ Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	84
Gambar III. 18 Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2024	86
Gambar III. 19 Realisasi Anggaran BPTJ per Indikator Kinerja Program	87

Bab I

Pendahuluan



STASIUN
PONDOK RAJEG

7023

NAWAL

I.1. LATAR BELAKANG

Pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menjadi dasar utama penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan demi mewujudkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPTJ Tahun 2024 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional

yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Untuk melaporkan capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA TA 2024 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BPTJ. Analisis atas capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyusunan laporan ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dengan merinci tujuan-tujuan melalui perumusan indikator kinerja, laporan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana pencapaian tujuan dapat terwujud. Dalam konteks pelayanan transportasi, wilayah Jabodetabek memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Laporan ini akan menggali bagaimana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merespons kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Untuk mencapai sasaran keberlanjutan, laporan ini juga akan menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan. Pentingnya laporan ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan internal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan ini juga memiliki tujuan

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai upaya yang telah dilakukan oleh badan ini dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024," Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memberikan contoh

nyata komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui laporan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan landasan untuk perbaikan terus-menerus dalam menghadapi tantangan transportasi yang kompleks di wilayah Jabodetabek.

I.2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tugas dan fungsi BPTJ antara lain:

I.2.1. Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

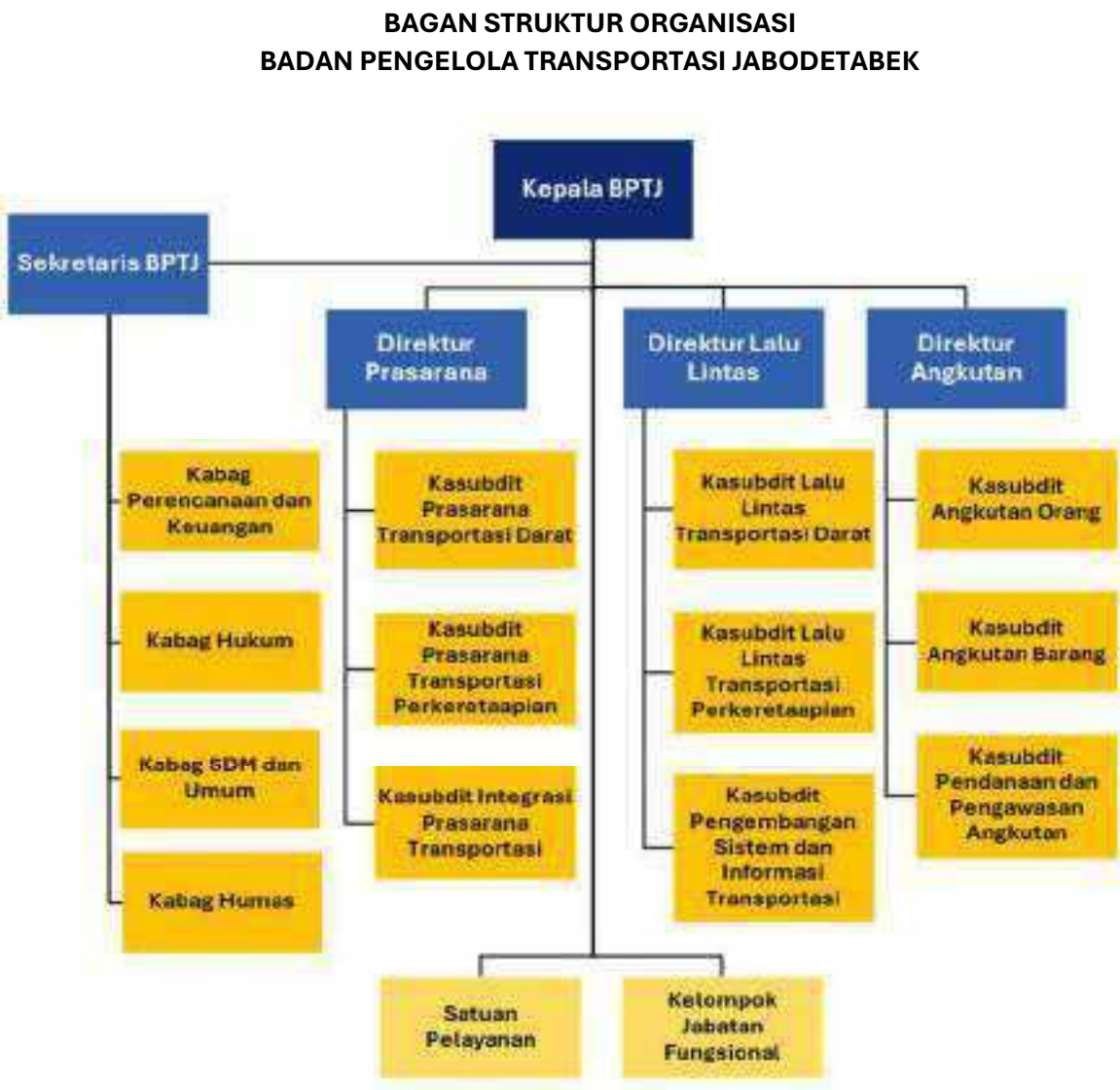
I.2.2. Fungsi

Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pengembangan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran;
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi;
- e. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan;
- f. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- g. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- h. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana;
- j. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Pasal 521 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari Sekretariat, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan.



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

1.3.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

1.3.2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

1.3.3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

1.3.4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

1.3.5. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jabodetabek

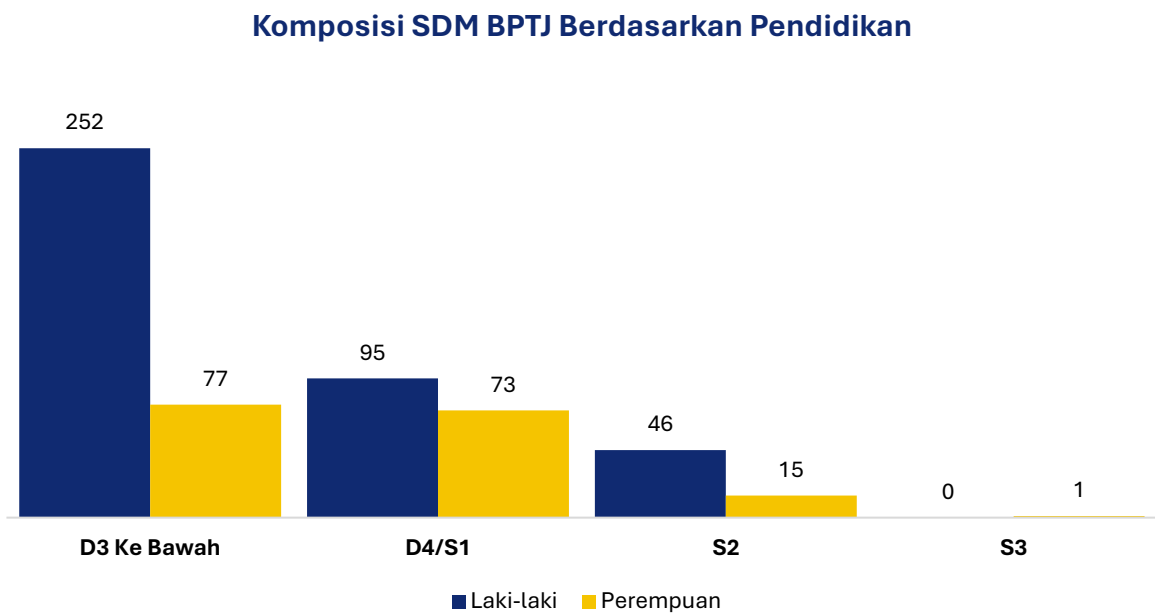
Satuan Pelayanan (satpel) Terminal Tipe A (TTA) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi pada simpul transportasi terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ. Satpel tersebut terdiri dari Satpel TTA Jatijajar, TTA Baranangsiang, TTA Poris Plawad, dan TTA Pondok Cabe.



I.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mewujudkan konektivitas, pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi yang optimal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 559 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar I. 2 Komposisi SDM BPTJ Berdasarkan Pendidikan



Tabel I. 1 Data SDM BPTJ Berdasarkan Pendidikan

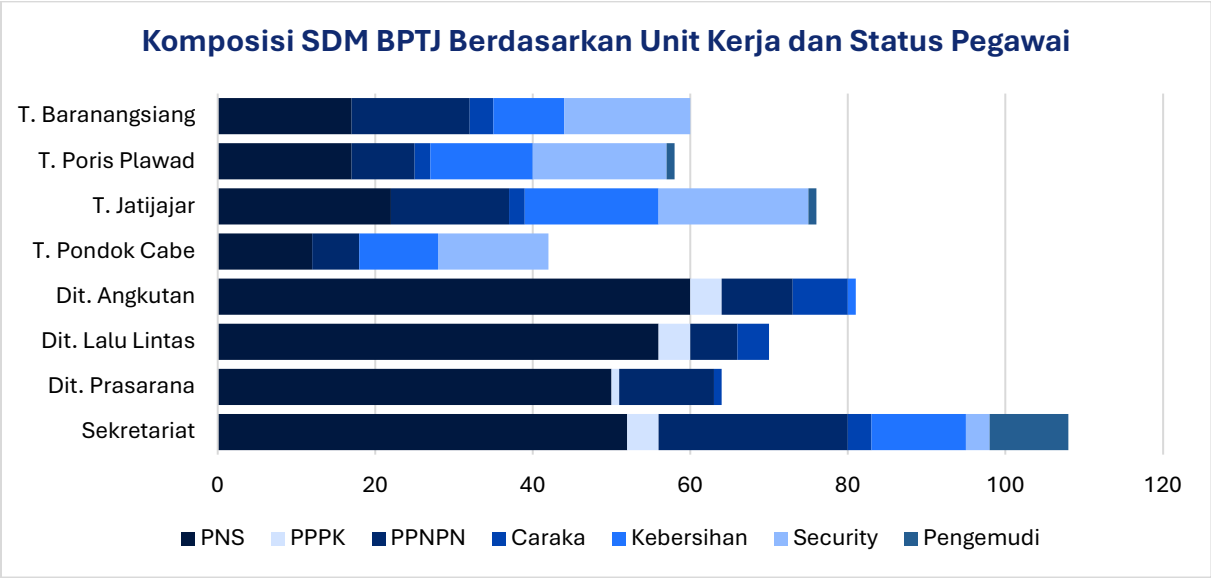
Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
SD/Sederajat	7	0	7
SMP/Sederajat	13	1	14
SMA/Sederajat	143	26	169
D1	0	2	2
D2	9	1	10
D3	80	47	127
D4/S1	95	73	168
S2	46	15	61
S3	0	1	1
Total	393	166	559

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Total sumber daya manusia (SDM) di BPTJ adalah 559 orang, terdiri dari 393 laki-laki dan 166 perempuan. SDM tersebut memiliki berbagai jenjang pendidikan, dengan komposisi 1,25% orang pada jenjang SD/Sederajat, 2,50% orang pada SMP/Sederajat, dan 30,23% orang pada SMA/Sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat 0,36% orang lulusan D1, 1,79% orang lulusan D2, 22,72% orang lulusan D3, 30,05% orang lulusan D4/S1, 10,91% orang lulusan S2, dan 0,18% orang lulusan S3. Data ini menunjukkan bahwa SDM BPTJ didukung oleh individu dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, yang berkontribusi pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun informasi komposisi SDM BPTJ yang lebih detail berdasarkan unit kerja dan status pegawai adalah sebagai berikut:

Gambar I. 3 Komposisi SDM BPTJ Berdasarkan Unit Kerja



Tabel I. 2 Data SDM BPTJ Berdasarkan Unit Kerja dan Status Pegawai

Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	Caraka	Pramubakti	Security	Pengemudi	Total
Sekretariat	52	4	24	3	12	3	10	108
Dit. Prasarana	50	1	12	1	0	0	0	64
Dit. Lalu Lintas	56	4	6	4	0	0	0	70
Dit. Angkutan	60	4	9	7	1	0	0	81
TTA Pondok Cabe	12	0	6	0	10	14	0	42
TTA Jatijajar	22	0	15	2	17	19	1	76
TTA Poris Plawad	17	0	8	2	13	17	1	58
TTA Baranangsiang	17	0	15	3	9	16	0	60
TOTAL	286	13	95	22	62	69	12	559

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

I.5. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.5.1. Potensi

Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 18 September 2015. Pembentukan organisasi ini selanjutnya diikuti dengan penetapan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Struktur organisasi tersebut kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dengan kewenangan BPTJ dalam mengelola penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala BPTJ, sehingga kewenangan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mutlak ada di BPTJ. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

RITJ merupakan acuan dalam pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi se-Jabodetabek dalam rangka mengintegrasikan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi

oleh wilayah administratif. Tujuan dari penyusunan RITJ, diantaranya, adalah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum, serta mempermudah mobilitas masyarakat. *Timeline* RITJ telah ditetapkan selama 12 (dua belas) tahun dan terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan. Dalam kurun waktu tersebut, BPTJ sangat diharapkan untuk dapat membenahi transportasi Jabodetabek bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait dan Kementerian/Lembaga lainnya. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden ini semakin menguatkan peran BPTJ sebagai regulator transportasi di wilayah Jabodetabek.

I.5.2. Isu Strategis

Sebagaimana telah ditetapkan dalam *timeline*, pengimplementasian RITJ memerlukan waktu 12 (dua belas) tahun dari 2018 hingga 2029. Pembangunan dalam waktu 12 tahun ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus paralel dan masif agar permasalahan transportasi dapat terselesaikan secara menyeluruh. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga badan usaha selaku pengembang maupun operator. Selain itu, dalam perencanaan transportasi dibutuhkan juga sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Seiring dengan perkembangan waktu, perencanaan transportasi dan tata ruang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.

Isu strategis dalam pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang perlu diselesaikan sesuai Rencana Strategis BPTJ Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan permasalahan kemacetan yang tidak cukup hanya dengan pendekatan *case by case problem solving* tetapi dengan pembenahan sistem transportasi yang menyeluruh, terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan konsisten
- b. Pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi
- c. Meningkatkan pelayanan transportasi umum di wilayah Jabodetabek agar menjadi pilihan utama dan dapat bersaing dengan kendaraan pribadi dan transportasi daring
- d. Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi untuk memudahkan masyarakat melakukan mobilitas

Di samping isu strategis yang tercantum di dalam Renstra BPTJ Tahun 2020-2024, terdapat isu strategis lain yang dihadapi oleh BPTJ pada tahun 2024 yaitu:

1. Pengembangan Layanan Transportasi Publik di Jabodetabek

Modal share angkutan umum adalah tingkat penggunaan angkutan umum dari seluruh perjalanan yang dilakukan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran RITJ untuk meningkatkan modal share angkutan umum di wilayah Jabodetabek, diperlukan akselerasi implementasi rencana pengembangan angkutan umum untuk melayani rute dari kawasan perumahan dan pusat perdagangan menuju pusat kota Jakarta. Hal tersebut dilaksanakan sebagai salah satu strategi untuk mendorong

masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Pengembangan tersebut diwujudkan melalui rencana *quick win* BPTJ tahun 2024 yang mencakup:

- a. Pengembangan rute layanan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) dan Transjabodetabek Premium;
- b. Integrasi fisik antara layanan Jabodetabek Residence Connexion dan Transjabodetabek Premium;
- c. Pertukaran sistem data lalu lintas antara BPTJ dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta (*system mirroring*)

2. Peningkatan Kualitas Udara di Jabodetabek Melalui Intervensi Kebijakan Sektor Transportasi

Dikutip dari Antara News, sektor transportasi merupakan kontributor emisi udara terbesar setelah sektor industri. Sementara World Bank menyatakan bahwa ~30-40% permintaan perjalanan di Indonesia berasal dari Jabodetabek dengan puncaknya pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 305 miliar orang-kilometer. Sekitar 30-50% emisi CO₂ juga berasal dari wilayah Jabodetabek. Pada 2050, emisi ini diperkirakan mencapai sekitar 30 miliar ton CO₂.

Greenpeace turut memaparkan datanya yang menunjukkan bahwa Jakarta menduduki peringkat ke-7 paling berpolusi di dunia. Angka PM_{2,5} tahunan sebesar 8 kali standar WHO (tidak sehat). Dengan ini Indonesia menjadi negara berpolusi tertinggi di Asia Tenggara. Sementara Tangerang

Selatan menjadi peringkat pertama kota paling berpolusi.

Untuk mengukur emisi sektor transportasi, IESR (Institute for Essential Services Reform) melakukan penelitian dan menyatakan 58% sektor emisi GRK transportasi disumbang oleh kendaraan pribadi (mobil dan motor). Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas udara di Jabodetabek melalui intervensi sektor transportasi.

3. Perubahan Organisasi BPTJ

Pada tahun 2024, terdapat isu strategis terkait transformasi kelembagaan BPTJ. Isu ini terealisasi pada saat terbitnya Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan. Pada perpres tersebut, kelembagaan BPTJ berubah menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Perpres ini juga mencabut Perpres Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda yaitu:

- a. perumusan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

I.5.3. Permasalahan

1. Keterbatasan Anggaran APBN

Dalam Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPTJ tahun 2020-2024 mencapai Rp2,87 Triliun, namun hingga tahun 2024 jumlah total alokasi anggaran yang diterima adalah sebesar Rp1,34 Triliun atau 47% dari indikasi yang ditetapkan dari indikasi anggaran Renstra BPTJ Tahun 2020-2024.

2. Keterbatasan Kewenangan Pengembangan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Dalam struktur kelembagaan BPTJ, terdapat unit kerja yang bertugas menangani perkeretaapian di Jabodetabek. Namun kewenangan dalam pengembangan perkeretaapian tersebut masih terbatas dan mayoritas dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga intervensi yang dapat dilakukan BPTJ dalam perkeretaapian masih terbatas.

Selain itu, pelaksanaan RITJ melibatkan 5 Kementerian/Lembaga dan 11 Pemerintah Daerah. Meski demikian, BPTJ mendapatkan mandat sebagai koordinator dari pelaksanaan RITJ tersebut. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan dukungan penuh

dari masing-masing instansi terkait untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan RITJ mengingat keterbatasan kewenangan BPTJ yang sebatas unit kerja eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

I.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Dokumen Kinerja Tahun 2024 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2024.

BAB IV : Penutup

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari kesimpulan, saran dan tindak lanjut hasil evaluasi.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
- Lampiran II : Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024
- Lampiran III : Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024
- Lampiran IV : Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024
- Lampiran V : Monitoring Rencana Aksi PK Tahun 2024
- Lampiran VI : Daftar Trayek Layanan Angkutan Umum
- Lampiran VII : Panjang Rel Kereta Api Perkotaan
- Lampiran VIII : Daftar Integrasi Simpul Transportasi
- Lampiran IX : Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- Lampiran X : Ketepatan Waktu Layanan Bus Perkotaan
- Lampiran XI : Ketepatan Waktu Layanan Kereta Api Perkotaan
- Lampiran XII : Kejadian Kecelakaan Angkutan Bus Perkotaan
- Lampiran XIII : Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi

Bab II

Perencanaan Kinerja



HUMAS

II.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan kemana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga bagaimana perencanaan tersebut dapat menjamin suatu keberhasilan atas pencapaian sasaran. Melalui pendekatan Rencana Strategis (Renstra) yang transparan dan sinergis, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencoba memadukan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya sebagaimana telah dituangkan di dalam Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor SK 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam sektor transportasi melalui perwujudan konektivitas yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

terus berupaya untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi perkotaan secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, dimana konektivitas dan integrasi merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Dalam kaitan tersebut, maka tujuan BPTJ dalam pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas transportasi di wilayah Jabodetabek
2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek
3. Mewujudkan restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi di Wilayah Jabodetabek

Tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja yang bersangkutan dengan sasaran terkait dengan ukuran dan rincian target per tahun sepanjang periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Target Rencana Strategis 2020-2024

Sasaran Strategis Kemenhub	Sasaran Program BPTJ	Indikator Kinerja Program BPTJ	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2024	2024
SS1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional	SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKP1. Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Rasio	0,34	0,36	0,38	0,41	0,45
SS2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Nilai	77	78	79	80	81
		IKP2.2. <i>On Time Performance</i> (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Rasio	0,70	0,75	0,85	0,85	0,85
	SP5. Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5. Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	85	86	87	88	89
SS3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01

Pada pelaksanaan rencana strategis tersebut, ditemukan adanya indikator kinerja pada dokumen renstra periode 2020-2024 yang perlu dioptimalkan. Dengan adanya temuan tersebut, maka pada tahun 2021 dilaksanakan revaluasi atas indikator kinerja BPTJ yang ditindaklanjuti dengan perubahan IKU dan dokumen perjanjian kinerja, serta kedepannya akan dilanjutkan dengan revisi renstra BPTJ tahun 2020-2024 dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan. Perubahan IKU BPTJ ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Penetapan indikator

tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan melengkapi petunjuk operasional penghitungan indikator melalui Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 318 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPTJ Nomor SK-BPTJ 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Perubahan tersebut saat ini menyebabkan adanya ketidakselarasan antara renstra dengan perjanjian kinerja tahun 2024. Perbedaan antara indikator kinerja pada rencana strategis dan indikator kinerja pada hasil revaluasi IKU ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Perbedaan IKU Rencana Strategis 2020-2024 dengan Penetapan IKU Hasil Reviu

Rencana Strategis			Penetapan IKU Hasil Reviu		
Sasaran Strategis Kemenhub	Sasaran Program BPTJ	Indikator Kinerja Program BPTJ	Sasaran Strategis Kemenhub	Sasaran Program BPTJ	Indikator Kinerja Program BPTJ
SS1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKP1. Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	SS1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek
SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek
		IKP2.2. <i>On Time Performance</i> (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek			IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek
SS3 Meningkatnya Keselamatan dan Transportasi	SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	SS3 Meningkatnya Keselamatan dan Transportasi	SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek
SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SP5. Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5. Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	SSp8 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ

II.2. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), mendefinisikan Perjanjian Kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah pengalokasian sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana tahunan (*annual performance plan*) dan penjabaran dari Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang memuat target dari masing-masing output program. Keputusan tersebut kembali disempurnakan dengan Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 318 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPTJ Nomor SK-BPTJ 42 Tahun 2021 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Keputusan terbaru tersebut melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh keputusan sebelumnya yang meliputi tata cara pengumpulan data dan sumber data penghitungan IKU. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan SK penetapan IKU dan bukan berdasarkan rencana strategis. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan IKU atas dasar rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian PANRB pada evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2020 sehingga IKU yang dipakai adalah IKU hasil reviu.

Perjanjian Kinerja BPTJ ini digunakan sebagai untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, maka ditetapkan target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88
SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Sasaran Program 4 diukur menggunakan Indikator Kinerja Program 5 -bukan Indikator Kinerja 4- disebabkan IKU sebelumnya memiliki Indikator Kinerja Program 4 Rasio Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek. Namun pada hasil reuiu IKU, IKP ini dihapuskan dan tidak dipakai lagi karena tidak mencerminkan *outcome*. IKP 5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ tetap menggunakan kode nomor 5 karena merupakan perubahan atas IKP 5 Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kode 5 tidak diubah menjadi 4 karena permasalahan teknis pada sistem informasi perencanaan KRISNA.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran strategis sesuai sasaran program dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung dengan anggaran yang ditetapkan melalui DIPA BPTJ. Pagu alokasi untuk tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.330.174.011.000 (tiga ratus tiga puluh miliar seratus empat puluh juta sebelas ribu rupiah). Detail alokasi anggaran ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II. 4 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ

Kegiatan		Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	25.501.222.000
2.	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	108.683.511.000
3.	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	17.413.286.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	37.337.062.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.169.039.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	62.684.235.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.684.623.000
8.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.239.975.000

Alokasi tersebut selanjutnya dipetakan menjadi anggaran per indikator kinerja program sebagaimana tertuang dalam rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2024 yang disajikan dalam tabel:

Tabel II. 5 Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	35.027.651.000
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	142.868.523.000
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	9.023.444.000
SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	36.920.494.000
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	106.333.899.000

Perubahan Pertama

Perubahan pertama atas Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ disahkan pada bulan Mei 2024. Revisi pertama ini dilakukan atas dasar adanya perubahan pejabat yang bertugas sebagai Kepala BPTJ, dan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan revisi ke-5 DIPA BPTJ tahun 2024.

Tabel II. 6 Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Kegiatan		Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	9.597.150.000
2.	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	136.485.444.000
3.	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	36.097.516.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	54.922.639.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.999.039.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	83.201.195.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.069.623.000
8.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.801.405.000

Adapun anggaran masing-masing indikator kinerja setelah perubahan perjanjian kinerja pertama adalah:

Tabel II. 7 Anggaran Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	37.525.784.000
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	141.387.359.000
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	9.873.444.000
SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	34.185.525.000
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	107.201.899.000

Perubahan Kedua

Perubahan kedua atas Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ disahkan pada bulan Desember 2024. Revisi kedua ini dilakukan atas dasar adanya perubahan pejabat yang bertugas sebagai Plt. Kepala BPTJ, serta adanya penyesuaian anggaran berdasarkan revisi ke-14 DIPA BPTJ tahun 2024.

Tabel II. 8 Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Kegiatan		Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	9.597.150.000
2.	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	136.485.444.000
3.	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	36.097.516.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	54.922.639.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.999.039.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	83.201.195.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.069.623.000
8.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.801.405.000

Adapun anggaran masing-masing indikator kinerja setelah perubahan perjanjian kinerja kedua adalah:

Tabel II. 9 Anggaran Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	40.182.551.000
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	136.585.582.000
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	9.873.444.000
SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	36.218.759.000
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	107.313.675.000

Bab III

Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan kinerja merupakan salah satu produk dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Latar belakang perlunya penyusunan LKIP adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka perwujudan *good governance*. Hal ini dalam rangka memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dicapai atau yang seharusnya tercapai. Selain itu, LKIP merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, yaitu sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik pada masa kerja berikutnya. LKIP sangat diperlukan bagi keberlangsungan suatu instansi karena dapat digunakan sebagai dasar acuan

ukuran yang tepat dalam hal melakukan evaluasi terhadap instansi tersebut. LKIP juga bisa mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait atau yang berhubungan dengan instansi tersebut.

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang dituangkan ke dalam LKIP, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dan sebagai bentuk transparansi atas kinerja, serta sebagai pertimbangan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan adanya kewajiban untuk menyusun laporan kinerja ini, BPTJ dapat terpacu untuk lebih fokus dalam pencapaian sasaran. Penyusunan laporan kinerja di BPTJ ditunjang dengan serangkaian upaya yang berkesinambungan untuk melaksanakan manajemen kinerja, yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala. Keseluruhan tahapan tersebut dipantau oleh Pimpinan melalui aplikasi berbasis web *e-performance* dan *e-monev* sehingga capaian kinerja dapat terkontrol.

Sementara itu, dalam rangka mengukur capaian kinerja BPTJ untuk setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran organisasi, dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana target capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan. Evaluasi atas capaian kinerja memungkinkan untuk dilakukan jika ditemukan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja terhadap rencana kinerja. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

III.1.TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) setiap bulannya telah dilakukan secara rutin dan dilaporkan dalam aplikasi *e-performance* sesuai dengan data capaian yang diinput oleh Unit Kerja Eselon I dan masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPTJ. Dengan aplikasi ini, evaluasi atas capaian kinerja Unit Eselon I dan Eselon II dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan batas waktu maksimal pengisian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perhitungan persentase capaian kinerja dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Namun demikian, pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan Unit Eselon I BPTJ yang bersifat teknis, maka tata cara perhitungannya disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja kegiatan tersebut. Untuk itu, telah ditetapkan rumusan perhitungan masing-masing capaian.

III.2.PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Rumus Pengukuran Kinerja BPTJ

Pengukuran kinerja BPTJ terutama ditinjau dari kinerja lalu lintas dan pelayanan Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek, diukur dengan menggunakan 4 (empat) Sasaran Program (SP) yang mencakup 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP), dengan rumus sebagai berikut:

1) SP 1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek

IKP 1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek diukur melalui Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek melalui tiga unsur pendukung. Unsur tersebut yaitu konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan, konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel, dan simpul transportasi utama yang terintegrasi dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$IKP1 = (30\% \times RKAU_{Jalan}) + (30\% \times RKAU_{KA}) + (40\% \times RST_{Utama})$$

$RKAU_{Jalan}$ adalah rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan

$$RKAU_{Jalan} = \frac{\text{Panjang Trayek AU Berbasis Jalan di Jabodetabek}}{\text{Panjang Jalan di Jabodetabek}}$$

$RKAU_{KA}$ adalah rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel

$$RKAU_{KA} = \frac{\text{Panjang Jalan Rel KA Perkotaan yang Beroperasi}}{\text{Luas Wilayah Jabodetabek}}$$

RST_{Utama} adalah rasio integrasi simpul transportasi utama

$$RST_{Utama} = \frac{\text{Simpul Utama dengan Akses Integrasi ke dan dari Simpul Perkotaan}}{\text{Jumlah Simpul Transportasi Utama di Jabodetabek}}$$

2) SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek

IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan mengacu pada dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IKP2.2 (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Nilai OTP layanan transportasi dengan lingkup pelayanan bus perkotaan, yang meliputi Transjabodetabek, Jabodetabek Airport Connexion (JAC) dan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) serta pelayanan kereta perkotaan.

Rumus penghitungan yang digunakan adalah:

$$IKP2.2 = (50\% \times OTPAU \text{ Jalan}) + (50\% \times OTPAU \text{ KA})$$

OTPAU Jalan adalah persentase perjalanan angkutan umum dari terminal tipe A yang tepat waktu

$$OTPAU \text{ Jalan} = \left(\frac{\sum \text{Perjalanan AU dari terminal tipe A yang tepat waktu}}{\sum \text{Perjalanan AU dari terminal tipe A}} \right) \times 100\%$$

OTPAU KA adalah persentase perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu

$$OTPAU \text{ KA} = \left(\frac{\sum \text{Perjalanan KA perkotaan yang tepat waktu}}{\sum \text{Perjalanan KA perkotaan}} \right) \times 100\%$$

3) SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek

IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek

Persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan dihitung dengan membandingkan jumlah kejadian kecelakaan bus perkotaan dengan jumlah total perjalanannya dengan rumus sebagai berikut:

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{\sum \text{Kecelakaan AU}}{\sum \text{Perjalanan AU}} \right) \times 10.000$$

4) SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ

Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal Birokrasi atas hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan setiap tahunnya. Nilai RB yang akan dipakai pada indikator adalah nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Target Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk tahun 2024 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berikut merupakan capaian kinerja yang dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024:

Tabel III. 1 Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target PK BPTJ Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (max 110)
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	0,507	110%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	93,978	99,977%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	91,447	103,917%
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100	93,724	93,724%
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	56,250	90,726%

Tabel III. 2 Nilai Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Nilai Kinerja (max. 110)
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek				110
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	0,507	110%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek				101,947
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	93,978	99,977%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	91,447	103,917%
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek				93,724
IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100	93,724	93,724%

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Nilai Kinerja (max. 110)
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				90,726
IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	56,250	90,726%

Sasaran Program 1:

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek

Mewujudkan konektivitas transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek merupakan bentuk dukungan BPTJ pada sasaran strategis Kemenhub untuk meningkatkan konektivitas transportasi nasional. Konektivitas transportasi antar daerah dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek akan mendukung peningkatan

dan percepatan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program ini, BPTJ merumuskan satu IKU yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek.

IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konektivitas transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Konektivitas adalah sejauh mana arus penumpang atau barang dari sebuah simpul dapat mencapai simpul lain secara langsung (koneksi langsung) atau tidak langsung melalui simpul lain atau serangkaian simpul. Konektivitas memiliki dampak yang besar pada kehidupan sehari-hari, dengan tiga aspek yang paling terpengaruhi yaitu jaringan, ekonomi, dan spasial.

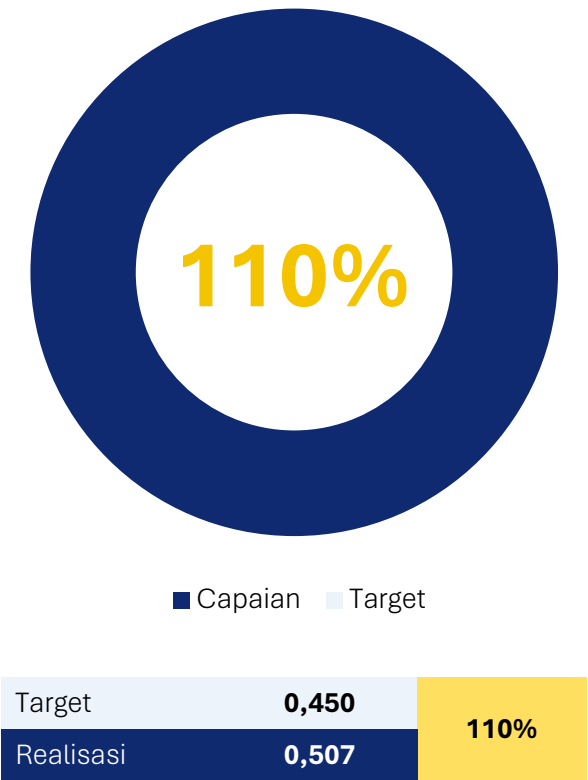
Jaringan merupakan konfigurasi layanan transportasi dan infrastruktur fisik antara simpul dengan atribut lain seperti kapasitas, keandalan, dan bahkan ketahanan. Konektivitas sangat bergantung pada jaringan transportasi yang menyediakan kemampuan fisik untuk menjangkau tempat-tempat yang dapat dilakukan melalui satu atau serangkaian moda. Pemeran utama jaringan adalah simpul transportasi yang menyediakan integrasi arus antar moda, operator yang menangani pergerakan antar simpul, dan pengelola infrastruktur yang memelihara serta mengembangkan simpul transportasi.

Dampak pada aspek ekonomi menyangkut interaksi yang dimungkinkan oleh adanya konektivitas antara pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Dengan demikian, peningkatan konektivitas memungkinkan interaksi komersial yang lebih murah, yang menghasilkan lebih banyak peluang untuk bertransaksi. Dampak konektivitas terhadap ekonomi sering kali sulit diprediksi karena keputusan komersial dibuat oleh banyak entitas yang membuat penilaian mereka sendiri dan bertindak secara independen berdasarkan keputusan tersebut di luar adanya konektivitas atau tidak.

Pada aspek spasial. Konektivitas dipengaruhi dan berdampak pada struktur spasial serta intervensi kebijakan. Simpul transportasi memengaruhi entitas spasial seperti wilayah metropolitan atau wilayah yang bertindak sebagai daerah penyangga, menjadikan konektivitas sebagai faktor daya saing wilayah. Dampak dari perbedaan konektivitas biasanya berupa pemusatan aktivitas di sekitar simpul yang paling terhubung, yang dapat berpengaruh besar pada potensi pembangunan.

Capaian IKU Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek pada tahun 2024 adalah 110% dengan nilai realisasi IKU senilai 0,507 dari target 0,45.

Gambar III. 1 Capaian Kinerja IKP1 Tahun 2024



Konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan tiga unsur penunjang yaitu rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan, rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel, dan rasio integrasi simpul transportasi utama.

Tabel III. 3 Komponen Realisasi IKP1

Komponen	Bobot	Nilai	Realisasi
IKP 1			0,507
RKAU _{Jalan}	30%	0,890	0,267
RKAU _{KA}	30%	0,049	0,015
RST _{Utama}	40%	0,563	0,225

Konektivitas angkutan umum berbasis jalan mencerminkan cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan di jalan raya yang mengintegrasikan satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya layanan angkutan umum yang dapat menghubungkan banyak lokasi, masyarakat dapat berangkat menuju tempat tujuan dengan menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama mobilitas. BPTJ telah berupaya menyediakan angkutan umum perkotaan untuk melayani pergerakan masyarakat. Layanan angkutan umum yang tersedia antara lain TransJabodetabek, Jabodetabek Residence Connexion (JRC), Jabodetabek Airport Connexion (JAC), dan layanan subsidi angkutan umum dengan skema *Buy the Service* (BTS). Di samping layanan angkutan yang disediakan oleh BPTJ, terdapat layanan yang juga disediakan oleh pemerintah daerah seperti layanan Transjakarta, Mikrotrans, dan Angkutan Perkotaan (angkot).

Konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel merupakan cakupan pelayanan kereta api perkotaan di wilayah Jabodetabek. Kereta api perkotaan merupakan salah satu pilihan moda agar pergerakan masyarakat tidak seluruhnya berfokus pada pergerakan di jalan raya. Di wilayah Jabodetabek telah tersedia tiga jenis kereta api perkotaan yakni Kereta Rel Listrik (KRL), *Mass Rapid Transit*/Moda Raya Terpadu (MRT), dan *Light Rapid Transit*/Lintas Rel Terpadu (LRT). Kereta perkotaan seperti KRL dapat mencapai jarak yang lebih jauh dengan tarif yang relatif murah atas adanya subsidi *Public Service Obligation* (PSO) sehingga konektivitas angkutan berbasis rel menjadi unsur yang vital dalam sistem transportasi perkotaan.

Sementara Integrasi dilaksanakan dalam rangka kemulusan transportasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat

untuk menggunakan angkutan umum. Adanya integrasi membuat perpindahan moda pada saat perjalanan ke tempat tujuan menjadi lebih

mudah dan nyaman. Untuk itu diperlukan adanya integrasi antar simpul transportasi perkotaan.



Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Capaian kinerja konektivitas angkutan umum berbasis jalan dihitung menggunakan data panjang trayek angkutan umum perkotaan dan data panjang jalan di wilayah Jabodetabek. Panjang trayek angkutan umum perkotaan

terdiri dari trayek angkutan perkotaan (angkot) dan angkutan bus perkotaan. Panjang trayek angkot, panjang trayek bus, dan panjang jalan di Jabodetabek disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 4 Panjang Trayek Angkot

No.	Kota / Kab	Panjang Lintasan Trayek Angkot (Km)
1	Kota Bogor	368
2	Kabupaten Bogor	835
3	Kota Bekasi	979
4	Kabupaten Bekasi	

No.	Kota / Kab	Panjang Lintasan Trayek Angkot (Km)
5	Kota Depok	466
6	Kabupaten Tangerang	
7	Kota Tangerang	883
8	Kota Tangerang Selatan	
9	Provinsi DK Jakarta	1846
Total		5.377

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel III. 5 Panjang Trayek Bus

No.	Operator	Panjang Lintasan Trayek Bus (Km)
1	Agra Mas	380,8
2	Aja P	276
3	Big Bird	163
4	Damri	1834,1
5	Daya Sentosa Utama	39
6	Hiba Utama	33,4
7	Kosub Bersama	108,3
8	Kramat Djati	82,5
9	Lorena	39
10	Mayasari Bakti	714,4
11	Primajasa	112,6
12	Sinar Jaya	65,6
13	Trans Galaxy	4
14	Trans Kota	8
15	Trans Patriot	12
16	Transjakarta	3509,6
Total		7.382

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel II. 10 Total Panjang Trayek

No.	Moda Angkutan Umum	Panjang Lintasan Trayek (Km)
1	Angkot	5.377
2	Bus	7.382,3
Total		12.759

Total dari panjang trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759 Km dengan data sebagaimana disajikan pada lampiran VI. Sementara itu data panjang jalan di wilayah Jabodetabek dihimpun dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tiap wilayah. Berikut data panjang jalan di wilayah Jabodetabek

Tabel III. 6 Panjang Jalan di Jabodetabek

Wilayah	Panjang Jalan (Km)		
	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
Jakarta Selatan	14	1.986	-
Jakarta Timur	22	1.496	-
Jakarta Pusat	-	692	-
Jakarta Barat	12	1.170	-
Jakarta Utara	12	1.089	-
Kab. Bogor	123	132	1.764
Kab. Bekasi	29	32	1.077
Kota Bogor	29	12	209
Kota Bekasi	14	22	299
Kota Depok	33	12	1.958
Kab. Tangerang	28	108	993
Kota Tangerang	18	32	255
Tangerang Selatan	10	52	654
Total		14.338	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut, penghitungan rasio konektivitas angkutan umum berbasis jalan adalah:

$$RKAU_{Jalan} = \frac{\text{Panjang Trayek AU Berbasis Jalan di Jabodetabek}}{\text{Panjang Jalan di Jabodetabek}}$$

$$RKAU_{Jalan} = \frac{12.759}{14.338} = 0,890$$

Maka diperoleh nilai rasio konektivitas angkutan umum berbasis jalan sebesar 0,890.



Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel

Capaian kinerja konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel dihitung menggunakan data panjang rel kereta api perkotaan yang beroperasi dan data luas wilayah Jabodetabek. Data panjang rel kereta api perkotaan yang

beroperasi menggunakan panjang rel KRL, MRT, dan MRT. Sementara luas wilayah Jabodetabek dihimpun dari data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut sebagai berikut.

Tabel III. 7 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan

Moda		Jalur/Rute	Panjang (Km)
KRL	1	Bogor – Jakarta Kota	54,516
	2	Citayam - Nambo	16,237
	3	Manggarai – Kampung Bandan	14,990
	4	Manggarai – Cikarang	39,195
	5	Kampung Bandan - Jatinegara	10,386
	6	Jakarta Kota - Tanjung Priok	7,374
	7	Duri - Tangerang	19,297
	8	Tenjo - Tanah Abang	48,151
	9	Cikarang - Kedung Gedeh	11,771
	10	Ancol - Rajawali	3,629
	11	Bogor - Cigombong	19,662
LRT	1	Cawang – Cibubur	14,890
	2	Cawang – Dukuh Atas	11,050
	3	Cawang – Bekasi Timur	18,490
	4	Pegangsaan Dua - Velodrome	5,800
MRT	1	Lebak Bulus – Bundaran HI	15,700
	2	Bundaran HI – Kota	5,800
Total			316,938

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ, 2024

Panjang rel kereta api perkotaan di Jabodetabek yang beroperasi adalah sepanjang 316,938 Km. Data tersebut juga disajikan pada lampiran VII. Sementara itu, luas wilayah Jabodetabek adalah seluas 6.437,89Km² sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel III. 8 Luas Wilayah Jabodetabek

Wilayah	Luas Wilayah (km ²)
DKI Jakarta	664,01
Kabupaten Bogor	2710,62
Kota Bogor	118,5
Kota Depok	200,29
Kota Bekasi	206,61

Wilayah	Luas Wilayah (km ²)
Kabupaten Bekasi	1224,88
Kabupaten Tangerang	1011,86
Kota Tangerang	153,93
Kota Tangerang Selatan	147,19
Total	6.437,89

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh penghitungan untuk rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel:

$$RKAU_{KA} = \frac{\text{Panjang Jalan Rel KA Perkotaan yang Beroperasi}}{\text{Luas Wilayah Jabodetabek}}$$

$$RKAU_{KA} = \frac{316,94}{6.437,89} = 0,049$$

Maka diperoleh nilai untuk rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel sebesar 0,049



Rasio Integrasi Simpul Transportasi Utama

Capaian kinerja integrasi simpul utama dihitung dengan data jumlah simpul utama dengan akses integrasi ke dan dari simpul perkotaan dengan data jumlah total simpul utama di Jabodetabek

Tabel III. 9 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Total Simpul	Jumlah Simpul Terintegrasi
DKI Jakarta	88	62
Bekasi Raya	16	8
Kota Depok	6	3
Bogor Raya	21	3
Tangerang Raya	20	9
Total	151	85

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ, 2024

Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penghitungan rasio integrasi simpul transportasi utama:

$$RST_{Utama} = \frac{\text{Simpul Utama dengan Akses Integrasi ke dan dari Simpul Perkotaan}}{\text{Jumlah Simpul Transportasi Utama di Jabodetabek}}$$

$$RST_{Utama} = \frac{85}{151} = 0,563\%$$

Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul dengan detail disajikan dalam lampiran VIII. Saat ini baru terdapat 85 simpul yang terintegrasi karena terdapat perbedaan kewenangan pada masing-masing simpul yang meliputi pemerintah daerah dan pihak swasta. Sementara tidak semua pemilik kewenangan dapat didorong untuk melaksanakan pembangunan fasilitas integrasi pada simpul dimaksud karena perbedaan program prioritas.

Diketahui bahwa IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek bersifat komposit yang berasal dari pembobotan indikator lain. Data capaian penunjang IKP1 adalah sebagai berikut:

- Nilai $RKAU_{Jalan}$ sebesar 0,890
- Nilai $RKAU_{KA}$ sebesar 0,049
- Nilai RST_{Utama} sebesar 0,563

Dengan data tersebut, maka penghitungan IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek dilakukan dengan rumus berikut:

$$IKP1 = (30\% \times RKAU_{Jalan}) + (30\% \times RKAU_{KA}) + (40\% \times RST_{Utama})$$

$$IKP1 = (30\% \times 0,890) + (30\% \times 0,049) + (40\% \times 0,563) = 0,507$$

Dari hasil tersebut, didapatkan nilai Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,507. Hasil capaian dari IKP1 mencapai 110% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 0,45.

Selama tahun 2024, BPTJ secara aktif menjalankan serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Implementasi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas transportasi perkotaan, menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, dan membawa Jabodetabek menuju tingkat keterhubungan yang lebih optimal.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk menunjang Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi Aksesibilitas dan Integrasi moda pada simpul transportasi di Jabodetabek dengan difokuskan pada aksesibilitas dan integrasi moda pada Stasiun LRT Jabodebek serta pemantauan pelaksanaan pembangunan peningkatan bangunan operasional fasilitas integrasi pendukung pada Skybridge Bojonggede.
2. Monitoring dan Evaluasi Kawasan TOD di Jabodetabek pada progres pengembangan TOD di Jabodetabek. Evaluasi dilaksanakan dengan pembahasan untuk mencari solusi isu pengembangan dari masing-masing kawasan TOD yang telah termonitor.
3. Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Perkeretaapian dalam rangka pemantauan pelaksanaan pekerjaan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg. Monitoring prasarana perkeretaapian harus terus dilakukan guna memastikan keandalan prasarana dalam upaya meningkatkan

keselamatan perjalanan kereta dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna kereta api.

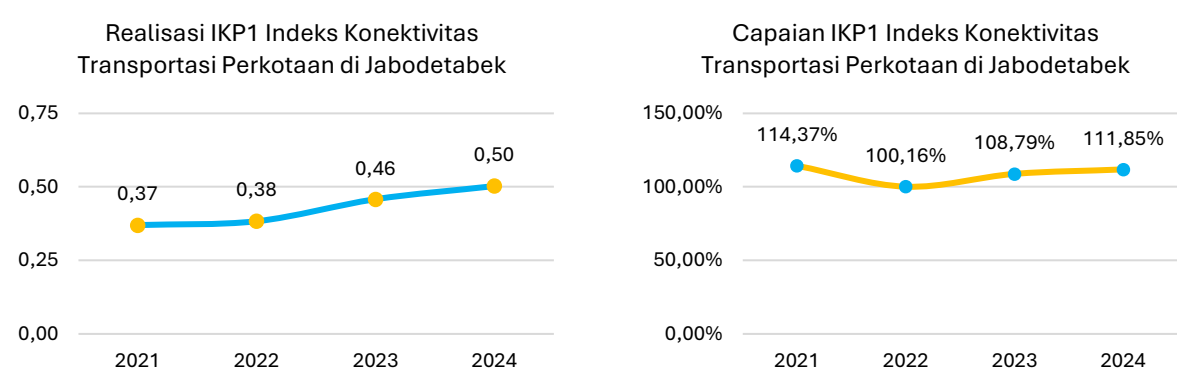
4. Monitoring Pengembangan Prasarana Transportasi Darat di Wilayah Jabodetabek untuk memantau hasil peningkatan pelayanan dan penataan fasilitas prasarana transportasi darat sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal
5. Pelatihan Teknis Prasarana Perkeretaapian yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.
6. Pembangunan Fasilitas Halte Jabodetabek
7. Pembangunan Fasilitas Integrasi (Halte Bus) pada Simpul Stasiun LRT Jatimulya dan Stasiun LRT Cikunir 1
8. Pembangunan Fasilitas Integrasi (Halte Bus) pada Simpul Stasiun LRT Bekasi Barat
9. Pembangunan Fasilitas Integrasi (Halte Bus) pada Simpul Stasiun LRT Harjamukti
10. Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kabupaten Bogor
11. Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Tangerang
12. Pembangunan Jalur Sepeda pada Ruas Jalan di Kota Bogor
13. Pendampingan Rencana Pengembangan Proyek KPBK Kawasan TOD Jabodetabek
14. Sosialisasi Pengoperasian Stasiun Pondok Rajeg
15. Pembangunan Halte Pendukung Program BTS Angkutan Umum di Kota Bekasi

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa langkah strategis peningkatan konektivitas yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
2. Berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah/pusat terkait rencana pembangunan halte BTS;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya



Perbandingan antara realisasi kinerja IKP1 tahun 2024 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa performa kinerja IKP1 terus meningkat setiap tahunnya. Sementara capaian kinerja setiap tahun berada di angka 100% atau lebih yang menandakan BPTJ secara konsisten mampu mencapai target kinerja IKP1.

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 tidak dibandingkan dalam gambar tersebut karena

perbedaan IKP. Pada tahun 2020, sasaran terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek diukur menggunakan IKP meningkatnya modal share angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.

Adapun realisasi IKP1. Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 yaitu 0,285 dari target 0,34 dengan nilai capaian 83,882%.

Tabel III. 10 Realisasi Kinerja IKP1 Sebelum Perubahan IKU

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (max 110)
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKP1. Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Rasio	0,34	0,285	83,882%

Hingga saat ini belum ditemukan nilai kinerja level nasional maupun internasional yang dapat dibandingkan secara *apple to apple* dengan IKU indeks konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek. Kota metropolitan di negara maju pada umumnya menggunakan IKU modal share

angkutan umum. Karena meningkatnya modal share merupakan *ultimate goal* yang hanya akan terwujud jika konektivitas, pelayanan, dan keselamatan serta keamanan transportasi umum telah diwujudkan optimal.

Sasaran Program 2:

Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek

Mewujudkan kinerja layanan transportasi di wilayah Jabodetabek merupakan bentuk dukungan BPTJ pada sasaran strategis Kemenhub untuk kinerja pelayanan perhubungan. Pelayanan transportasi umum yang optimal akan mendukung peningkatan pengguna angkutan umum dan mempercepat *shifting* perjalanan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum di wilayah Jabodetabek.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program ini, BPTJ merumuskan dua IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dan *On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek.

1) IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

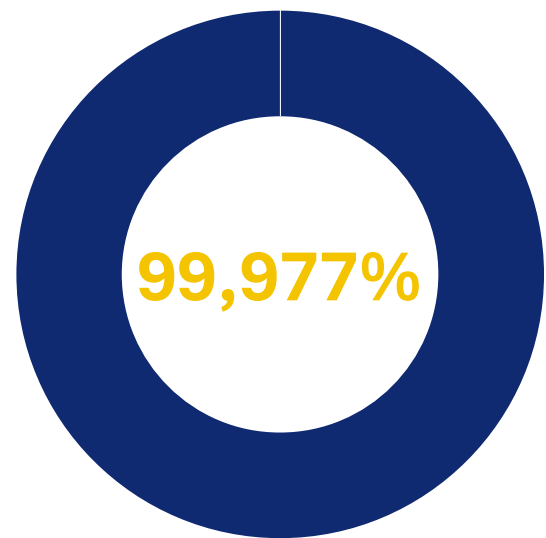
IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan terminal dan angkutan umum yang menjadi kewenangan BPTJ dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rentang nilai IKM yang digunakan adalah nilai 1—100 dengan kategori mutu A s.d. D:

1. Nilai Interval 0,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik (D);
2. Nilai Interval IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik (C);
3. Nilai Interval IKM 76,61-89,99 artinya kinerja unit pelayanan Baik (B);
4. Nilai Interval IKM 90-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (A).

Capaian IKU IKM terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek pada tahun 2024 adalah 99,977 % dengan nilai realisasi IKU senilai 93,978 dari target 94.

Gambar III. 3 Capaian Kinerja IKP2.1 Tahun 2024



■ Capaian ■ Target

Target	94	99,977%
Realisasi	93,978	

IKM terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terdiri dari 8 (delapan) unsur pelayanan yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respons, serta Konsultasi dan Pengaduan.

Tabel III. 11 Komponen IKP2.1

Komponen	Nilai
IKP 2.1	93,978
Informasi	94,082
Persyaratan	94,470
Prosedur/Alur	94,643
Waktu Penyelesaian	94,222
Tarif/Biaya	94,623
Sarana Prasarana	92,628
Respons	93,213
Konsultasi dan Pengaduan	93,944

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Informasi adalah ketersediaan informasi yang relevan dengan layanan yang disediakan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Respons adalah kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan yang diperlukan.

Konsultasi dan Pengaduan adalah kemudahan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.

Untuk menilai indeks dari unsur pelayanan di atas, terdapat atribut pertanyaan untuk mewakili unsur-unsur tersebut. Atribut pertanyaan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam jasa pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang akan diuraikan sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
1	Informasi	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik
2	Persyaratan	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini
3	Prosedur/Alur	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan
4	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini
5	Tarif/Biaya	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6	Sarana Prasarana	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan <i>online</i> yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan
7	Respons	Petugas pelayanan/sistem pelayanan <i>online</i> pada unit layanan ini merespons keperluan Bapak/Ibu dengan cepat
8	Konsultasi dan Pengaduan	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

Sumber: Sistem Aplikasi 3AS Case Survey Management

Berdasarkan delapan unsur pelayanan dan atribut pertanyaan tersebut, dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek melalui aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan survei pengukuran kepuasan masyarakat atas kinerja BPTJ dilakukan di empat lokasi yaitu:

1. Terminal Tipe A Jatijajar;
2. Terminal Tipe A Baranangsiang;
3. Terminal Tipe A Pondok Cabe;
4. Terminal Tipe A Poris Plawad.

Adapun jumlah sampel responden yang diperlukan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Didapati pada Lampiran II PM tersebut, dibutuhkan jumlah sampel minimum sebanyak 384 responden.

Survei pengukuran kepuasan masyarakat pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap 494 responden dengan detail nilai pada lampiran IX. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dari total 494 responden tersebut, maka diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan sebagaimana dijabarkan pada tabel III.X Nilai Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil nilai IKM sebesar 93,978.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil nilai IKM adalah “93,978,” sehingga mutu pelayanan yang didapat adalah bernilai “A”
- b. Berdasarkan mutu pelayanan di atas, maka kinerja unit pelayanan dikategorikan “Sangat Baik.”

Adapun berdasarkan hasil survei tersebut, realisasi nilai IKM adalah 93,978 atau tercapai sebesar 99,977% dari target sebesar 94.

Sepanjang tahun 2024, BPTJ telah menjalankan sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Melalui serangkaian kegiatan, BPTJ berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, dan memperkuat interaksi positif antara pengguna layanan dengan sistem transportasi umum massal perkotaan.

Beberapa kegiatan yang mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek yaitu:

- a. Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bekasi
- b. Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bogor
- c. Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Depok
- d. Kampanye Sosialisasi Layanan Biskita Goes to Campus and School di Kota Bekasi dan Kota Depok
- e. Penataan Sirkulasi Kendaraan dan Penumpang Pada Terminal Poris Plawad
- f. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMKPAU
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Orang Transportasi Jalan di Wilayah Jabodetabek
- i. Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Lalu Lintas Jabodetabek untuk memperoleh metadata lalu lintas di wilayah Jabodetabek
- j. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pendukung angkutan umum perkotaan Jabodetabek
- k. Operasional PLTS di Terminal Tipe A Jatijajar dan Pondok Cabe sebagai sumber listrik terminal
- l. monitoring hasil analisis dampak lalu lintas Jabodetabek untuk memantau implementasi rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas
- m. Monitoring Kinerja Kebijakan Angkutan Barang di jalan tol
- n. Monitoring Pengoperasian Teknologi Transportasi Jabodetabek. Pada monitoring tersebut dilakukan pembaruan data secara berkala serta

memastikan informasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna

- o. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Subsidi Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Wilayah Jabodetabek
- p. Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek melalui kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan di Jalan Nasional wilayah Jabodetabek

Permasalahan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun ini belum memenuhi standar yang ditetapkan, terutama pada tiga aspek: sarana prasarana (nilai 92,628), respons (nilai 93,213), dan konsultasi/pengaduan (nilai 93,944). Ketiganya berada di bawah target minimal 94, mengindikasikan adanya celah sistemik dalam pelayanan publik

Aspek sarana prasarana berkaitan erat dengan infrastruktur pelayanan baik fisik maupun infrastruktur sistem non fisik. Kurangnya nilai IKM pada aspek sarana prasarana diduga bersumber dari prasarana TTA Baranangsiang dan TTA Poris Plawad.

Pada kasus TTA Baranangsiang, sengketa lahan dengan pihak swasta telah menghambat pembangunan dan renovasi infrastruktur selama bertahun-tahun. Adanya status sengketa membuat alokasi APBN untuk perbaikan fasilitas terhenti karena regulasi pelarangan penggunaan dana negara di area konflik. Akibatnya, fasilitas seperti shelter penumpang dan

toilet di terminal tersebut masih menggunakan infrastruktur lama.

Sementara itu di TTA Poris Plawad, masalah utama terletak pada tata kelola zonasi dan alur penumpang yang belum optimal. Terminal ini belum memiliki pembagian area yang jelas antara zona keberangkatan, kedatangan, dan area komersial, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan pengguna. Selain itu, area terminal belum sepenuhnya steril dari pihak tidak berkepentingan, seperti pedagang kaki lima dan oknum pihak luar yang memanfaatkan kerumunan untuk aktivitas yang tidak sesuai standar pelayanan. Hal ini mengurangi kenyamanan dan keamanan penumpang, terutama pada jam sibuk.

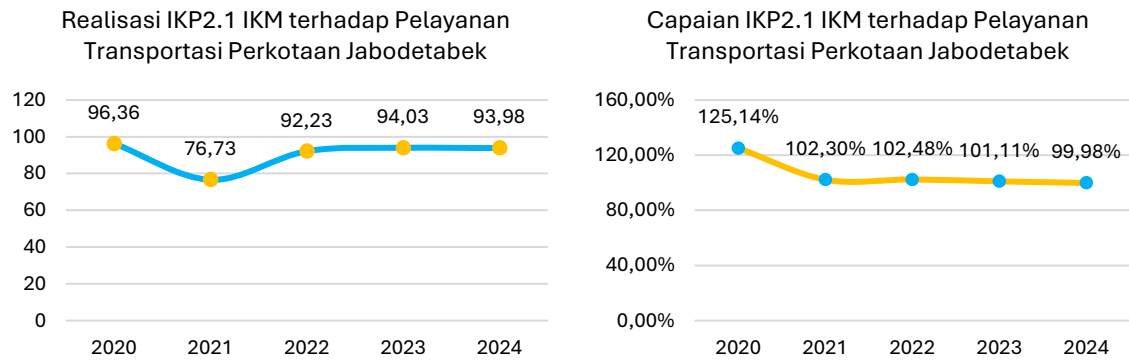
Sementara aspek respons serta konsultasi dan pengaduan masih memiliki keterkaitan satu sama lain. Respons berkaitan dengan kecepatan petugas memberikan pelayanan, sementara konsultasi/pengaduan berkaitan dengan kemudahan penyampaian kendala.

Namun demikian, nilai IKM telah berada pada angka 93,978 yang berarti hanya terdapat gap kinerja sebesar 0,022 poin dari target 94 dengan nilai capaian 99,977% atau 100% jika dibulatkan tanpa desimal.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP2.1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya



Perbandingan kinerja aktual IKP2.1 tahun 2024 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa nilai IKM bersifat fluktuatif setiap tahunnya sesuai dengan kondisi yang ada pada tahun tersebut.

Sementara jika membandingkan nilai IKM pelayanan transportasi Jabodetabek dengan nilai IKM pelayanan transportasi nasional, maka diperoleh perbandingan berikut:

Tabel III. 12 Perbandingan IKM dengan tingkat nasional

Indikator Kinerja	Nilai 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek (BPTJ)	93,978
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Darat (Nasional)	96,470

Sumber: BPTJ, Ditjen Perhubungan Darat

Nilai IKM BPTJ berada pada posisi 2,492 poin lebih rendah (2,58%) dibandingkan dengan nilai IKM nasional, khususnya pada transportasi darat. Tantangan yang dihadapi BPTJ adalah tingginya ekspektasi masyarakat sebagai pengguna transportasi di wilayah metropolitan. Terlebih lagi jika membandingkan Jabodetabek dengan

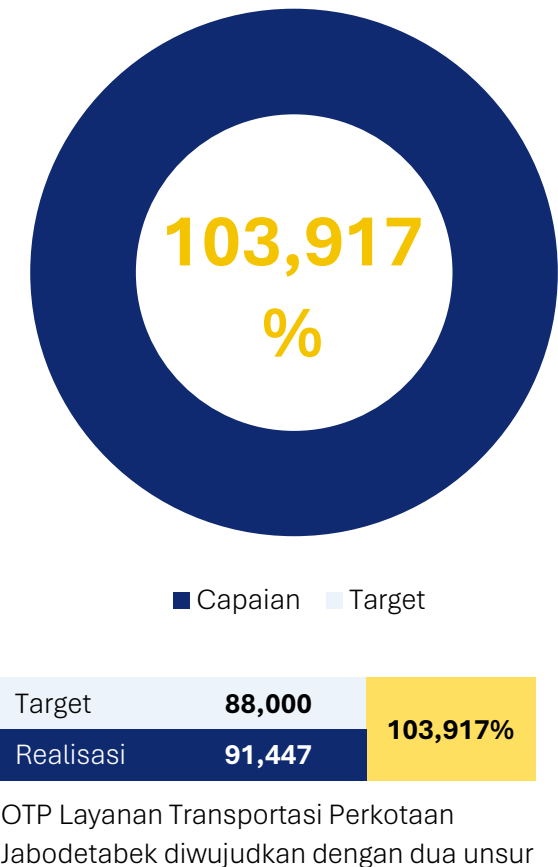
metropolitan lain di negara maju seperti Tokyo, London, Seoul, dll. Melihat kondisi tersebut, wajar jika masyarakat memiliki harapan yang sama terhadap layanan transportasi publik di Jabodetabek. Tentunya BPTJ perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak untuk menjawab harapan masyarakat tersebut.

2) IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

OTP menunjukkan ketepatan waktu perjalanan angkutan umum yang dihitung dengan rasio antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan rekapitulasi atas waktu kedatangan dan keberangkatan bus dan kereta api.

Capaian IKU *On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek pada tahun 2024 adalah 103,917% dengan nilai realisasi IKU senilai 91,447 dari target 88.

Gambar III. 5 Capaian Kinerja IKP2.2 Tahun 2024



penunjang yaitu OTP angkutan umum berbasis jalan dan OTP angkutan umum perkeretaapian.

Tabel III. 13 Komponen IKP2.2

Komponen	Bobot	Nilai	Realisasi
IKP 2.2			91,447
OTPAU _{Jalan}	50%	86,333	43,167
OTPAU _{KA}	50%	96,561	48,280

Dalam upaya meningkatkan layanan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), BPTJ meluncurkan beberapa layanan angkutan umum massal sebagai langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan umum yang menyasar kelompok masyarakat tertentu dengan layanan *point to point*. Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan angkutan umum massal dengan masyarakat dan diharapkan dapat mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke moda angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan dan mengurangi kemacetan.

Penghitungan OTP dilakukan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan angkutan kereta komuter Jabodetabek. Bus perkotaan tersebut adalah layanan bus TransJabodetabek, Jabodetabek Residence Connexion (JRC), dan Jabodetabek Airport Connexion (JAC).

Data OTP pada masing-masing moda transportasi yang diperoleh dari Perusahaan Otobus (lampiran X) sebagai operator bus dan PT. Kereta Commuter Indonesia (Lampiran XI) sebagai operator kereta api perkotaan adalah sebagai berikut.

Tabel III. 14 On Time Performance AU Berbasis Jalan

OTPAU _{Jalan}	86,333
Perjalanan <i>On Time</i>	158.211
Perjalanan total	183.256

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diperoleh nilai On Time Performance Angkutan Umum Berbasis Jalan sebesar 80.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dihitung dengan rumus:

$$IKP2.2 = (50\% \times OTPAU \text{ Jalan}) + (50\% \times OTPAU \text{ KA})$$

$$IKP2.2 = (50\% \times 86,333) + (50\% \times 96,561) = 91,447$$

Realisasi On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah 91,447 atau tercapai sebesar 103,917% dari target senilai 88.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek untuk survei ketepatan waktu perjalanan KRL Commuter Line di

Tabel III. 15 On Time Performance AU Berbasis Rel

OTPAU _{KA}	96,561
Perjalanan <i>On Time</i>	405.082
Perjalanan total	419.510

Sumber: Direktorat Lalu Lintas BPTJ, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diperoleh nilai On Time Performance Angkutan Umum Berbasis Rel sebesar 96,561.

- Jabodetabek baik on-board maupun on-station
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Perkeretaapian Jabodetabek
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek

dalam rangka pengembangan dan penataan jaringan jalur KA Perkotaan di wilayah Jabodetabek

- d. Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- e. Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek untuk memberikan *reward* bagi pihak yang melakukan pelayanan dengan optimal

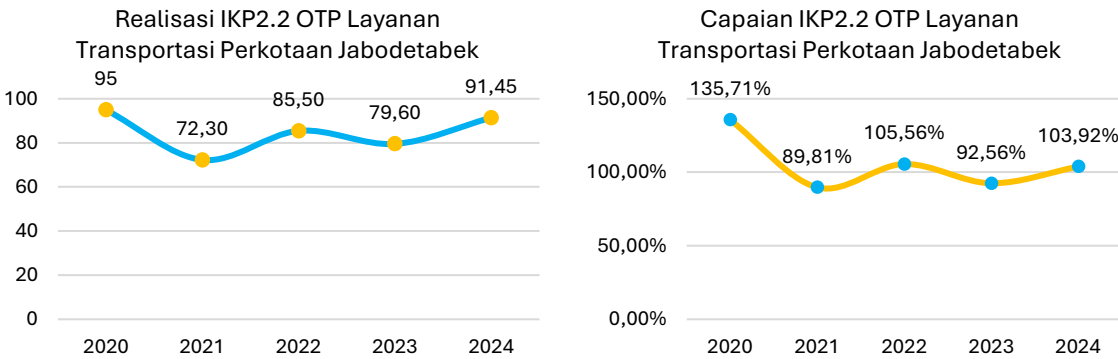
Untuk meningkatkan kinerja On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi

Perkotaan Jabodetabek, terdapat beberapa langkah yang akan diimplementasikan oleh BPTJ:

1. Memperkuat koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk dukungan terhadap pemenuhan ketepatan waktu angkutan umum perkotaan
2. Melakukan analisis lanjutan untuk memperoleh prioritas lokasi atau Jalur Perlintasan Langsung (JPL) dalam penanganan perlintasan sebidang.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Gambar III. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP2.2 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya



Perbandingan antara realisasi kinerja IKP2.2 tahun 2024 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi IKP2.2 bersifat fluktuatif. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa ketepatan waktu perjalanan angkutan umum yang sangat bergantung dengan situasi lalu lintas di jalan. Sementara itu capaian kinerja IKP2.2 juga bersifat fluktuatif

namun masih memiliki tren membaik dari realisasi 2021 sebesar 72,30 hingga realisasi 2024 yang mencapai 91,45.

Sementara jika membandingkan nilai OTP pelayanan transportasi Jabodetabek dengan nilai OTP pelayanan transportasi nasional, maka diperoleh perbandingan berikut

Tabel III. 16 Perbandingan OTP dengan tingkat nasional

Indikator Kinerja	Nilai 2024
OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek (BPTJ)	91,447
OTP Layanan Transportasi Darat dan Kereta (Nasional)	64,013

Sumber: BPTJ, DJPD, DJKA

Nilai OTP BPTJ berada pada posisi 24,267 poin lebih tinggi (38%) dibandingkan dengan nilai OTP nasional menunjukkan keberhasilan penerapan sistem transportasi. Capaian ini tidak lepas dari perbedaan signifikan antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) angkutan umum Jabodetabek dibandingkan dengan wilayah

lain di Indonesia. Saat OTP nasional masih berfokus pada isu keterlambatan angkutan, BPTJ berhasil menciptakan ekosistem transportasi yang mengedepankan ketepatan waktu melalui kombinasi kebijakan progresif, infrastruktur cerdas, dan kolaborasi multi sektor.

Sasaran Program 3:

Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek

Mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek merupakan bentuk dukungan BPTJ pada sasaran strategis Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Keselamatan dan keamanan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat memberikan dampak terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum

sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat dengan lebih baik.

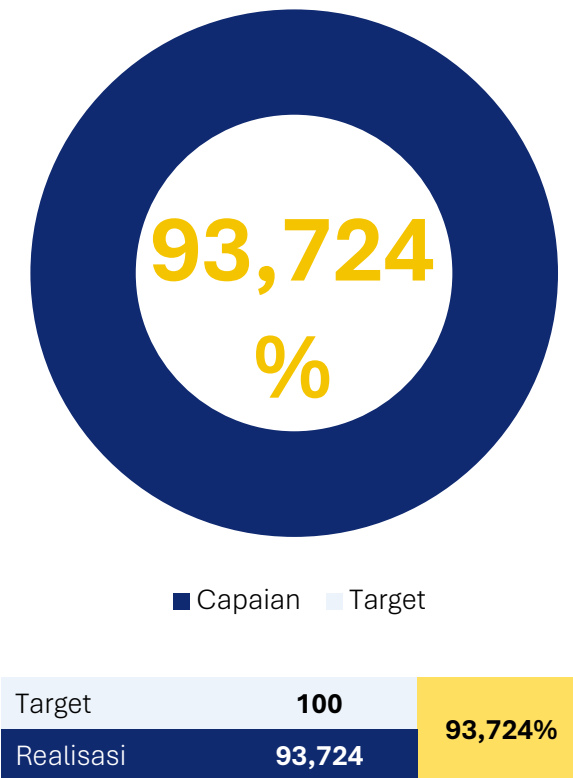
Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program ini, BPTJ merumuskan satu IKU yaitu Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek.

IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keselamatan perjalanan angkutan umum perkotaan berbasis jalan di wilayah Jabodetabek. Tingkat keselamatan diukur dengan membandingkan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan bus perkotaan dengan jumlah total perjalanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek.

Capaian IKU Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek pada tahun 2024 adalah 93,724% dengan nilai realisasi IKU senilai 93,724 dari target 100.

Gambar III. 7 Capaian Kinerja IKP3 Tahun 2024



Tabel III. 17 Komponen Realisasi IKP3

Komponen	
IKP 3	
Jumlah Kecelakaan	5
Jumlah Perjalanan	796.676

Sumber: Direktorat Angkutan, 2024

Keselamatan transportasi merupakan sesuatu yang mutlak dalam transportasi agar setiap orang terhindar dari risiko kecelakaan. Pada dasarnya program keselamatan transportasi jalan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana di dalamnya memuat acuan penting dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan, penyelenggaraan program keselamatan transportasi jalan dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Masyarakat.

Data kecelakaan bus perkotaan diperoleh atas hasil koordinasi dengan perusahaan otobus sebagai operator bus perkotaan pada layanan Transjabodetabek, Jabodetabek Residence Connexion (JRC), Jabodetabek Airport Connexion (JAC), dan layanan subsidi. Tiga layanan tersebut dipilih karena perizinan layanan dikeluarkan oleh BPTJ. Sampai saat ini keselamatan baru dihitung menggunakan tiga layanan tersebut karena belum ditetapkan rumusan baru.

Data kecelakaan angkutan bus perkotaan pada tahun 2024 disajikan pada Lampiran XII dengan rangkuman ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III. 18 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024

Jenis Layanan	Jumlah Trip	Laporan Kejadian Kecelakaan
Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	145.388	5
Transjabodetabek	25.660	0
Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	12.208	0
Angkutan Buy the Service (BTS)	398.338	0

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ, 2024

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek dihitung menggunakan rumus:

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{\sum \text{Kecelakaan AU}}{\sum \text{Perjalanan AU}} \right) \times 10.000$$

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{5}{796.676} \right) \times 10.000 = 93,724$$

Hasil penghitungan menunjukkan tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek adalah 93,724. Nilai ini mencapai 93,724% dari target yang ditentukan untuk tahun 2024 yaitu 100.

Upaya yang telah dilakukan oleh BPTJ untuk menunjang Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek adalah:

- Dukungan layanan angkutan Nataru berupa inspeksi keselamatan angkutan pariwisata di rest area KM 45 jalan tol Jagorawi dan di area parkir destinasi wisata Puncak Bogor
- Sosialisasi *safety riding* di wilayah Jabodetabek kepada pengendara kendaraan roda dua
- Koordinasi teknis pendanaan pengawasan pelayanan dan keselamatan angkutan umum
- Pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana angkutan di wilayah Jabodetabek
- Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan nasional wilayah Jabodetabek
- Operasional lampu penerangan jalan Umum (LPJU) di jalan nasional untuk memastikan alat penerangan jalan tetap berfungsi dengan baik
- Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
- Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wilayah Jabodetabek
- Pengawasan dan monitoring penyelenggaraan angkutan wilayah Jabodetabek

- Pengawasan, inspeksi dan audit implementasi sistem manajemen keselamatan (SMK) operator angkutan umum untuk memastikan perusahaan memenuhi standar SMK
- Pengecekan pemenuhan persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) angkutan umum di wilayah Jabodetabek
- Penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Permasalahan utama IKP tingkat keselamatan perjalanan angkutan umum perkotaan Jabodetabek yang tidak mencapai target adalah adanya lima laporan kejadian kecelakaan angkutan umum JRC. Meski demikian, tidak ada catatan fatalitas dari lima kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan merupakan peristiwa yang dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal di luar kendali pemerintah sekalipun.

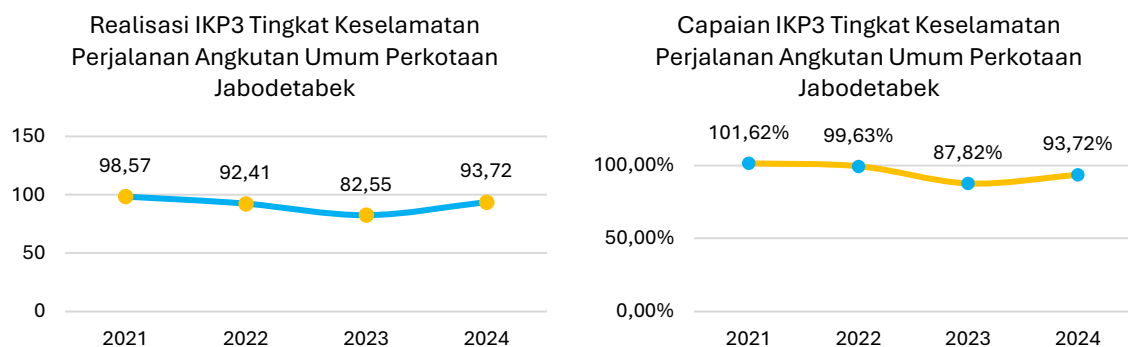
Untuk meningkatkan keselamatan transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya, beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh BPTJ adalah:

1. Pengawasan penyelenggaraan angkutan wilayah Jabodetabek;
2. Pengecekan penerapan pelayanan dan standar pelayanan minimal angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
3. Penghargaan pramudi dan masinis teladan serta operator angkutan umum terbaik di wilayah Jabodetabek;
4. Pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana angkutan di wilayah Jabodetabek.



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP3 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 tidak dibandingkan dalam gambar tersebut karena perbedaan IKP. Pada tahun 2020, sasaran Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diukur menggunakan IKP Rasio

Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Adapun realisasi IKP3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip pada tahun 2020 yaitu 0,960 dari target 0,02.

Tabel III. 19 Realisasi Kinerja IKP3 Sebelum Perubahan IKU

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (max 110)
SP3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3.Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	Rasio	0,02	0,96	-%

Sasaran Program 4:

Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Mencapai restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan bentuk dukungan BPTJ pada sasaran strategis Kemenhub untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

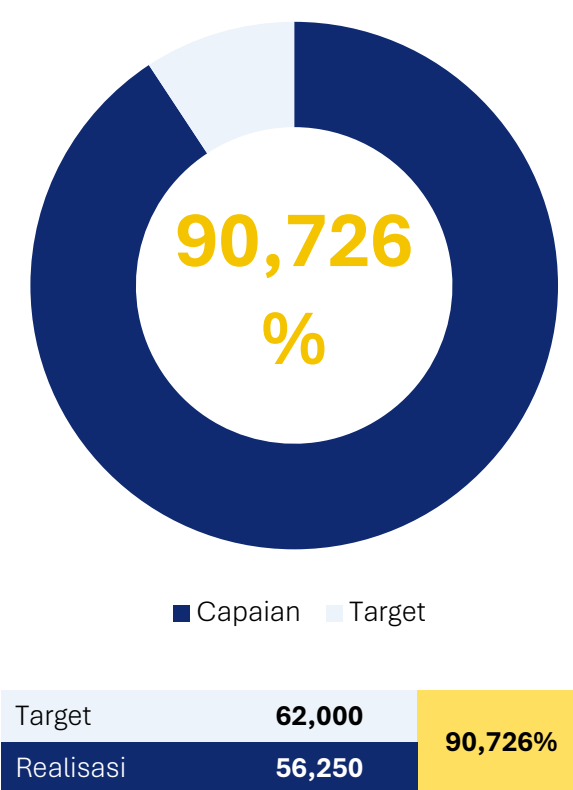
Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program ini, BPTJ merumuskan satu IKU yaitu Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ.

Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan berdasarkan *Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025*. *Grand Design* menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ pada tahun 2024 adalah 90,726 % dengan nilai realisasi IKU senilai 56,250 dari target 62.

Gambar III. 9 Capaian Kinerja IKP5 Tahun 2024



Untuk mengevaluasi nilai RB Tematik, dilakukan penilaian atas empat unsur indikator sebagaimana tertera pada kertas kerja evaluasi RB yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
2. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
3. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);

4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi

Tabel III. 20 Komponen Realisasi IKP5

Komponen	Nilai
IKP 5	56,250
Ketepatan pelaksanaan	6,000
Ketercapaian output	12,500
Kualitas pelaksanaan	6,250
Kesesuaian waktu	12,500

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Tingkat reformasi birokrasi sebuah unit pemerintah diukur dengan nilai reformasi birokrasi yang didapatkan dari hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.

Berdasarkan keterangan di atas, didapati bahwa terdapat dua dimensi RB yaitu RB

General dan RB Tematik. RB General merupakan potret dari lingkup Kementerian sehingga RB yang bisa dinilai dari BPTJ adalah RB Tematik yang mengukur capaian indikator dari tema terkait. Adapun indikator yang diangkat pada RB Tematik BPTJ adalah “Waktu penyelesaian proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek.”

Detail hasil evaluasi reformasi birokrasi BPTJ yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 21 Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ

Penilaian	Bobot	Nilai
Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;	25	6,000
Ketercapaian <i>output</i> kegiatan pada setiap triwulan;	25	12,500
Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);	25	6,250
Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25	12,500
Total		56,250

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, realisasi nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ Tahun 2024 adalah 56,250 atau tercapai sebesar 90,726% dari target 62

Dalam pelaksanaan rencana aksi untuk penyederhanaan proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek, telah

dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses perizinan melalui penggunaan aplikasi perizinan online. Upaya penyederhanaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup verifikasi perizinan online agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

Aplikasi perizinan online menjadi sarana utama untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan angkutan sewa khusus. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelamar perizinan dapat mengajukan permohonan secara daring, meminimalkan proses manual, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Selain itu, penekanan pada verifikasi perizinan online yang sesuai dengan SOP pelayanan Angkutan Sewa Khusus bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perizinan yang diberikan telah melalui proses yang memenuhi standar kualitas dan keamanan.

RB Tematik BPTJ sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020—2024, mengangkat isu perizinan Angkutan Sewa Khusus dengan indikator jumlah Kartu Pengawasan Elektronik yang telah dicetak. Hal ini sulit tercapai dikarenakan Kartu Pengawasan Elektronik bagi Angkutan Sewa Khusus bersifat fluktuatif dan tidak bisa mengikuti nilai tren sebelumnya. Jumlah Kartu Pengawasan Elektronik pada tahun 2021 sejumlah 3.942, Tahun 2022 sejumlah 6.259, dan Tahun 2023 sejumlah 4.478.

Pada tahun 2023 telah diterbitkan Kartu Pengawasan Elektronik sejumlah 4.478 kartu.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek. Pertama, realisasi output masih belum mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan. Keterbatasan output tersebut disebabkan jumlah pengajuan perizinan tidak sebanyak jumlah yang diperkirakan sebelumnya.

Kedua, kendala lainnya terletak pada kurangnya data dukung berupa dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat sangat penting untuk menunjang reformasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengumpulan dan penyimpanan data yang terstruktur agar proses perizinan dapat lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga, evaluasi secara berkala terhadap proses perizinan angkutan sewa khusus belum dilakukan secara optimal. Evaluasi rutin menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem perizinan yang berlaku serta implementasinya. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, potensi masalah dapat diidentifikasi sehingga dapat memperbaiki kelemahan yang ada.

Keempat, penerbitan perizinan angkutan sewa khusus melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan pada pembayaran melalui aplikasi SIMPONI. Ketentuan pembayaran tersebut dilakukan maksimal 7 hari. Untuk mengimbangi jangka waktu tersebut, BPTJ telah menetapkan SOP baru di mana proses verifikasi di BPTJ di tidak sampai ke level Kepala Badan sehingga dapat dilakukan percepatan birokrasi. Verifikasi tersebut dilakukan langsung oleh pejabat eselon 3.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang akan diambil oleh BPTJ adalah:

1.

Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
2.

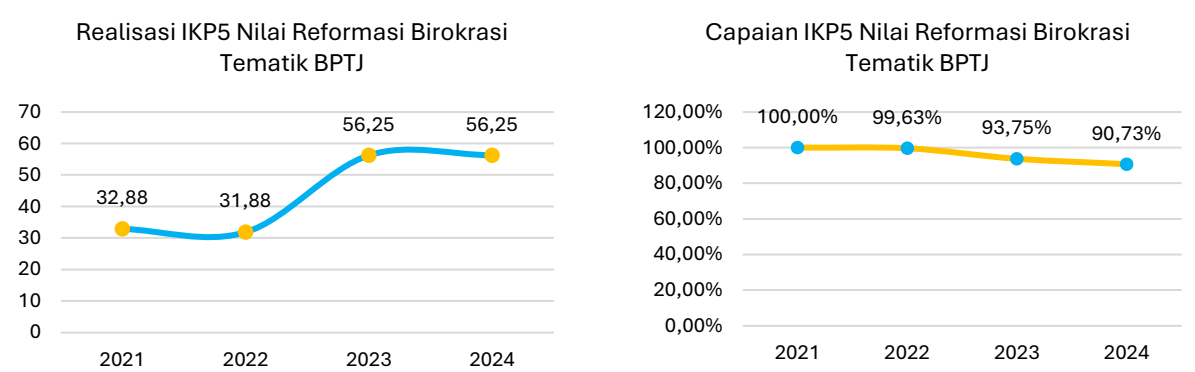
Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
3.

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi
4.

Mengubah indikator pelaksanaan RB Tematik menjadi laporan yang berisi monitoring verifikasi dokumen perizinan, jumlah penerbitan Sertifikat Standar Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik Angkutan Sewa Khusus

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKP5 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya



Perbandingan antara realisasi kinerja IKP5 tahun 2024 dengan tahun sebelumnya menunjukkan performa realisasi IKP 5 ...

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 tidak dibandingkan dalam gambar tersebut karena perbedaan IKP. Pada tahun 2020, sasaran Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi

Jabodetabek diukur menggunakan IKP Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.

Adapun realisasi IKP5. Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2020 yaitu 78,040 dari target 85 dengan nilai capaian 91,812%.

Tabel III. 22 Realisasi Kinerja IKP1 Sebelum Perubahan IKU

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (max 110)
SP5. Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5. Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	85	78,040	91,812%

III.3.ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam mencapai output dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Tingginya nilai efisiensi menunjukkan kemampuan unit kerja dalam menghemat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai output. Sebaliknya, rendahnya nilai efisiensi menunjukkan bahwa unit kerja tidak mampu mencapai hasil yang diinginkan dari sumber daya yang telah dipakai.

Penghitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n [(AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i]}{\sum_{i=1}^n AA Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP : Efisiensi Output Program
 AA Program : Alokasi Anggaran
 RA Program : Realisasi Anggaran
 COP : Capaian Output Program
 n : Jumlah Output Program

Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan data perbandingan antara alokasi anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran tahun 2024. Pada tahun 2024, BPTJ tidak mencatatkan adanya efisiensi anggaran dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.23 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	111,85%	37.026.688.000	36.996.304.320	41.414.350.528	4.418.046.208	11,93%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	99,98%	117.884.051.000	117.577.283.859	117.860.474.190	283.190.331	0,24%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	100,32%	8.899.375.000	8.898.359.940	8.927.853.000	29.493.060	0,33%
IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	93,72%	45.867.450.000	45.842.905.741	42.986.974.140	-2.855.931.601	-6,23%
IKP5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	90,73%	108.085.811.000	107.954.451.596	98.066.256.320	-9.888.195.276	-9,15%
Total		330.174.011.000	317.269.305.456	308.012.900.283	-9.256.405.173	-2,43%

III.4.CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA

1. Program Buy The Service (BTS) Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi

Layanan Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema pembelian layanan Buy The Service (BTS) dilaksanakan di Kota Bogor, Bekasi, dan Depok. Pada skema BTS, pemerintah pusat (BPTJ) melakukan pemberian subsidi melalui pembelian layanan kepada operator sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan angkutan umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Layanan BRT ini diberi nama BISKITA, yang merupakan akronim dari “Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal.”

Pada tahun 2024, layanan BISKITA telah dilaksanakan di Kota Bogor, Bekasi, dan Depok. Pilot Project Penyediaan Layanan BTS di Kota Bogor yang diberi nama BISKITA Trans Pakuan mulai beroperasi pada tanggal 2 November 2021 dengan menggandeng operator PT. Kodjari Tata Angkutan. Layanan BISKITA Trans Pakuan telah resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp4.000 dengan menerapkan tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan disabilitas pada tanggal 18 September 2023 sebesar Rp2.000. BISKITA Trans Pakuan melayani 4 koridor pelayanan dengan jumlah kendaraan sebanyak 49 unit.

Sementara itu, layanan BTS di Kota Bekasi yang diberi nama BISKITA Trans Bekasi Patriot mulai beroperasi per tanggal 3 Maret 2024 dengan 1 koridor pelayanan. BISKITA Trans Bekasi Patriot ini diketahui telah terintegrasi dengan moda LRT Jabodebek dan melintasi Revo Mall Bekasi agar masyarakat dapat mudah melakukan

perpindahan antarmoda. BISKITA Trans Bekasi Patriot beroperasi sebanyak 15 unit bus yang melayani penumpang mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Layanan BISKITA di Kota Depok yang dikenal dengan nama BISKITA Trans Depok diresmikan pada tanggal 14 Juli 2024 yang merupakan moda transportasi terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan Commuterline. Layanan ini diluncurkan untuk menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan angka pemakaian transportasi umum. Koridor pelayanan yaitu Terminal Depok – Stasiun LRT Harjamukti dengan jumlah armada 15 unit bus

Gambar III. 11 Program Subsidi Bus Buy The Service (BTS)





2. Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan: JRC, JAC, Transjabodetabek

Layanan bus Jabodetabek Residence Connexion (JRC) merupakan angkutan umum massal point to point sebagai alternatif layanan moda untuk memfasilitasi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman langsung menuju pusat kota/ pusat kegiatan bisnis (CBD) di Jakarta dan sebaliknya. Kondisi saat ini untuk angkutan umum JRC adalah terdiri dari 8 operator, 213 unit bus, dan 65 rute. Layanan bus Jabodetabek Airport Connexion (JAC) merupakan angkutan umum massal point to point sebagai alternatif layanan moda untuk memfasilitasi masyarakat yang melayani

aktivitas dari titik perumahan atau permukiman masyarakat menuju Bandara Soekarno – Hatta dan sebaliknya. Kondisi eksisting pada layanan JAC adalah terdiri dari 6 operator, 472 unit kendaraan dengan 56 trayek. Layanan Transjabodetabek adalah layanan angkutan umum yang merupakan pengembangan dari Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway Transjakarta (APTJ) dan mulai beroperasi 7 September 2017. Angkutan umum ini melayani kebutuhan transportasi ulang alik masyarakat daerah penyangga ibukota seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi menuju wilayah DKI Jakarta dan sebaliknya. Layanan ini dikelola oleh 14 operator dengan 95 trayek yang dijalankan dengan 1.023 unit bus

3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

BPTJ yang merupakan badan publik, dalam era keterbukaan informasi saat ini, dituntut untuk dapat berbenah diri melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya "Obligation to tell" bagi pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Public right to know).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan

Kementerian Perhubungan dimana BPTJ sebagai PPID Pelaksana. BPTJ sejak tahun 2019, secara rutin melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, serta mengelola permohonan informasi masyarakat yang masuk melalui website PPID Kemenhub. Setiap tahunnya selalu dilaksanakan evaluasi baik mengenai sumber daya, teknis pelaksanaan maupun tindak lanjut permohonan informasi publik yang diterima.

Di Tahun 2024, Komisi Informasi Pusat telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Kemenhub. Dalam penilaian tersebut, BPTJ berhasil mendapatkan penghargaan sebagai PPID Pelaksana kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat dengan meraih total nilai sebesar 90,2. Pada penghargaan tersebut BPTJ mendapatkan plakat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat pada 11 Desember 2024. Hal ini menandakan bahwa BPTJ terus berbenah diri dalam memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja di lingkungan Kemenhub yang telah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh jajaran Kemenhub dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.



4. Hari Anti Korupsi Sedunia

Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia (HAKORDIA), pada tanggal 5 Desember 2024 Inspektorat Jenderal memberikan apresiasi terhadap pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai kategori pejuang integritas. Adapun BPTJ diwakilkan pegawai dari terminal tipe A Poris Plawad, mendapatkan apresiasi kategori pejuang integritas.



5. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum

Kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang biasa disebut Ramp Check, berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan Ramp Check dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjamin keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan.

Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan terhadap:

1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
3. Angkutan barang.

Kegiatan Ramp Check dapat dilaksanakan di terminal penumpang, terminal barang, tempat penyimpanan kendaraan (pool), dan tempat wisata. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh minimal dua petugas, yaitu Penguji Kendaraan Bermotor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam pelaksanaannya, terdapat dua unsur pemeriksaan, yaitu:

1. Unsur administrasi;
2. Unsur teknis, yang mencakup unsur teknis utama dan unsur teknis penunjang.

Objek inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Jika tidak memenuhi persyaratan administrasi, dikenakan sanksi tilang;
2. Jika tidak memenuhi persyaratan teknis utama, dikenakan sanksi tidak diberangkatkan hingga persyaratan tersebut terpenuhi;
3. Jika tidak memenuhi persyaratan teknis penunjang sebanyak dua kali berturut-turut dengan kesalahan yang sama, dikenakan sanksi tidak diberangkatkan hingga persyaratan teknis penunjang terpenuhi.

Terdapat empat terminal utama di bawah pengelolaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berfungsi, antara lain, sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dari berbagai moda transportasi, seperti bus antar-kota antar-provinsi (AKAP), angkutan kota, atau kendaraan umum lainnya. Selain itu, terminal-terminal ini juga menjamin standar keselamatan kendaraan dan penumpang, termasuk pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi. Berikut rincian lokasi terminal tersebut:

1. Terminal Baranangsiang (Bogor);
2. Terminal Jatijajar (Depok);
3. Terminal Pondok Cabe (Tangerang Selatan);
4. Terminal Poris Plawad (Tangerang).

Untuk menjamin keselamatan angkutan jalan, kegiatan Ramp Check dilakukan secara berkala terhadap angkutan jalan, baik saat kendaraan tiba maupun sebelum kendaraan diberangkatkan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan mengikuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang

berlaku yang mencakup aspek administratif dan teknis.

Aspek administratif meliputi kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Pengawasan (KP), buku uji kendaraan, dan izin trayek. Sementara itu, aspek teknis mencakup pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan, seperti:

- Sistem pengereman, pencahayaan, dan kemudi.
- Kelaikan ban, kaca, dan wiper.
- Ketersediaan alat keselamatan, seperti pemadam api ringan (APAR) dan palu pemecah kaca.

Selain itu, petugas juga memverifikasi kepatuhan terhadap kapasitas angkut kendaraan guna menghindari kelebihan muatan, serta memastikan pengemudi dalam kondisi prima melalui pemeriksaan kesehatan sederhana, termasuk tes kadar alkohol dan pengaruh narkoba jika diperlukan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

Hasil dari kegiatan Ramp Check ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan atau pengemudi yang tidak layak. Terminal, sebagai salah satu lokasi utama pelaksanaan Ramp Check, berfungsi sebagai titik pengawasan terintegrasi untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan transportasi publik.

6. Pembangunan Halte Layanan Buy the Service

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum (bus) untuk menaik dan menurunkan penumpang. Halte merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Pasal 45 UU 22/2009 LLAJ dan Pasal 113 PP 79/2013 tentang Jaringan LLAJ. Fungsi dari halte tidak hanya menaik dan menurunkan penumpang melainkan agar bus tidak menaik dan menurunkan penumpang sembarangan. Dampak yang terjadi apabila bus menaik dan menurunkan penumpang sembarangan, yaitu: menimbulkan kemacetan di jalan raya, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang dengan pengemudi kendaraan bermotor lainnya, dan lalu lintas menjadi tidak tertib. Pada tahun 2024 Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat, Direktorat Prasarana BPTJ melakukan pembangunan Halte BTS, sebagai berikut

Gambar III. 12 Halte Biskita





7. Penyelenggaraan Sosialisasi *Safety Riding*

Safety Riding atau keselamatan berkendara merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat bahaya sehingga keselamatan dalam berkendara dapat meningkat, menciptakan kondisi yang tidak akan membahayakan pengendara lain, dan memahami akan pencegahan kecelakaan serta penanggulangannya. Perilaku *safety riding* diharapkan dilakukan oleh pengendara terutama kendaraan roda dua. Hal ini sangat diperlukan mengingat sepeda motor merupakan kendaraan mayoritas yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah sepeda motor, terjadi pula peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor.

Tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, mendorong beberapa pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan cara pengenalan perilaku berkeselamatan salah satunya yaitu dengan kegiatan kampanye tentang pentingnya *safety riding*. Kegiatan

sosialisasi *safety riding* ini adalah salah satu cara untuk mengawal penekanan angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara bermotor roda dua, kegiatan ini juga berguna dalam melakukan manajemen keselamatan transportasi di perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek dengan sasaran adalah perilaku pengendara dan kelengkapan atribut.

Gambar III. 13 Sosialisasi *Safety Riding*



Output yang diharapkan dengan dilaksanakannya *safety riding* diharapkan dapat menerapkan perilaku berkendara

yang berkeselamatan khususnya bagi pengendara di wilayah Jabodetabek. Lokasi kegiatan sosialisasi safety riding dilaksanakan di PTDI STTD, Kabupaten Bekasi dan Pelataran Masjid Ash-Shomad, Citra Raya, Tangerang. Kegiatan ini dimulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober dengan jumlah peserta 150 di masing-masing lokasi dengan total peserta 1.500 orang.

Gambar III. 14 Praktik Safety Riding



8. Fasilitas Teknis Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Wujud dari pemenuhan fasilitas sistem keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan di Jabodetabek yaitu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan nasional. Penyelenggaraan perlengkapan jalan memiliki beberapa fungsi utama diantaranya untuk menunjang kelancaran dan keamanan berlalu lintas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas/ketertiban dan kelancaran serta menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlengkapan jalan di jalan nasional di wilayah Jabodetabek.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Fasilitas Teknis Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan Kabupaten di Wilayah Jabodetabek, alat perlengkapan jalan yang dimaksud paling sedikit berupa: (1) rambu lalu lintas; (2) marka jalan; (3) alat pemberi isyarat lalu lintas; (4) alat penerangan jalan; (5) alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan (6) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pengadaan dan perlengkapan jalan nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas mengacu pada Laporan Akhir Kajian

Review Dokumen Kebutuhan Fasilitas
Perlengkapan Jalan Nasional di Wilayah
Jabodetabek yang mengakomodir
kebutuhan tahun 2022—2029.



Gambar III. 15 Fasilitas Teknis Fasilitas
Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Perkotaan

Pada tahun 2024, fasilitas teknis fasilitas
sistem keselamatan dan keamanan
transportasi dilaksanakan di dua provinsi
yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi
Banten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Raya Pacing (Bekasi)
- b. Ruas Jalan Raya Imam Bonjol
- c. Ruas Jalan Raya Urip Sumoharjo
(Cikarang)
- d. Ruas Jalan Cigelung (Bts. Prov. Banten)
- Bts. Jasinga (Nomor Ruas 021)
- e. Ruas Jalan Bts. Jasinga - Bts. Leuwiliang
(Nomor Ruas 022)

- f. Ruas Jalan Gandaria (Bts. DKI Jakarta) - Kedunghalang (Bts. Bogor) (No Ruas. 072, 073)
- g. Ruas Jalan Bts Kab. Serang/Tangerang - Bts Kota Tangerang (Nomor Ruas 003)
- h. Ruas Jalan Raya Serang (Nomor Ruas 003)
- i. Ruas Jalan Daan Mogot (Tangerang - Bts DKI) (Nomor Ruas 004)
- j. Ruas Jalan Bts DKI/Banten - Gandaria/Bts Depok/Tangerang (Ciputat-Bogor) (Nomor Ruas 018)

9. Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya merupakan sarana BPTJ dalam melakukan pembinaan serta memotivasi kinerja pelayanan transportasi publik, khususnya para pramudi dan masinis untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas dan perannya serta prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang transportasi publik.





Gambar III. 16 Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek

Jumlah keseluruhan peserta Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2024 sebanyak 55 orang yang berasal dari 20 Perusahaan Operator baik Moda Jalan maupun Moda Perkeretaapian. Penghargaan diterima oleh Pramudi dan Masinis yang telah ditetapkan sebagai Juara I, II, III dan Juara Harapan dari masing-masing kategori. Penilaian dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tes tulis, tes wawancara, dan praktik lapangan.

10. Pembangunan Jalur Sepeda di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki tugas mengembangkan mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Salah satu tugas dari BPTJ diantaranya yaitu pengembangan

transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Pada Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, salah satu strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan adalah Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor (Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda) dengan program Pembangunan Jalur Sepeda. Melalui kegiatan Pembangunan Jalur Sepeda ini, diharapkan dapat menekan polusi dari moda transportasi pribadi dan merubah budaya masyarakat untuk dapat beralih menggunakan sepeda sebagai first mile ataupun last mile.



Gambar III. 17 Jalur Sepeda

Pembangunan jalur sepeda dilakukan di beberapa lokasi yaitu:

- a. Kota Tangerang:
 - Jl. Benteng Betawi
 - Jl. Sudirman
 - Jl. Daan Mogot
 - Jl. Merdeka
 - Jl. Otista
 - Jl. KS Tubun
- b. Kabupaten Bogor:
 - Jl. Kandangroda—Bundaran Pancakarsa
- c. Kota bogor (revitalisasi):
 - Jl. Pajajaran

11. Pengoperasian ATCS dan Traffic Counting

Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap simpang. Pengembangan ATCS diharapkan dapat bekerja menentukan

lama penyalan masing - masing lampu APILL secara otomatis berdasar distribusi kepadatan kendaraan.

Fungsi ATCS sebagai sendiri sebagai berikut:

- 1) Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi;
- 2) dalam keadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Mobil Damkar, Ambulance, Transportasi umum)
- 3) Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan;
- 4) Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya.

Sedangkan manfaat yang diterima dari adanya ATCS tersebut adalah:

1. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan
2. Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan aman, selamat, dan berwawasan lingkungan
3. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.

ATCS tersebut dikelola melalui CC Room yang berlokasi di Lantai 15 Gedung Karya Kementerian Perhubungan yang berfungsi untuk memantau dan mengatur lalu lintas di persimpangan. CC Room juga terintegrasi dengan ATCS milik pemerintah daerah yang tersebar di 18 titik persimpangan.

Salah satu kelengkapan dari ATCS yaitu Alat Counting yang dapat berfungsi untuk

menghitung arus lalu lintas pergerakan kendaraan pada ruas jalan yang dipantau. Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh alat dan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: (1) sepeda motor, (2) kendaraan kecil (minibus), dan (3) kendaraan besar (bus/truk). Pembangunan alat counting sebanyak 7 ruas di tahun 2024. Data arus lalu lintas dari Alat Counting membantu dalam proses perencanaan dan pengendalian penanganan kemacetan di wilayah Jabodetabek.





12. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg

Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg merupakan kegiatan yang tertera pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Pembangunan stasiun ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan moda transportasi umum dan terjangkau layanan angkutan umum dengan meningkatkan cakupan area layanan. Selain itu, pembangunan stasiun ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengamanan aset serta mengurangi penumpukan penumpang yang terjadi di Stasiun Cibinong dan Stasiun Nambo.

Di samping itu, pembangunan Stasiun Pondok Rajeg diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi di wilayah Pondok Rajeg dan Gunung Putri. Salah satu aspek penting lainnya adalah meningkatkan headway operasi kereta api untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan bagi para pengguna transportasi. Dengan demikian, pembangunan Stasiun Pondok Rajeg diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap sistem transportasi umum di wilayah tersebut. Saat ini pembangunan stasiun telah selesai. Proses pekerjaan yang sedang berlangsung adalah proses pengujian prasarana perkeretaapian





Gambar III. 18 Pembangunan Stasiun Pondok Rajeg

III.5. REALISASI ANGGARAN

III.5.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

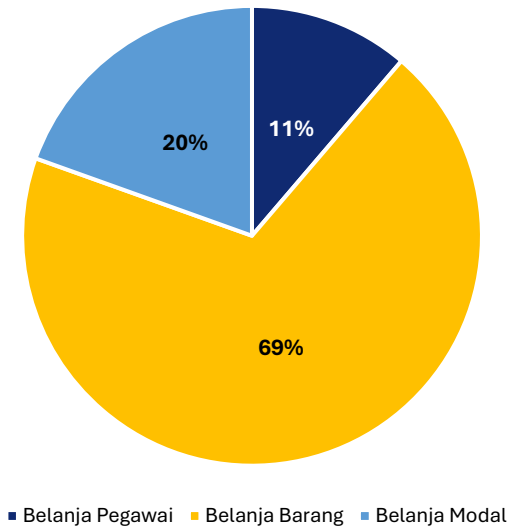
Alokasi anggaran BPTJ pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.330.174.011.000 (tiga ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu rupiah). Namun dari alokasi anggaran tersebut, berdasar blokir sebesar Rp.12.410.636.000 atau 3,76% dari total alokasi anggaran. Blokir tersebut adalah anggaran yang tidak dapat dicairkan karena kebijakan *refocusing* anggaran pemerintah pusat. Adapun pembagian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel III.24 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	%
Belanja Pegawai	37.157.078.000	11%
Belanja Barang	228.563.153.000	69%
Belanja Modal	64.453.780.000	20%

Sumber: OMSPAN

Gambar III. 19 Proporsi Alokasi Anggaran BPTJ Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja



Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan delapan nomenklatur kegiatan untuk mendukung sasaran program BPTJ.

Tabel III.25 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	9.592.723.000
2	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	133.224.069.000
3	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	37.656.388.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	55.404.411.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	4.614.762.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Jabodetabek	83.405.645.000
7	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	3.557.962.000
8	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	2.718.051.000

Sumber: DIPA Tahun 2024

III.5.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

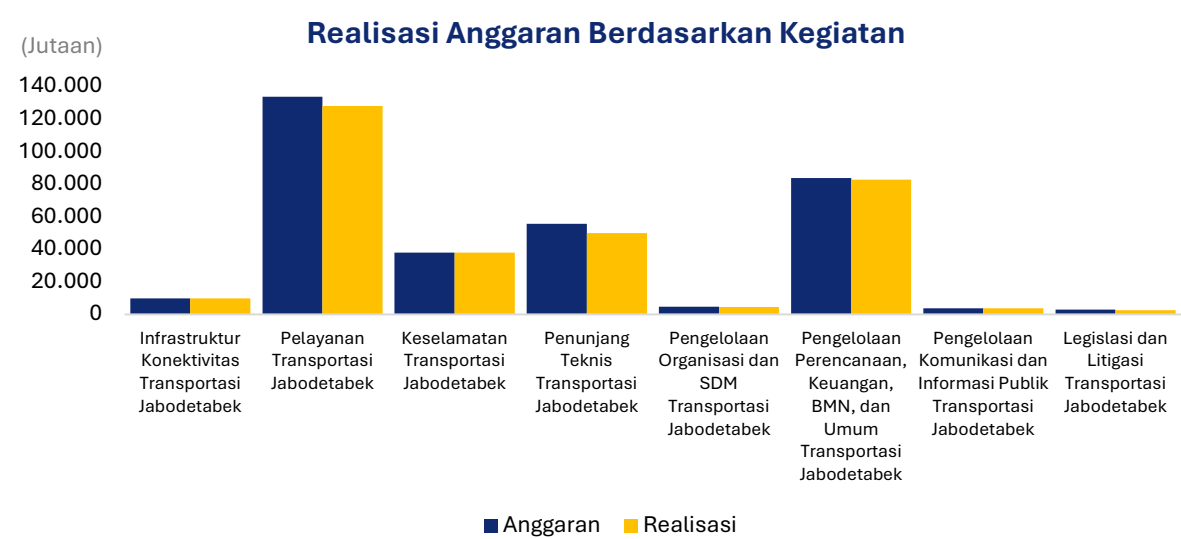
Anggaran BPTJ sepanjang tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.317.242.487.871 atau sebesar 96,08% terhadap pagu total. Adapun realisasi belanja per jenis belanja dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III.26 Realisasi anggaran per jenis belanja BPTJ tahun 2024

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Pegawai	37.157.078.000	37.150.877.808	99,983%
Belanja Barang	228.563.153.000	222.481.822.129	97,339%
Belanja Modal	64.453.780.000	57.609.787.934	89,382%

Sumber: OMSPAN

Gambar III. 20 Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2024



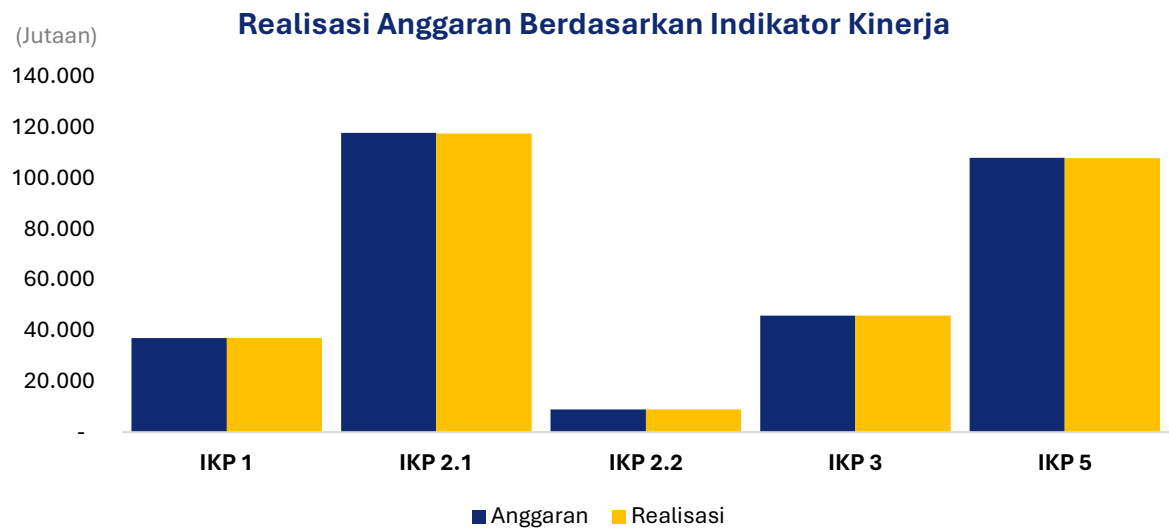
Tabel III.27 Realisasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	9.592.723.000	9.592.610.203	99,999%
2	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	133.224.069.000	127.515.505.983	95,715%
3	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	37.656.388.000	37.628.560.873	99,926%
4	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	55.404.411.000	49.754.245.369	89,802%
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	4.614.762.000	4.406.346.644	95,484%
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Jabodetabek	83.405.645.000	82.351.407.136	98,736%
7	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	3.557.962.000	3.507.424.982	98,580%
8	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	2.718.051.000	2.486.386.681	91,477%

Sumber: OMSPAN

Pelaksanaan anggaran tersebut digunakan untuk menunjang Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama BPTJ yang telah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Anggaran dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan pendukung sasaran terkait sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai pada akhir tahun. Analisis alokasi anggaran dan realisasi anggaran per Indikator Kinerja Program (IKP) diuraikan sebagai berikut:

Gambar III. 21 Realisasi Anggaran BPTJ per Indikator Kinerja Program



Tabel III.28 Realisasi anggaran per IKP BPTJ tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	%
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	37.026.688.000	36.996.304.320	99,918%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	117.884.051.000	117.577.283.859	99,740%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	8.899.375.000	8.898.359.940	99,989%
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	45.867.450.000	45.842.905.741	99,946%
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	108.085.811.000	107.954.451.596	99,878%

Bab IV

Penutup



#JLHISTA5
www.busluthansa.co.id
PARIWISATA

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTJ Tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian Sasaran Program Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung melalui Indikator Kinerja Program (IKP) di mana dua IKP telah mencapai target dan terdapat tiga IKP yang telah tercapai mendekati target tahunan. Target IKP yang belum tercapai tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek, Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek, dan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
2. Adapun rincian capaian masing-masing Sasaran Program pada Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Sasaran Program 1 “Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek”
IKP1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek terealisasi sebesar 0,507 (target 0,45);
 - b. Sasaran Program 2 “Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek”
 - IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 93,978 (target 94);
 - IKP2.2. On Time Performance (OTP)

Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 91,447 (target 88);

- c. Sasaran Program 3 “Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek”
IKP3. Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 93,724 (target 100);
 - d. Sasaran Program 4 “Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek”
IKP5. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 56,250 (target 62)
3. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.317.242.487.871 atau sebesar 96,08% terhadap pagu anggaran Rp.330.174.011.000.

B. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024, beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sasaran konektivitas transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:
 - a. Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - b. Berkoordinasi secara berkala dengan

- pemerintah daerah/pusat terkait rencana pembangunan halte BTS;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek
- 2. Meningkatkan kinerja sasaran pelayanan transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan
 - b. Memperkuat koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk dukungan terhadap pemenuhan ketepatan waktu angkutan umum perkotaan
 - c. Melakukan analisis lanjutan untuk memperoleh prioritas lokasi atau Jalur Perlintasan Langsung (JPL) dalam penanganan perlintasan sebidang
- 3. Meningkatkan kinerja sasaran keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:
 - a. Pengawasan penyelenggaraan angkutan wilayah Jabodetabek;
 - b. Pengecekan, penerapan pelayanan dan standar pelayanan minimal angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penghargaan pramudi dan masinis teladan serta operator angkutan umum terbaik di wilayah Jabodetabek;
 - d. Pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana angkutan di wilayah Jabodetabek.
- 4. Meningkatkan kinerja sasaran tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di badan pengelola transportasi Jabodetabek melalui:
 - a. Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
 - b. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi
 - d. Mengubah indikator pelaksanaan RB Tematik menjadi laporan yang berisi monitoring verifikasi dokumen perizinan, jumlah penerbitan Sertifikat Standar Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik Angkutan Sewa Khusus

Lampiran I
Rencana Kerja Tahun
Tahun 2024

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94,5
		IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88
SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	%	100
SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Jakarta, Desember 2023

Plt Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek


SUHARTO

Lampiran II
Perjanjian Kinerja Awal
Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharto

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Menteri Perhubungan

Plt. Kepala Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek

BUDI KARYA SUMADI

SUHARTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
		IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88
SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	%	100
SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Kegiatan	Anggaran	
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	9.597.150.000
2. Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	140.345.860.000
3. Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	29.750.494.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	57.409.245.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	4.169.039.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	82.666.195.000
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.184.623.000
8. Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.051.405.000

Disetujui,

Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI



Jakarta, 19 Januari 2024

Plt.Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek

SUHARTO



Lampiran III
Revisi I Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Revisi I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kepala Revisi I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan dasar pengantian Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Revisi ke-5 DIPA TA 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Revisi I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2024. Dokumen ini memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja dan anggaran. Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Jakarta, Mei 2024

PLT. KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



TATAN RUSTANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660323 198903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatan Rustandi

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Menteri Perhubungan

Plt. Kepala Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek

BUDI KARYA SUMADI

TATAN RUSTANDI

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
		IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88
SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100
SP4	Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikasep	Hananto Prakoso <i>Wk</i>	Kabag Perencanaan dan Keuangan		<i>HP</i>
Diperiksa	Hananto Prakoso	Plt. Sekretaris BPTJ		<i>HP</i>
Diperiksa	Zamrides	Direktur Prasarana		<i>26</i>
Diperiksa	Sigit Irfansyah	Direktur Lalu Lintas		<i>27</i>
Diperiksa	Tatan Rustandi	Direktur Angkutan		<i>28</i>

Kegiatan	Anggaran	
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	9.597.150.000
2. Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	136.485.444.000
3. Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	36.097.516.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	54.922.639.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.999.039.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	83.201.195.000
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.069.623.000
8. Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.801.405.000
Total	Rp.	*330.174.011.000

*Terdapat automatic adjustment sebesar Rp. 16.787.523.000 atau 5,08%

Disetujui,

Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Mei 2024

Plt. Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek

TATAN RUSTANDI

Lampiran IV
Revisi II Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Revisi II Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kepala Revisi II Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan dasar pergantian Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Revisi ke-14 DIPA TA 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Revisi II Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2024. Dokumen ini memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja program, beserta target kinerja dan anggaran. Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Jakarta, Desember 2024

PLT. KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



SUHARTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660925 198903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharto

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dudy Purwagandhi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Badan

Menteri Perhubungan

Pengelola Transportasi Jabodetabek

DUDY PURWAGANDHI

SUHARTO

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
		IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88
SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100
SP4	Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Kegiatan	Anggaran	
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rp.	9.592.723.000
2. Pelayanan Transportasi Jabodetabek	Rp.	133.224.069.000
3. Keselamatan Transportasi Jabodetabek	Rp.	37.656.388.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rp.	55.404.411.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Rp.	4.614.762.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Jabodetabek	Rp.	83.405.645.000
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	Rp.	3.557.962.000
8. Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	Rp.	2.718.051.000
Total	Rp.	*330.174.011.000

*Terdapat automatic adjustment sebesar Rp.12.410.636.000 atau 3,76%

Disetujui,

Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2024
Plt.Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek


SUHARTO

Lampiran V
Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Tahun 2024



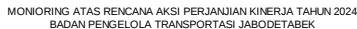
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN JANUARI TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 1		Realisasi Bulan 1		% Capaian Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
																	Volume	%	Volume	Volume	%
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	2.344.000	100,00%	0,50%	Total dari panjang jalan yang telah terlayani trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759,3 Km dari panjang jaringan jalan 17.355,1 Km	Mensosialisasikan potensi pergerakan masyarakat kepada operator dan pengembang perumahan untuk menambah rute layanan JRC	Di. Angkutan
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	80.578.600	100,00%	0,95%	Panjang rel kereta api perkotaan yang terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km	Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Di. Prasarana
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,63	99%	28.605.403.000	55,63	-	100,00%	0,00%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	a. Pembangunan Fasilitas Integrasi dan Penataan Sirkulasi Perpindahan Antarmoda pada Simpul Stasiun Cibinong b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek	Di. Prasarana
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	72,3	86%	2.671.000.000	-	0,00%	0,00%	Skor indikator SPM terminal tipe A yang dapat terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum 148		Di.Prasarana	
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		914.200.000	0,00%	0,96%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Di. Angkutan
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	37,81	487.055.600	94,53%	1,23%	Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2024 dengan nilai tertinggi sebesar 37,93 km/jam pada bulan Februari dan kecepatan rata-rata terendah sebesar 37,63 km/jam pada bulan Maret. Target rata-rata kecepatan kendaraan penumpang di jalan nasional Tahun 2024 sebesar 42 km/jam	Beberapa upaya yang dilaksanakan pada triwulan I untuk dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan rekayasa lalu lintas pada beberapa lokasi yaitu survei pemantauan lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di jalan nasional Jabodetabek, koordinasi penanganan kemacetan, serta monitoring evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas di beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan kemacetan seperti kawasan pusat industri/pabrik dan kawasan pusat perbelanjaan	Di.Lalu Lintas
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000		80.712.500	0,00%	2,12%	Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek adalah sebesar 36,02 km/jam. Perhitungan tersebut didapatkan dari data jam keluar/ masuk tol serta data jarak tempuh kendaraan (golongan II ke atas) diperoleh dari data tapping kendaraan di tol		Di.Angkutan
									IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		18.974.900	0,00%	1,45%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Di.Angkutan
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90	98%	8.563.444.000	95,13	-	105,70%	0,00%	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 103,40% dari target persentase ketepatan waktu sebesar 92% dengan realisasi sebesar 95,13%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata - rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwulan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait	Untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi kereta api perkotaan yang tepat waktu dilakukan beberapa upaya diantaranya : (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; (2) Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; dan (3) Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek	Di.Lalu Lintas
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	67	97%	29.540.525.000	67,3	2.195.370.078	0,00%	7,43%	Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2024 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, Warning Light, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 96,97% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu Overhead sebesar 68,06%		Di.Lalu Lintas
							SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		70.641.000	0,00%	1,52%	Diakukan pemeriksaan terhadap 1.466 unit kendaraan bus dan didapati 839 unit bus tidak layak jalan	1. Sosialisasi dan pengarahan terkait kelengkapan unsur administrasi dan unsur teknis yang wajib ada dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan otobus dan pengemudi kendaraan 2. Pemenuhan target jumlah kendaraan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan memperhatikan dan meminimalisir beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target kendaraan yang di rampcheck oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/ Direktorat Angkutan.	Di.Angkutan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 1			Realisasi Bulan 1		% Capaian Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
								Volume	%									Volume	Volume	Volume	%	%
4	SP4	Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ		81	0	0%	7.971.000.000	75,02	76.542.500	0,00%	0,96%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	-Telah dilakukan revu atas penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) BPTJ Tahun 2023 sesuai Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 318 Tahun 2023 (penyesuaian target, pendetallian metode perhitungan, dan pemetaan penanggungjawab) - Telah dilakukan perbaikan cascading IKK dan MPH sampai level individu dan didukung oleh pengisian pada aplikasi E-Kinerja - Telah disusun SOP laporan monitoring SKP, monitoring atas penyampaian SKP dan laporan bulanan setiap pegawai melalui aplikasi E-Kinerja - Telah dilaksanakan monitoring publikasi aplikasi ESR - Telah dilakukan penyesuaian pada target perjanjian kinerja (tidak lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya) - Telah disusun SOP Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) - Telah dilakukan pembahasan capaian kinerja triwulanan - Inventarisasi data dukung kinerja telah memanfaatkan teknologi - Telah disusun SOP penyampaian laporan kinerja Eselon II kepada pimpinan Unit Kerja Eselon II dan SOP penyampaian hasil revu Laporan Kinerja secara berjenjang	Sekretariat BPTJ
							SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ		3,91	0	0%	1.764.236.000	3,907	-	0,00%	0,00%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemantauan atas aktivitas pengendalian (Rencana Tindak Pengendalian) dengan Inspektorat Jenderal - Peningkatan pemahaman dan penyusunan terkait Manajemen Risiko di Lingkungan BPTJ melalui Sosialisasi Bimtek Manajemen Risiko - Penyusunan Surat Keputusan BPTJ mengenai pembentukan unit pengelola risiko (UPR) pada unit BPTJ, dengan ditetapkannya KP tentang UPR di Lingkungan BPTJ Tahun 2023 (nomor KP-BPTJ 332 Tahun 2023)	Sekretariat BPTJ
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ		77	20	26%	2.408.324.000	76,7	126.857.400	383,50%	5,27%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola ASN BPTJ yaitu melakukan monitoring terkait kriteria yang masih berada dibawah rata-rata yaitu kriteria Pengelolaan Kepegawaian dan RB serta kriteria sosialisasi, selain itu Bagian SDM dan Umum selalu berkoordinasi dengan seluruh unit di bawah kendali BPTJ untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kepegawaian. Dengan menata dan memutakhirkan data kepegawaian, serta selalu siap memberikan asistensi penyusunan dokumen terkait kepegawaian	Sekretariat BPTJ
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ		78	7	9%	37.524.879.000	76,6	1.712.194.164	1094,29%	4,56%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	a. Pemantauan penegakan disiplin pegawai b. Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai c. Peningkatan kepribadian dan pengabdian ASN kepada unit kerja d. Peningkatan aspek kualifikasi, untuk PNS yang melanjutkan Pendidikan dari D3 ke S1 termasuk yang tugas belajar (beasiswa S2) e. Peningkatan aspek kompetensi, tahun 2024 akan didata kompetensi diklat dan kebutuhannya	Sekretariat BPTJ
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ		98,5	92,5	94%	976.741.000	89,1	74.405.100	96,32%	7,62%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 72,75. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BPTJ yaitu melakukan monitoring penyerapan anggaran dalam hal ini nilai realisasi anggaran dan capaian fisik. Sekretariat BPTJ melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan akan melakukan koordinasi yang intens dengan Direktorat teknis terkait percepatan realisasi dimaksud, serta melakukan monitoring pelaksanaan dan data dukung kegiatan kontraktual	Sekretariat BPTJ
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ		97,5	94,5	97%	724.123.000	90,17	94.375.300	95,42%	13,03%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.243 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN	Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan koordinasi yang intens dengan penanggung jawab BMN terkait data dukung usulan PSP BMN dimaksud	Sekretariat BPTJ
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ		77,5	69	89%	49.851.580.000	78,36	5.319.348.905	113,57%	10,67%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ akan dilakukan monitoring terhadap indikator Penilaian kualitas layanan atas manfaat Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran seperti pengadaan laptop, PC, Printer Dsb yang sudah dilaksanakan oleh BPTJ	Sekretariat BPTJ
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ		75	72	96%	109.988.000	77,07	5.515.300	107,04%	5,01%	Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ yaitu melakukan monitoring pelaksanaan arsip di lingkungan BPTJ	Sekretariat BPTJ
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ		78	6,498	8%	3.069.623.000	45,03	6.814.700	692,98%	0,22%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik	melakukan monitoring terkait masing-masing komponen pemberitaan media masa, pengelolaan media, dan komponen publikasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik	Sekretariat BPTJ

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 1			Realisasi Bulan 1		% Capaian Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
												Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
												Volume	%	Volume	Volume	Volume	%	%			
							SK 11	Tenwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	BK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	6,5	8%	2.801.405.000	82,61	184.216.400	1270,92%	6,58%	Terdapat 19 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 23 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diroses	Melakukan koordinasi dan monitoring pengajuan penyusunan peraturan di lingkungan BPTJ - Rancangan peraturan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diusulkan khususnya terhadap data-data teknis terkait substansi peraturan - Koordinasi lebih lanjut dengan Bagian Humas terkait proses upload ke website BPTJ - Berkordinasi secara intens dengan Biro Hukum Kemenhub dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan	Sekretariat BPTJ



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2		Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab													
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja																	
								Volume	%	Volume		Volume																	
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	39.352.228	100,00%	8,46%	Total dari panjang jalan yang telah terlayani trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759,3 Km dari panjang jaringan jalan 17.355,1 Km	Mencosialisasikan potensi pergerakan masyarakat kepada operator dan pengembangan perumahan untuk menambah rute layanan JRC	Dit. Angkutan								
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	174.191.600	100,00%	2,06%	Panjang rel kereta api perkotaan yang terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km	Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dit. Prasarana								
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,63	99%	28.605.403.000	55,63	19.026.500	100,00%	0,07%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	a. Pembangunan Fasilitas Integrasi dan Penataan Sirkulasi Perpindahan Antar moda pada Simpul Stasiun Cibinong b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek	Dit. Prasarana								
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	72,3	86%	2.671.000.000	-	0,00%	0,00%	Skor indikator SPM terminal tipe A yang dapat terpenuhi adalah 116 dari skor maksimal 148		Dit.Prasarana									
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000	5.560.963.953	0,00%	5,83%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Dit.Angkutan									
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	37,81	995.039.378	94,53%	2,52%	Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2024 dengan nilai tertinggi sebesar 37,93 km/jam pada bulan Februari dan kecepatan rata-rata terendah sebesar 37,63 km/jam pada bulan Maret. Target rata-rata kecepatan kendaraan penumpang di jalan nasional Tahun 2024 sebesar 42 km/jam	Beberapa upaya yang dilaksanakan pada triwulan I untuk dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan rekayasa lalu lintas pada beberapa lokasi yaitu survei pemantauan lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di jalan nasional Jabodetabek, koordinasi penanganan kemacetan, serta monitoring evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas di beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan kemacetan seperti kawasan pusat industri/pabrik dan kawasan pusat perbelanjaan	Dit.Lalu Lintas								
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000		249.497.700	0,00%	6,56%	Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek adalah sebesar 36,02 km/jam. Perhitungan tersebut didapatkan dari data jam keluar/ masuk tol serta data jarak tempuh kendaraan (golongan II ke atas) diperoleh dari data tapping kendaraan di tol		Dit.Angkutan								
									IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%			88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		109.198.100	0,00%	8,34%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Dit.Angkutan
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90,16	98%	8.563.444.000	95,13	179.812.879	105,51%	2,10%	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 103,40% dari target persentase ketepatan waktu sebesar 92% dengan realisasi sebesar 95,13%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata-rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwulan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait	Untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi kereta api perkotaan yang tepat waktu dilakukan beberapa upaya diantaranya : (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; (2) Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; dan (3) Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek	Dit.Lalu Lintas								
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terperuhnya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	67,25	97%	29.540.525.000	67,3	6.863.448.942	100,07%	23,23%	Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2024 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, Warning Light, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 96,97% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu Overhead sebesar 68,06%		Dit.Lalu Lintas								
							SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		245.643.110	0,00%	5,29%	Dilakukan pemeriksaan terhadap 1.466 unit kendaraan bus dan didapat 839 unit bus tidak layak jalan	1. Sosialisasi dan pengarahan terkait kelengkapan unsur administrasi dan unsur teknis yang wajib ada dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan otobus dan pengemudi kendaraan 2. Pemenuhan target jumlah kendaraan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan memperhatikan dan meminimalisir beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target kendaraan yang di rampcheck oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/ Direktorat Angkutan	Dit.Angkutan								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2			Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
								Volume	%									Volume	Volume
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ						Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Telah dilakukan revu atas penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) BPTJ Tahun 2023 sesuai Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 318 Tahun 2023 (penyesuaian target, pendetalan metode perhitungan, dan pemetaan penanggungjawab) - Telah dilakukan perbaikan cascading IKK dan MPH sampai level individu dan didukung oleh pengisian pada aplikasi E-Kinerja - Telah disusun SOP laporan monitoring SKP, monitoring atas penyampaian SKP dan laporan bulanan setiap pegawai melalui aplikasi E-Kinerja - Telah dilaksanakan monitoring publikasi aplikasi ESR - Telah dilakukan penyesuaian pada target perjanjian kinerja (tidak lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya) - Telah disusun SOP Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) - Telah dilakukan pembahasan capaian kinerja triwulanan - Inventarisasi data dukung kinerja telah memanfaatkan teknologi - Telah disusun SOP penyampaian laporan kinerja Eselon II kepada pimpinan Unit Kerja Eselon II dan SOP penyampaian hasil revu Laporan Kinerja secara berjenjang	Sekretariat BPTJ	
											81	0	0%	7.971.000.000	75,02	259.427.700	0,00%	3,25%	
							SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ							Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemantauan atas aktivitas pengendalian (Rencana Tindak Pengendalian) dengan Inspektorat Jenderal - Peningkatan pemahaman dan penyusunan terkait Manajemen Risiko di Lingkungan BPTJ melalui Sosialisasi Bimtek Manajemen Risiko - Penyusunan Surat Keputusan BPTJ mengenai pembentukan unit pengelola risiko (UPR) pada unit BPTJ, dengan ditetapkannya KP tentang UPR di Lingkungan BPTJ Tahun 2023 (nomor KP-BPTJ 332 Tahun 2023)	Sekretariat BPTJ
											3,91	0	0%	1.764.236.000	3,907	54.240.500	0,00%	3,07%	
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ							Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola ASN BPTJ yaitu melakukan monitoring terkait kriteria yang masih berada dibawah rata-rata yaitu kriteria Pengelolaan Kepegawaian dan RB serta kriteria sosialisasi, selain itu Bagian SDM dan Umum selalu berkoordinasi dengan seluruh unit di bawah kendali BPTJ untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kepegawaian. Dengan menata dan memutakhirkan data kepegawaian, serta selalu siap memberikan asistensi penyusunan dokumen terkait kepegawaian	Sekretariat BPTJ
											77	21	27%	2.408.324.000	76,7	1.008.041.907	365,24%	41,86%	
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ							Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	a. Pemantauan penegapan disiplin pegawai b. Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai c. Peningkatan kepribadian dan pengabdian ASN kepada unit kerja d. Peningkatan aspek kualifikasi, untuk PNS yang melanjutkan Pendidikan dari D3 ke S1 termasuk yang tugas belajar (beasiswa S2) e. Peningkatan aspek kompetensi, tahun 2024 akan didata kompetensi diklat dan kebutuhannya	Sekretariat BPTJ
											78	13	17%	37.524.879.000	76,6	4.044.878.597	589,23%	10,78%	
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ							Didapatkan nilai IKPA sebesar 72,75. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BPTJ yaitu melakukan monitoring penyerapan anggaran dalam hal ini nilai realisasi anggaran dan capaian fisik. Sekretariat BPTJ melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan akan melakukan koordinasi yang intens dengan Direktorat teknis terkait percepatan realisasi dimaksud, serta melakukan monitoring pelaksanaan dan data dukung kegiatan kontraktual	Sekretariat BPTJ
											98,5	92,5	94%	976.741.000	89,1	138.049.300	96,32%	14,13%	
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ							Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.243 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN	Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan koordinasi yang intens dengan penanggung jawab BMN terkait data dukung usulan PSP BMN dimaksud	Sekretariat BPTJ
											97,5	94,5	97%	724.123.000	90,17	174.350.600	95,42%	24,08%	
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ							Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ akan dilakukan monitoring terhadap indikator Penilaian kualitas layanan atas manfaat Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran seperti pengadaan laptop, PC, Printer Dsb yang sudah dilaksanakan oleh BPTJ	Sekretariat BPTJ
											77,5	69	89%	49.851.580.000	78,36	8.624.999.439	113,57%	17,30%	
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ							Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ yaitu melakukan monitoring pelaksanaan arsip di lingkungan BPTJ	Sekretariat BPTJ
											75	72	96%	109.988.000	77,07	13.720.250	107,04%	12,47%	
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ							Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik	melakukan monitoring terkait masing-masing komponen pemberitaan media masa, pengelolaan media, dan komponen publikasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik	Sekretariat BPTJ
											78	13	17%	3.069.623.000	45,03	518.157.981	346,44%	16,88%	

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2			Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
												Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
												Volume	%	Volume	Volume	Volume	%	%			
							SK 11	Tenwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	BKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	13	16%	2.801.405.000	82,61	357.328.395	635,46%	12,76%	Terdapat 19 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 23 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diroses	- Melakukan koordinasi dan monitoring pengajuan penyusunan peraturan di lingkungan BPTJ - Rancangan peraturan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diusulkan khususnya terhadap data-data teknis terkait substansi peraturan - Koordinasi lebih lanjut dengan Bagian Humas terkait proses upload ke website BPTJ - Berkordinasi secara intens dengan Biro Hukum Kemenhub dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan	Sekretariat BPTJ



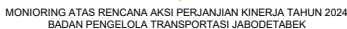
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN MARET TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 3			Realisasi Bulan 3		% Capaian Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
								Volume	%									Volume	Volume	Volume	%
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	109.799.102	100,00%	23,61%	Total dari panjang jalan yang telah terlayani trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759,3 Km dari panjang jaringan jalan 17.355,1 Km	Memosialisasikan potensi pergerakan masyarakat kepada operator dan pengembangan perumahan untuk menambah rute layanan JRC	Di. Angkutan
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	398.542.902	100,00%	4,71%	Panjang rel kereta api perkotaan yang terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km	Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Di. Prasarana
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,63	99%	28.605.403.000	55,63	1.306.646.729	100,00%	4,57%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	a. Pembangunan Fasilitas Integrasi dan Penataan Sirkulasi Perpindahan Antarmoda pada Simpul Stasiun Cibinong b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek	Di. Prasarana
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	72,3	86%	2.671.000.000		32.000.000	0,00%	1,20%	Skor indikator SPM terminal tipe A yang dapat terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum 148		Di.Prasarana
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		10.785.788.463	0,00%	11,30%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Di.Angkutan
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	37,81	4.322.747.737	94,53%	10,95%	Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2024 dengan nilai tertinggi sebesar 37,93 km/jam pada bulan Februari dan kecepatan rata-rata terendah sebesar 37,63 km/jam pada bulan Maret. Target rata-rata kecepatan kendaraan penumpang di jalan nasional Tahun 2024 sebesar 42 km/jam	Beberapa upaya yang dilaksanakan pada triwulan I untuk dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan rekayasa lalu lintas pada beberapa lokasi yaitu survei pemantauan lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di jalan nasional Jabodetabek, koordinasi penanganan kemacetan, serta monitoring evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas di beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan kemacetan seperti kawasan pusat industri/pabrik dan kawasan pusat perbelanjaan	Di.Lalu Lintas
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000		473.055.642	0,00%	12,43%	Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek adalah sebesar 36,02 km/jam. Perhitungan tersebut didapatkan dari data jam keluar masuk tol serta data jarak tempuh kendaraan (golongan II ke atas) diperoleh dari data tapping kendaraan di tol		Di.Angkutan
									IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		305.324.470	0,00%	23,31%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Di.Angkutan
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90,32	98%	8.563.444.000	95,13	598.074.849	105,33%	6,98%	Persentase Perjalananan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 103,40% dari target persentase ketepatan waktu sebesar 92% dengan realisasi sebesar 95,13%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata - rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwulan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait	Untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi kereta api perkotaan yang tepat waktu dilakukan beberapa upaya diantaranya : (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; (2) Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; dan (3) Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek	Di.Lalu Lintas
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	67,5	98%	29.540.525.000	67,3	21.994.225.158	99,70%	74,45%	Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2024 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, Warning Light, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 96,97% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu Overhead sebesar 68,06%		Di.Lalu Lintas
							SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		1.491.013.445	0,00%	32,10%	Dilakukan pemeriksaan terhadap 1.466 unit kendaraan bus dan didapat 839 unit bus tidak layak jalan	1. Sosialisasi dan pengarahan terkait kelengkapan unsur administrasi dan unsur teknis yang wajib ada dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan otobus dan pengemudi kendaraan 2. Pemenuhan target jumlah kendaraan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan memperhatikan dan meminimalisir beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target kendaraan yang di rampcheck oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/ Direktorat Angkutan.	Di.Angkutan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 3			Realisasi Bulan 3		% Capaian Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	Volume	Volume	%	%						
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ						Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Telah dilakukan revu atas penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) BPTJ Tahun 2023 sesuai Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 318 Tahun 2023 (penyesuaian target, pendetailan metode perhitungan, dan pemetaan penanggungjawab) - Telah dilakukan perbaikan cascading IKK dan MPH sampai level individu dan didukung oleh pengisian pada aplikasi E-Kinerja - Telah disusun SOP laporan monitoring SKP, monitoring atas penyampaian SKP dan laporan bulanan setiap pegawai melalui aplikasi E-Kinerja - Telah dilaksanakan monitoring publikasi aplikasi ESR - Telah dilakukan penyesuaian pada target perjanjian kinerja (tidak lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya) - Telah disusun SOP Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) - Telah dilakukan pembahasan capaian kinerja triwulanan - Inventarisasi data dukung kinerja telah memanfaatkan teknologi - Telah disusun SOP penyampaian laporan kinerja Eselon II kepada pimpinan Unit Kerja Eselon II dan SOP penyampaian hasil revu Laporan Kinerja secara berjenjang	Sekretariat BPTJ		
											81	0	0%	7.971.000.000	75,02	623.699.998	0,00%	7,82%		
							SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ							Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemantauan atas aktivitas pengendalian (Rencana Tindak Pengendalian) dengan Inspektorat Jenderal - Peningkatan pemahaman dan penyusunan terkait Manajemen Risiko di Lingkungan BPTJ melalui Sosialisasi Bimtek Manajemen Risiko - Penyusunan Surat Keputusan BPTJ mengenai pembentukan unit pengelola risiko (UPR) pada unit BPTJ, dengan ditetapkannya KP tentang UPR di Lingkungan BPTJ Tahun 2023 (nomor KP-BPTJ 332 Tahun 2023)	Sekretariat BPTJ	
											3,91	0	0%	1.764.236.000	3,907	329.565.600	0,00%	18,68%		
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ							Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola ASN BPTJ yaitu melakukan monitoring terkait kriteria yang masih berada dibawah rata-rata yaitu kriteria Pengelolaan Kepegawaian dan RB serta kriteria sosialisasi, selain itu Bagian SDM dan Umum selalu berkoordinasi dengan seluruh unit di bawah kendali BPTJ untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kepegawaian. Dengan menata dan memutakhirkan data kepegawaian, serta selalu siap memberikan asistensi penyusunan dokumen terkait kepegawaian	Sekretariat BPTJ	
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ							Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	a. Pemantauan penegakan disiplin pegawai b. Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai c. Peningkatan kepribadian dan pengabdian ASN kepada unit kerja d. Peningkatan aspek kualifikasi, untuk PNS yang melanjutkan Pendidikan dari D3 ke S1 termasuk yang tugas belajar (beasiswa S2) e. Peningkatan aspek kompetensi, tahun 2024 akan didata kompetensi diklat dan kebutuhannya	Sekretariat BPTJ	
											78	22	28%	37.524.879.000	76,6	9.556.584.109	348,18%	25,47%		
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ							Didapatkan nilai IKPA sebesar 72,75. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BPTJ yaitu melakukan monitoring penyerapan anggaran dalam hal ini nilai realisasi anggaran dan capaian fisik. Sekretariat BPTJ melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan akan melakukan koordinasi yang intens dengan Direktorat teknis terkait percepatan realisasi dimaksud, serta melakukan monitoring pelaksanaan dan data dukung kegiatan kontraktual	Sekretariat BPTJ	
											98,5	92,5	94%	976.741.000	89,1	219.234.700	96,32%	22,45%		
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ							Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.243 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN	Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan koordinasi yang intens dengan penanggung jawab BMN terkait data dukung usulan PSP BMN dimaksud	Sekretariat BPTJ	
											97,5	94,5	97%	724.123.000	90,17	373.749.504	95,42%	51,61%		
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ							Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ akan dilakukan monitoring terhadap indikator Penilaian kualitas layanan atas manfaat Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran seperti pengadaan laptop, PC, Printer Dsb yang sudah dilaksanakan oleh BPTJ	Sekretariat BPTJ	
											77,5	69	89%	49.851.580.000	78,36	15.134.900.009	113,57%	30,36%		
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ							Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ yaitu melakukan monitoring pelaksanaan arsip di lingkungan BPTJ	Sekretariat BPTJ	
											75	72	96%	109.988.000	77,07	73.163.550	107,04%	66,52%		
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ							Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik	melakukan monitoring terkait masing-masing komponen pemberitaan media masa, pengelolaan media, dan komponen publikasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik	Sekretariat BPTJ	
											78	19,498	25%	3.069.623.000	45,03	703.040.202	230,95%	22,90%		

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 3		Realisasi Bulan 3		% Capaian Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
												Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja					Realisasi Anggaran	
												Volume	%	Volume		Volume	Volume				Volume	%
						SK 11	Tenwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	BKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	19,5	24%	2.801.405.000	82,61	800.428.256	423,64%	28,57%	Terdapat 19 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 23 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diroses	- Melakukan koordinasi dan monitoring pengajuan penyusunan peraturan di lingkungan BPTJ - Rancangan peraturan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diusulkan khususnya terhadap data-data teknis terkait substansi peraturan - Koordinasi lebih lanjut dengan Bagian Humas terkait proses upload ke website BPTJ - Berkordinasi secara intens dengan Biro Hukum Kemenhub dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan	Sekretariat BPTJ		



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 4			Realisasi Bulan 4		% Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran %								
								Volume	%									Volume	Volume			
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	109.799.102	100,00%	23,61%	Total dari panjang jalan yang telah terlayani trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759,3 Km dari panjang jaringan jalan 17.355,1 Km	Dit. Angkutan		
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	432.529.100	100,00%	5,12%	Panjang rel kereta api perkotaan yang terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km	Dit. Prasarana		
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,73	100%	28.605.403.000	55,63	3.566.019.379	99,82%	12,47%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	Dit. Prasarana		
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	74	88%	2.671.000.000		90.449.600	0,00%	3,39%	Skor indikator SPM terminal tipe A yang dapat terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum 148	Dit.Prasarana		
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		17.039.978.022	0,00%	17,86%	Capaian masih dalam proses penghitungan	Dit.Angkutan		
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	37,81	4.883.716.887	94,53%	12,37%	Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek sebesar 37,81 km/jam	Dit.Lalu Lintas		
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000		504.507.542	0,00%	13,26%	Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek adalah sebesar 36,02 km/jam. Perhitungan tersebut didapatkan dari data jam keluar/ masuk tol serta data jarak tempuh kendaraan (golongan II ke atas) diperoleh dari data tapping kendaraan di tol	Dit.Angkutan		
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		308.104.470	0,00%	23,52%	Capaian masih dalam proses penghitungan	Dit.Angkutan		
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90,48	98%	8.563.444.000	95,13	722.005.349	105,14%	8,43%	Persentase Perjalananan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu adalah 95,13%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata - rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwulan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait	Dit.Lalu Lintas		
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	67,5	98%	29.540.525.000	67,3	24.968.492.598	99,70%	84,52%	Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2024 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, Warning Light, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 96,97% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu Overhead sebesar 68,06%	Dit.Lalu Lintas		
									SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		1.883.340.045	0,00%	40,55%	Dilakukan pemeriksaan terhadap 1.466 unit kendaraan bus dan didapat 839 unit bus tidak layak jalan	Dit.Angkutan
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Brokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	0	0%	7.971.000.000	75,02	785.521.498	0,00%	9,85%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ		
									SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	0	0%	1.764.236.000	3,907	543.831.800	0,00%	30,83%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
									SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	23	30%	2.408.324.000	76,7	1.180.245.607	333,48%	49,01%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
											IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	27	35%	37.524.879.000	76,6	12.305.561.439	283,70%	32,79%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
			SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	94,5	96%	978.741.000	89,1	285.174.700	94,29%	29,20%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 72,75. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPDA dan Belum tercapainya Capaian Output	Sekretariat BPTJ						
					IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	95,5	98%	724.123.000	90,17	446.149.504	94,42%	61,61%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.243 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN	Sekretariat BPTJ						
					IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	70	90%	49.851.580.000	78,36	18.396.136.637	111,94%	36,90%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai							



MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

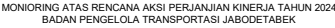
BULAN MEI TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 5			Realisasi Bulan 5		% Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
								Target Kinerja		Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
								Volume	%	Volume	Volume	Volume	%	%							
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	124.861.536	100,00%	26,85%	Total dari panjang jalan yang telah terlayani trayek angkot dan bus adalah sepanjang 12.759,3 Km dari panjang jaringan jalan 17.355,1 Km		Dir. Angkutan
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	1.113.589.270	100,00%	13,17%	Panjang rel kereta api perkotaan yang terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km		Dir. Prasarana
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,73	100%	28.605.403.000	55,63	6.654.457.050	99,82%	23,26%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul		Dir. Prasarana
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	74	88%	2.671.000.000		148.899.200	0,00%	5,57%	Skor indikator SPM terminal tipe A yang dapat terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum 148		Dir.Prasarana
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		24.727.095.330	0,00%	25,91%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Dir.Angkutan
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	37,81	6.089.245.432	94,53%	15,42%	Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek sebesar 37 km/jam		Dir.Lalu Lintas
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek									Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek adalah sebesar 36,02 km/jam. Perhitungan tersebut didapatkan dari data jam keluar/ masuk tol serta data jarak tempuh kendaraan (golongan II ke atas) diperoleh dari data tapping kendaraan di tol		Dir.Angkutan
									IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		317.834.470	0,00%	24,26%	Capaian masih dalam proses penghitungan		Dir.Angkutan
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90,48	98%	8.563.444.000	95,13	1.423.346.038	105,14%	16,62%	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu adalah 95,13%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata - rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwilan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait		Dir.Lalu Lintas
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek								Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2024 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, Warning Light, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 96,97% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu Overhead sebesar 68,06%		Dir.Lalu Lintas	
									SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		2.364.503.312	0,00%	50,90%	Dilakukan pemeriksaan terhadap 1.466 unit kendaraan bus dan didapati 839 unit bus tidak layak jalan
			IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	0	0%	7.971.000.000	75,02	1.466.576.298	0,00%	18,40%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPiP BPTJ	3,91			0	0%	1.764.236.000	3,907	891.794.075	0,00%	50,55%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ					
SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77			26	34%	2.408.324.000	76,7	1.293.034.432	295,00%	53,69%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ					
		IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78			42	54%	37.524.879.000	76,6	14.407.398.801	182,38%	38,39%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ					
		IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5			94,5	96%	976.741.000	89,1	422.152.838	94,29%	43,22%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 72,75. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output		Sekretariat BPTJ					
SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5			95,5	98%	724.123.000	90,17	456.926.604	94,42%	63,10%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.243 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN		Sekretariat BPTJ					
		IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5			70	90%	49.851.580.000	78,36	25.448.513.696	111,94%	51,05%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ					
		IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75			73	97%	109.988.000	77,07	77.429.750	105,58%	70,40%	Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ					
		SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19			Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	33	42%	3.069.623.000	45,03	1.328.460.359	138,55%	43,28%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik		Sekretariat BPTJ			
SK 11	Terwujudnya Regulasi yang Lebih Terbik, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80			33	41%	2.801.405.000	82,61	965.598.779	254,18%	34,47%	Terdapat 19 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 23 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diroses		Sekretariat BPTJ					



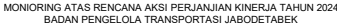
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN JUNI TAHUN 2024																								
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 6		Realisasi Bulan 6		% Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab								
								Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran											
								Volume	%	Volume	%	%	%											
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	73,5	92%	465.000.000	73,5	195.405.436	100,00%	42,02%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 17.355,1 Km	Rel kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316.938 Km		Dit. Angkutan		
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	1.578.013.066	100,00%	18,66%			Dit. Prasarana			
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,73	100%	28.605.403.000	56,29	7.085.816.439	101,00%	24,77%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul		Dit. Prasarana			
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	76	90%	2.671.000.000	78	148.899.200	102,63%	5,57%	Skor Indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terepenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148	Nilai belum dapat diperoleh		Dit.Prasarana		
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		30.452.342.917	0,00%	31,91%			Dit.Angkutan			
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	8.089.859.204	95,00%	20,49%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam	Melakukan penanganan kemacetan melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dit.Lalu Lintas			
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,77	583.293.831	100,20%	15,33%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan angkutan barang di jalan tol sebesar 35,77 km/jam	Menjalin koordinasi dengan stakeholder lain terkait kelancaran kendaraan barang di jalan tol, serta mencari metode perhitungan yang optimal dalam menghitung kecepatan kendaraan barang di jalan tol	Dit.Angkutan			
									IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		338.710.970	0,00%	25,86%	Nilai belum dapat diperoleh		Dit.Angkutan			
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	90,48	98%	8.563.444.000	95,49	1.658.622.188	105,54%	19,37%	Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%		Dit.Lalu Lintas			
									IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	67,5	98%	29.540.525.000	77,16	26.350.367.599	114,31%	89,20%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ		Dit.Lalu Lintas			
									IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		2.517.153.415	0,00%	54,19%	Jumlah unit kendaraan yang memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check) oleh BPTJ di 4 (empat) Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek adalah 2.168 dari 2.670 kendaraan	Sosialisasi dan pengarahan terkait kelengkapan unsur administrasi dan unsur teknis yang wajib ada dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan otobus dan pengemudi kendaraan	Dit.Angkutan			
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	0	0%	7.971.000.000	75,02	2.087.050.521	0,00%	26,18%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ			
									IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	0	0%	1.764.236.000	3,907	891.794.075	0,00%	50,55%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ			
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhiya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	32	42%	2.408.324.000	76,7	1.382.786.702	239,69%	57,42%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ			
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	50	64%	37.524.879.000	76,6	16.386.812.191	153,20%	43,67%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ			
			SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman						IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	94,5	96%	976.741.000	98,17	428.859.888	103,88%	43,91%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 95,42. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DiPA dan Belum tercapainya Capaian Output	Berkoordinasi dengan direktorat di BPTJ untuk percepatan realisasi anggaran	Sekretariat BPTJ		
										IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	95,5	98%	724.123.000	90,28	545.773.504	94,53%	75,37%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN		Sekretariat BPTJ		
										IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	70	90%	49.851.580.000	78,36	28.903.227.009	111,94%	57,98%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ		
										IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	73	97%	109.988.000	77,07	83.425.950	105,58%	75,85%	Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ		
										SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	39	50%	3.069.623.000	58,21	1.371.705.471	149,26%	44,69%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik		Sekretariat BPTJ
														IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	39	49%	2.801.405.000	84,62	1.034.574.810	216,97%	36,93%	Terdapat 22 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 26 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses



BULAN JULI TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 7		Realisasi Bulan 7		% Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab						
								Target Volume	Target %	Realisasi Volume	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran									
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	76	95%	465.000.000	73,5	222.965.226	96,71%	47,95%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 17.355,1 Km	Dit. Angkutan		
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rei	0,049	0,459	937%	8.455.381.000	0,049	1.626.709.096	10,68%	19,24%	Rei kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316.938 Km	Dit. Prasarana		
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,8	100%	28.805.403.000	56,29	8.815.568.303	100,88%	30,82%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	Dit. Prasarana		
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	78	93%	2.671.000.000	78	603.348.800	100,00%	22,59%	Skor indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148	Dit.Prasarana		
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		39.506.024.847	0,00%	41,40%	Nilai belum dapat diperoleh	Dit.Angkutan		
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	11.799.715.275	95,00%	29,88%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam	Dit.Lalu Lintas		
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,77	690.208.291	100,20%	18,14%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan angkutan barang di jalan tol sebesar 35,77 km/jam	Dit.Angkutan		
									IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		541.023.348	0,00%	41,30%	Nilai belum dapat diperoleh	Dit.Angkutan		
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	91,06	99%	8.563.444.000	95,49	2.699.711.418	104,86%	31,53%	Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang lewat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%	Dit.Lalu Lintas		
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	68,5	99%	29.540.525.000	77,16	26.891.073.473	112,64%	91,03%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ	Dit.Lalu Lintas		
							SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000	2.775.669.178	0,00%	59,76%	Jumlah unit kendaraan yang memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check) oleh BPTJ di 4 (empat) Terminal Tipe A di di Wilayah Jabodetabek adalah 2.168 dari 2.870 kendaraan			Dit.Angkutan	
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	81	100%	7.971.000.000	75,02	2.468.550.524	0,00%	30,97%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
							SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	3,91	100%	1.764.236.000	3,907	1.054.161.975	0,00%	59,75%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	59	77%	2.408.324.000	76,7	1.643.650.702	130,00%	68,25%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	57	73%	37.524.879.000	76,6	18.824.628.066	134,39%	50,17%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	98,5	98%	976.741.000	98,17	543.418.038	101,73%	55,64%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 95,42. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output			Sekretariat BPTJ
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	96,5	99%	724.123.000	90,28	638.246.004	93,55%	88,14%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNl maupun Biro LPPBMN			Sekretariat BPTJ
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	71	92%	49.851.580.000	78,36	33.111.267.756	110,37%	66,42%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	74	99%	109.988.000	77,07	92.180.634	104,15%	83,81%	Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun			Sekretariat BPTJ
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	45	58%	3.069.623.000	58,21	1.553.236.321	127,94%	50,60%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik			Sekretariat BPTJ
							SK 11	Terwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	70	88%	2.801.405.000	84,62	1.245.184.231	120,89%	44,45%	Terdapat 22 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 26 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses			Sekretariat BPTJ



BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 8		Realisasi Bulan 8		% Capaian Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	76	95%	465.000.000	73,5	253.152.226	96,71%	54,44%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 17.355,1 Km		Dit. Angkutan
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	3.436.450.805	100,00%	40,64%	Rel kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316,938 Km		Dit. Prasarana
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,8	100%	28.005.403.000	56,29	10.303.708.248	100,88%	36,02%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul		Dit. Prasarana
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	80	95%	2.671.000.000	78	603.348.800	97,50%	22,59%	Skor indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148		Dit.Prasarana
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000		49.929.508.979	0,00%	52,32%	Nilai belum dapat diperoleh		Dit.Angkutan
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	17.388.674.215	95,00%	44,04%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam		Dit.Lalu Lintas
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,77	900.119.811	100,20%	23,66%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan angkutan barang di jalan tol sebesar 35,77 km/jam		Dit.Angkutan
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000		707.508.888	0,00%	54,01%	Nilai belum dapat diperoleh		Dit.Angkutan
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	91,22	99%	8.563.444.000	95,49	3.508.343.643	104,68%	40,97%	Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%		Dit.Lalu Lintas
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	68,75	100%	29.540.525.000	77,16	27.085.269.765	112,23%	91,69%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ		Dit.Lalu Lintas
							SK 5	Terseleenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000		3.150.152.373	0,00%	67,82%	Jumlah unit kendaraan yang memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check) oleh BPTJ di 4 (empat) Terminal Tipe A di di Wilayah Jabodetabek adalah 2.168 dari 2.570 kendaraan		Dit.Angkutan
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	81	100%	7.971.000.000	75,02	3.976.526.364	0,00%	49,89%	Realisasi kinerja 75,02 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
							SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturlitas SPiP BPTJ	3,91	3,91	100%	1.764.236.000	3,907	1.370.053.758	0,00%	77,66%	Realisasi kinerja 3,907 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepagawisan dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	68	88%	2.408.324.000	76,7	1.726.398.116	112,79%	71,68%	Realisasi kinerja 76,7 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	64	82%	37.524.879.000	76,6	21.686.217.510	119,69%	57,79%	Realisasi kinerja 76,6 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	96,5	98%	976.741.000	98,17	716.795.498	101,73%	73,39%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 95,42. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output		Sekretariat BPTJ
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	96,5	99%	724.123.000	90,28	674.779.004	93,55%	93,19%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN		Sekretariat BPTJ
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	71	92%	49.851.580.000	78,36	37.118.532.734	110,37%	74,46%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	74	99%	109.988.000	77,07	100.305.834	104,15%	91,20%	Realisasi kinerja 77,07 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		Sekretariat BPTJ
			SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ			IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ			78	52	67%	3.069.623.000	58,21	2.091.022.951	111,95%	68,12%	Penhungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik		Sekretariat BPTJ
			SK 11	Terwujudnya Regulasi yang Lebih Terbti, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif			IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Diaahkan Menjadi Peraturan			80	70	88%	2.801.405.000	84,62	1.545.411.327	120,89%	55,17%	Terdapat 22 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 26 peraturan. Sementara 4 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses		Sekretariat BPTJ



MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 9			Realisasi Bulan 9		% Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Kinerja	Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
									Volume	%								Volume	Volume	Volume
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	77	96%	465.000.000	80	486.358.526	103,90%	104,59%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 14.388 Km	Di. Angkutan
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	4.044.454.084	100,00%	47,83%	Rel kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316.938 Km	Di. Prasarana
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,9	100%	28.605.403.000	56,29	13.501.458.372	100,70%	47,20%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul	Di. Prasarana
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	81	96%	2.671.000.000	78	661.798.400	96,30%	24,78%	Skor Indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148	Di.Prasarana
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000	55	58.280.718.617	100,00%	61,07%	Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan juli - september jumlah pengguna angkutan umum sebanyak 55,43% dari kapasitas yang tersedia	Di.Angkutan
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	21.970.701.673	95,00%	55,64%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam	Di.Lalu Lintas
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek									Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan angkutan barang di jalan tol sebesar 35,81 km/jam	Di.Angkutan
											35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,7	950.478.808	100,00%	24,98%		
	IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000	85	754.551.618	100,00%	57,60%	Jumlah perjalanan angkutan umum perkotaan JRC, JAC, dan Transjabodetabek periode Juli s.d September 2024 yaitu sebanyak 153 perjalanan, akan tetapi hanya 71 perjalanan yang tepat waktu, sehingga persentase perjalanan angkutan umum yang tepat waktu ialah 46,4%	Di.Angkutan		
							IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu									Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%	Di.Lalu Lintas		
									92	91,38	99%	8.563.444.000	95,49	5.329.839.896	104,50%	62,24%		Di.Lalu Lintas		
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	69	100%	29.540.525.000	77,16	30.557.719.284	111,83%	103,44%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ	Di.Lalu Lintas
									SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000	76	3.702.847.684	100,00%	79,72%
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai SAKIP BPTJ	81	81	100%	7.971.000.000	81	4.813.904.527	0,00%	60,39%	Realisasi kinerja 81 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
									SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	3,91	100%	1.764.236.000	3,91	1.476.971.733	0,00%	83,72%
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	70	91%	2.408.324.000	70	1.869.138.351	100,00%	77,61%	Realisasi kinerja 70 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	73	94%	37.524.879.000	73	24.517.874.076	100,00%	65,34%	Realisasi kinerja 73 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	96,5	98%	976.741.000	96,5	830.648.998	100,00%	85,04%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 97,97. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output	Sekretariat BPTJ
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ									Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN	Sekretariat BPTJ
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	71	92%	49.851.580.000	71	40.455.055.401	100,00%	81,15%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	74	99%	109.988.000	74	100.524.834	100,00%	91,40%	Realisasi kinerja 74 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	Sekretariat BPTJ
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	59	75%	3.069.623.000	58,21	2.172.126.101	99,50%	70,76%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik	Sekretariat BPTJ
							SK 11	Terwujudnya Regulasi yang Lebih Terbuka, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	70	88%	2.801.405.000	84,62	1.713.910.377	120,89%	61,18%	Terdapat 29 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 38 peraturan. Sementara 9 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses	Sekretariat BPTJ



MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN OKTOBER TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 10		Realisasi Bulan 10		% Capaian Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran %						
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	78	98%	465.000.000	80	1.022.615.756	102,56%	219,92%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 14.388 Km
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	5.749.587.953	100,00%	68,00%	Rel kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316.938 Km
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	55,9	100%	28.605.403.000	56,29	17.660.883.399	100,70%	61,74%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	82	98%	2.671.000.000	78	661.798.400	95,12%	24,78%	Skor Indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terepenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000	55	67.243.087.398	100,00%	70,47%	Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan juli - september jumlah pengguna angkutan umum sebanyak 55,43% dari kapasitas yang tersedia
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	24.591.599.720	95,00%	62,28%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek		35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,7	1.638.545.787	100,00%	43,06%
			IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000	85	1.011.899.615	100,00%	77,24%	Jumlah perjalanan angkutan umum perkotaan JRC, JAC, dan Transjabodetabek periode Juli s.d September 2024 yaitu sebanyak 153 perjalanan, akan tetapi hanya 71 perjalanan yang tepat waktu, sehingga persentase perjalanan angkutan umum yang tepat waktu ialah 46,4%
									IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	91,54	100%	8.563.444.000	95,49	6.740.328.162	104,32%	78,71%	Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	69	100%	29.540.525.000	77,16	30.787.667.731	111,83%	104,22%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ
									SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000	76	3.935.445.686	100,00%
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	81	100%	7.971.000.000	81	5.373.360.279	0,00%	67,41%	Realisasi kinerja 81 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
									SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	3,91	100%	1.764.236.000	3,91	1.515.101.733	0,00%
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	76	99%	2.408.324.000	70	2.036.457.366	92,11%	84,56%	Realisasi kinerja 70 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	77	99%	37.524.879.000	73	27.068.566.244	94,81%	72,13%	Realisasi kinerja 73 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	98,5	100%	976.741.000	96,5	1.021.108.998	97,97%	104,54%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 97,97. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	97,5	100%	724.123.000	96,5	699.911.104	98,97%	96,66%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN
							IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	77,5	100%	49.851.580.000	71	43.961.667.577	91,61%	88,19%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun		
								IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	75	100%	109.988.000	74	100.724.834	98,67%	91,58%	Realisasi kinerja 74 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun	
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	65	83%	3.069.623.000	58,21	2.350.629.465	89,56%	76,58%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik
							SK 11	Terwujudnya Regulasi yang Lebih Terbik, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif	IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	80	100%	2.801.405.000	84,62	1.936.650.426	105,78%	69,13%	Terdapat 29 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 38 peraturan. Sementara 9 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses



MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 11		Realisasi Bulan 11		% Capaian Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran %						
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Indeks	0,45	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi	IKK 1	Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	80	79	99%	465.000.000	80	1.460.920.210	101,27%	314,18%	Data trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km. Sementara panjang jaringan jalan di Jabodetabek adalah 14.388 Km
									IKK 2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	0,049	0,049	100%	8.455.381.000	0,049	6.033.921.753	100,00%	71,36%	Rel kereta api perkotaan yang beroperasi terdiri dari KRL, LRT, dan MRT adalah sepanjang 316.938 Km
									IKK 3	Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	56	56	100%	28.605.403.000	56,29	18.517.888.190	100,52%	64,74%	Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 85 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul
2	SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 4	Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	84	83	99%	2.671.000.000	78	973.138.000	93,98%	36,43%	Skor Indikator SPM Terminal Tipe A Yang Dapat Terpenuhi adalah 116 dari skor maksimum indikator SPM terminal sebesar 148
									IKK 5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	55	55	100%	95.425.730.000	55	75.242.030.503	100,00%	78,85%	Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan juli - september jumlah pengguna angkutan umum sebanyak 55,43% dari kapasitas yang tersedia
									IKK 6	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	42	40	95%	39.485.629.000	38	26.183.064.125	95,00%	66,31%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan penumpang di jalan nasional Jabodetabek sebesar 38,00 km/jam
									IKK 7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	35,7	35,7	100%	3.805.000.000	35,7	1.747.144.060	100,00%	45,92%	Berdasarkan data, diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan angkutan barang di jalan tol sebesar 35,81 km/jam
		IKP2.2	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	SK 3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK 8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	85	85	100%	1.310.000.000	85	1.222.332.540	100,00%	93,31%	Jumlah perjalanan angkutan umum perkotaan JRC, JAC, dan Transjabodetabek periode Juli s.d September 2024 yaitu sebanyak 153 perjalanan, akan tetapi hanya 71 perjalanan yang tepat waktu, sehingga persentase perjalanan angkutan umum yang tepat waktu ialah 46,4%	
								IKK 9	Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	92	91,7	100%	8.563.444.000	95,49	7.183.892.814	104,13%	83,89%	Jumlah perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu selama periode Januari s.d. Juni adalah sebesar 203.993 dari 213.632 perjalanan, atau sebesar 95,49%	
3	SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3	Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Jabodetabek	%	100	SK 4	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	IKK 10	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	69	69	100%	29.540.525.000	77,16	30.952.867.856	111,83%	104,78%	Data kebutuhan fasilitas keselamatan mengacu pada dokumen daftar kebutuhan yang telah disusun. Sedangkan, data fasilitas keselamatan terpasang didapatkan dari hasil pendataan/pengadaan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ
									SK 5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK 11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	76	76	100%	4.645.000.000	76	4.407.190.165	100,00%
4	SP4	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	IKK 12	Nilai AKIP BPTJ	81	81	100%	7.971.000.000	81	5.855.387.764	0,00%	73,46%	Realisasi kinerja 81 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
									SK 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	IKK 13	Nilai Maturitas SPIP BPTJ	3,91	3,91	100%	1.764.236.000	3,91	1.547.638.933	0,00%
							SK 8	Meningkatnya Kapabilitas Kepengawasan dan Organisasi BPTJ	IKK 14	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	77	76	99%	2.408.324.000	70	2.256.981.444	92,11%	93,72%	Realisasi kinerja 70 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
									IKK 15	Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	78	77	99%	37.524.879.000	73	33.163.499.309	94,81%	88,38%	Realisasi kinerja 73 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
							SK 9	Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	98,5	98,5	100%	976.741.000	96,5	1.135.885.698	97,97%	116,29%	Didapatkan nilai IKPA sebesar 97,97. Nilai IKPA yang belum optimal disebabkan oleh adanya Deviasi Halaman III DIPA dan Belum tercapainya Capaian Output
									IKK 17	Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	97,5	97,5	100%	724.123.000	96,5	701.261.104	98,97%	96,84%	Telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 13.994 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.274 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN
									IKK 18	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	77,5	77,5	100%	49.851.580.000	71	47.859.903.016	91,61%	96,00%	Realisasi kinerja 78,36 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
									IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	75	75	100%	109.988.000	74	100.724.834	98,67%	91,58%	Realisasi kinerja 74 merupakan realisasi tahun sebelumnya. Perolehan nilai realisasi kinerja bersifat tahunan dan nilai tahun 2024 baru dapat diperoleh mendekati akhir tahun
							SK 10	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	IKK 19	Nilai Reputasi Positif BPTJ	78	71	92%	3.069.623.000	58,21	2.825.320.089	81,41%	92,04%	Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari: 1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial 2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik
									IKK 20	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	80	80	100%	2.801.405.000	84,62	2.416.956.681	105,78%	86,28%	Terdapat 29 rancangan peraturan yang telah disahkan dari total 38 peraturan. Sementara 9 peraturan lainnya masih ditahan dan diproses

Lampiran VI
Daftar Trayek Angkutan Umum
Tahun 2024

Daftar Trayek Angkutan Perkotaan

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
KOTA BOGOR	AKB KOTA BOGOR	1	Cipinang Gading - Merdeka
		2	Sukasari - Bubulak
		4	Warung Nangka - Bogor Trade Mall
		5	Cimahpar - Bogor Trade Mall
		6	Ciheuleut - Ramayana
		7	Terminal Merdeka - Warung Jambu
		07A	Ciparigi - Pasar Bogor
		8	Warung Jambu - Bogor Trade Mall
		8A	Bogor Trade Mall - Taman Kencana - Warung
		11	Baranangsiang Indah - Pasar Baru Bogor
		12	Pasar Anyar - Cimanggu Permai
		13	Pangulaan - Bogor Trade Mall
		14	Sukasari - Pasir Kuda - Terminal Bubulak
		15	Merdeka - Situ Gede - Carangpulang
		16	Pasar Anyar - Salabenda
		17	Pomad - Bina Marga
		21	Mulyaharja - Bogor Trade Mall
		22	Bubulak - Kencana
		23	Pasar Anyar - Taman Griya Kencana
		24	Pasar Anyar - Pondok Rumpit
			Baranangsiang - Bubulak
			Ciparigi - Sukasari
			Ekalokasari - Merdeka
KAB BOGOR	AKB KABUPATEN BOGOR	21	Baranangsiang - Ciawi
		2	Sukasari - Cicurug
		02A	Sukasari - Cisarua
		02B	Sukasari - Cibedug
		02C	Pasir Muncang - Ciawi
		3	Bogor Trade Mall - Ciapus
		04A	Bogor Trade Mall - Cihideung
		05A	Ciomas - Merdeka
		05C	Jasinga - Laladon
		5	Leuwiliang - Bubulak
		6	Merdeka - Parung
		06A	Bantar Kambing, Pasar Ciampea - Merdeka
		7	Pasar Anyar - Bojong Gede
		8	Citeureup - Pasar Anyar
		11	Leuwiliang - Ciampea
		12	Ciampea - Bojong Gede
		17	Laladon - Kampus Dalam
		18	Laladon - Neglasari
		19	Laladon - Cibereum Petir
		23	Ciampea - Putat Nutug
		25	Parung - Rumpin

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		26	Simpang Parung - Pasar Prumpung
		27	Simpang Parung - BSD
		28	Parung - Kuripan
		31	Bojong Gede - Jembatan Hitam Ciluar
		32	Cibinong - Taman Pagelaran
		34	Bambu Kuning - Cibinong City Mall
		35	Cibinong - Bambu Kuning
		38	Citeureup - Simpang Nagrak
		40	Cileungsi - Serang
		40A	Cileungsi - Griya Alam Sentosa
		41	Pal Depok - Cibinong
		42	Cileungsi - Situsari
		43	Citeureup - Sukamakmur
		44	Citeureup - Babakan Madang
		45	Cileungsi - Perum Graha Prima
		49	Cileungsi - Bojong Kulur
		50	Laladon - Tenjolaya
		53	Laladon - Segog
		54	Leuwiliang - Parabakti
		55	Leuwiliang - Pangkalan Segog, Cigola
		56	Leuwiliang - Nanggung
		57	Leuwiliang - Puraseda
		59	Leuwiliang - Gunung Bunder
		60	Cileungsi - Pasir Tanjung
		64	Cibinong - Jonggol
		66	Cibinong - Perum Gunung Putri
		71	Terminal Cibinong - Kampung Bulak
		72	Terminal Cibinong - Kampung Sawah
		73	Citeureup - Lulut
		74	Citeureup - Nambo
		83	Stasiun Parung Panjang - Perum Griya
		90	Leuwiliang - Hamaro
		90A	Leuwiliang - Cisaranten
		92	Cileungsi - Bantar Gebang
		106	Parung - Lebak Bulus
		111	Parung - Citayam
		117	Pasar Parung - Terminal Bojong Gede
		121	Kampung Rambutan - Cileungsi
		121A	Kampung Rambutan - Ciangsana
		BL	Leuwiliang - Barengkok
			Laladon - Ciherang
			Pertigaan Cibatok - Pangkalan Segog
		T02	Cileungsi - Ciawi
		T02A	Ciawi - Citeureup
		T05	Cileungsi - Laladon
KOTA	AKD (Depok)	D01	Depok I - Stasiun Depok Baru

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
DEPOK		D02	Depok - Depok II Tengah
		D03	Terminal Depok - Parung
		D04	Terminal Depok - Kukusan
		D05	Terminal Depok - Bojonggede via Citayam
		D06	Depok - Simpangan
		D07	Terminal Depok - Citayam
		D08	Terminal Depok - Kampung Sawah
		D09	Terminal Depok - Kampung Sawah
		D10	Depok - Kampung Sawah
		D102	Parung Bingung - Pondok Labu
		D105	Terminal Depok - Pondok Labu
		D107	Cisalak - Leuwinanggung
		D11	Depok - Palsigunung
		D110	Depok - Cinere
		D112	Depok - Kampung Rambutan
		D114	Kel. Grogol - Ciputat
		D129	Mekarsari - Terminal Pasar Minggu
		D15	Terminal Depok - Simpangan Limo
		D26	Sawangan - Citayam
		D37	Kampung Rambutan - Simpangan Depok
		D61	Limo Cakra - Pasar Minggu
		D68	Leuwinanggung - Cibinong
		D69	Cisalak - Indomaret Sukatani
		D79	Cisalak - AURI - Leuwinanggung
		D83	Srengseng Sawah - Lenteng Agung
		D97	Simpang Cisalak - Cibubur
		P01	Cisalak - Cileungsi
BEKASI	KOASI	58	Cililitan - Perumnas 1
		G05	Curug - Pondok Gede
		K01	Terminal Bekasi - Perumnas III
		K01 ELF	Pulo Gadung - Terminal Bekasi (elf)
		K01A	Stasiun Bekasi - Cikarang (elf)
		K02	Terminal Bekasi - Pondok Gede
		K02B	Cileungsi - Komsen Jatiasih
		K03	Kranji - Perumnas Klender
		K04	Terminal Bekasi - Perumnas I
		K04B	Terminal Bekasi - Gabus
		K05	Terminal Bekasi - Cikunir
		K05A	Terminal Bekasi - Perum Taman Galaxy
		K07	Terminal Bekasi - Perumahan Seroja
		K09B	Metropolitan Mall - Perum Taman Wisma Asir
		K10	Terminal Bekasi - Ujung Harapan
		K11	Terminal Bekasi - Bantar Gebang
		K11A	Perumahan Rawalumbu - Setiakawan
		K11B	Perumahan Narogong - Setiakawan
		K12	Terminal Bekasi - Cerewed

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		K13	Bantar Gebang - Setu
		K14	Kampung Utan - Serang
		K15	Taruma Jaya - Pondok Ungu
		K15A	Terminal Bekasi - Pondok Ungu
		K16	Tambun - Tambelang
		K16BG	Terminal Bekasi - Graha Prima
		K16BV	Terminal Bekasi - Villa Bekasi Indah
		K16C	Terminal Bekasi - Griya Asri
		K17	Terminal Cikarang - Cibarusah
		K18	Cikarang - Sukatani
		K19	Terminal Bekasi - Mutiara Gading Timur
		K19A	Terminal Bekasi - Pasar Bumyagara
		K20	Sumber Arta - Perumnas Klender
		K22	Pondok Gede - Kalimalang
		K22A	Pulo Gebang - Pondok Gede
		K25B	Cakung - Perumnas Klender
			Ujung Aspal - Kampung Rambutan
		K29B	SGC Cikarang - Karangbahagia
		K30	Kranji - Perum Taman Harapan Indah
		K31	Kranji - Perum Harapan Baru
		K31A	Borobudur Plaza - Perum Harapan Jaya
		K32	Cikarang - Sukadanau
		K33	Lemah Abang - Lippo Cikarang
		K34	Terminal Bekasi - Rawa Kalong
		K34A	Terminal Bekasi - Bumi Sani
		K35	Delta Mas - Sukamahi
		K36	Terminal Bekasi - CBL (Regensi)
		K36A	Cikarang - CBL (Regensi)
		K38	Cikarang - Pule
		K39	Terminal Bekasi - Pasar Tambun
		K39B	Terminal Bekasi - Kompas
		K39C	Cibitung - Cikarang
		K40	Kampung Rambutan - Komsen
		K42	Cikarang - Pasir Gombang
		K43	Tol Bekasi Timur - Bantar Gebang
		K44	Kampung Rambutan - Komsen
		K45	Pulo Gadung - Rawa Kalong
		K45ELF	Bekasi Metropolitan Mall - Lippo Cikarang
		K50ELF	Terminal Bekasi - Lippo Cikarang
		K52	Cikarang - Tegal Danas
		K56 ELF	Cawang UKI - Cileungsi
		K57	Cikarang - Tambelang
		K59	Jababeka - Cililitan
		K61	Cibitung - Tegal Danas
		K64	Cikarang - Bojong
		K99A	Kawasan Jababeka - Stadion Wibawa Mukti

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		K99B	Kawasan Jababeka - Pasar Bersih Cikarang
		KCA	Pondok Gede - Kecapi
		KR	Kampung Rambutan - Kranggan
		S02	Pondok Gede - Sumber Arta
TANGERAN G	ANGKUTAN TANGERANG	A01A	Terminal Cimone - Daon
		A02	Terminal Cimone - Balaraja
		A03	Parung Panjang - Bitung
		A03A	RS An Nissa - Super Mall Lippo Karawaci
		A04	Terminal Cimone - Balaraja - Kronjo
		A06	Terminal Cimone - Tigaraksa
		A07	Terminal Balaraja - Curug
		B01	Cikokol - Cengkareng
		B02	Cikokol - Ciledug
		B04	Cikokol - BSD
		B07	Kalideres - Serpong - Muncul
		B09	Cikokol - Dadap
		B09A	Kalideres - Duta
		C01	Ciledug - Kebayoran Lama
		C02	Ciledug - Jombang
		C03	Ciledug - Puri Indah
		C04	Ciledug - Bintaro - Japos
		C05	Pondok Aren - Kebayoran Lama
		C10	Pondok Bahar - Rawa Buaya
		C11	Ciledug - Pondok Kacang
		C12	Kreo - Cipadu
		C13	Ciledug - Kebon Jeruk
		C15	Ciledug - Pasar Hipli Semanan
		D01	Kebayoran Lama - Ciputat
		D02	Pondok Labu - Ciputat
		D03	Ciputat - Bukit
		D06	Ciputat - Jombang
		D07	Ciputat - Muncul
		D08	Ciputat - BSD
		D09	Jagung - Gintung
		D10	Ciputat - Pondok Aren
		D12A	Ciputat - Terminal BSD
		D13	Ciputat - Reni Jaya
		D14	Ciputat - Pondok Benda
		D15	Pamulang - Lebak Bulus
		D16	BSD - Suradita
		D18	Ciputat - Ciledug
		D20	Serpong - Cicangkal
		D21	Terminal BSD - Jelupang
		D22	Ciledug - Bintaro
		D23	Pondok Cabe - Pondok Labu
		D26	Bintaro - Pamulang

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		D29	Ciputat - Parung
		E09	Pasar Kemis - Kemiri
		E10	Citra Raya - Pinang
		E12	Panongan - Citra Raya
			Kampung Melayu Tangerang - Pintu Air
		F02	Kalideres - Cadas
		F03	Tanjung Pasir - Bundaran Kamal
		F04	Kampung Melayu Tangerang - Tanjung Kait
		F05	Kampung Melayu Tangerang - Sepatan
		G01	Pasar Baru - Mauk
		G03	Kotabumi - Terminal Kalideres
		G05	Pasar Kemis - Tanjung Kait
		G07	Sangiang - Balaraja
		G08	Cikokol - Sangiang
		K05	Jati - Curug
		K07	Pasar Anyar - Selor
		K17	Terminal Poris Plawad - Kosambi
			Parung Panjang - Bunar
			Pasar Baru - Paku Haji
		R02	Terminal Cimone - Pasar Malabar
		R03	Kotabumi - Pasar Anyar
		R03A	Pasar Anyar - Serpong
		R04	Kedaung Wetan - Pintu Air
		R05	Pasar Anyar - Ampera
		R06	Pos - Legok
		R06A	Bojong Nangka - Cikokol
		R06B	Pasar Malabar - UMN
		R07	Pasar Malabar - Binong
		R08	Terminal Cimone - Pasar Kemis
		R10	Pasar Anyar - Cipondoh
		R11	Perumnas III - Pasar Anyar
		R13	Pos - Legok
		R14	Perumnas II - Cikokol
		R15A	Terminal Cimone - Kotabumi
		R15B	RS An Nissa - Kukun
		R19	Perum - Lippo - Gading Serpong
		RB11	Pasar Anyar - Cikokol
		S10	Ciputat - Pondok Betung
			Serpong - Prumpung
		T01	Terminal Poris Plawad - Bitung
		T02	Terminal Poris Plawad - Perum 1
		T03	Pasar Anyar - Cadas
		T14	Ciledug - Cipete - Cikokol
		T15	Ciledug - Kunciran
		T16	Serpong Pakulonan - Ciledug
DAERAH	TRANS HALIM	23	Cililitan - Dwikora

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
KHUSUS JAKARTA		108	Cililitan - Dirgantara
		156	Cililitan - Jengki
	TRANS PERSADA	T91	Kampung Rambutan - Wana Herang
		F03	Grogol - Balaraja
	APB	JP01	Pasar Baru - Kota
		JP03	Roxy - Bendungan Hilir
		JP03A	Karet - Roxy
		JP04	Salemba - Rawasari
		JS01	Kemandoran - Kostrad
		JS02A	Kalibata - Kampung Melayu
		JS03	Kalibata - Tongtek
		JT02	Rawamangun - Pangkalan Jati
		JT03	Perumnas Klender - Pupa
		JT04	Pisangan Baru - Kayu Manis
		JU01	Cilincing - Simpang Lima Semper
		JU01A	Permai Koja - Kalibaru
		JU02	Tanjung Priok - Pasar Embrio
		JU03	Tanjung Priok - Permai
		JU04	Tanjung Priok - Sunter
	TRANSBAJAJ		Bendungan Hilir - Pejompongan
			Manggarai - RSCM
	KWK	B01	Grogol - Muara Angke
		B02	Cengkareng - Kota
		B03	Citraland - Meruya
		B04	Kalideres - Cengkareng - Kebon Jeruk
		B06	Kota - Kapuk Kamal
		B07A	Citraland - Kamal Muara
		B08	Grogol - Rawa Buaya
		B09	Komplek Green Garden - Kreo
		B10	Taman Kota - Budi Luhur
		B11	Rawa Buaya - Kamal
		B17	Citraland Mal Ciputra - Kebayoran Lama
		S01	Taman Melawai - Pondok Labu
		S02	Lenteng Agung - Pondok Labu
		S03	Kebayoran Lama - Pondok Labu
		S05	Pasar Minggu - Rawajati
		S06	Pasar Mayestik - Pondok Aren
		S07	Pasar Kebayoran Lama - Pondok Aren
		S08	Lebak Bulus - Pondok Aren
		S10	Kebayoran Lama - Tanah Kusir
		S11	Pasar Minggu - Lebak Bulus
		S12C	Lebak Bulus - Sengseng Sawah
		S12C	Ragunan - Cipedak
		S14	Lebak Bulus - Petukangan Utara
		S15	Pasar Minggu - Cijantung
		S15A	Ragunan - TMII

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		S16	Depok - Pasar Pondok Labu
		T01	Cililitan - Bambu Apus
		T02	Cililitan - Cilangkap
		T03	Cililitan - Kampung Rambutan - Munjul
		T04	Ujung Aspal - PTR Asabri
		T05	Cililitan - Setu
		T06	Cililitan - Kampung Rambutan
		T07	Cililitan - Condet
		T08	Cililitan - Kampung Rambutan
		T09	Pasar Rebo - Kalisari
		T10	Cililitan - Perum Chandra
		T11	Cililitan - Mekarsari
		T12	Kampung Rambutan - Ciracas
		T13	Pasar Rebo - Taman Bunga
		T14	Cililitan - Setu
		T15	Cibubur - Pondok Ranggon
		T15A	Cililitan - Arundina
		T16	Pasar Rebo - Jambore Cibubur
		T17	Cililitan - Pinang Ranti
		T19	Depok - Kampung Rambutan
		T20	Terminal Pulo Gadung - Bekasi
		T20A	Pulo Gadung - Harapan Baru
		T21	Pulo Gadung - Kayu Tinggi
		T22	Pulo Gadung - Pulo Gebang
		T23	Pulo Gadung - Lampiri Kalimalang
		T25	Rawamangun - Terpadu Pulo Gebang
		T26	Rawamangun - Kalimalang
		T27	Rawamangun - Kalimalang Duren Sawit
		T28	Pulo Gadung - Rorotan
		T29	Terminal Pulo Gadung - Terpadu Pulo Gebang
		T30	Pulo Gadung - Ujung Menteng
		T31	Pulo Gadung - Pejuang Raya
		T32	Pulo Gadung - Terminal Pulo Gebang
		T33	Pulo Gadung - Harapan Jaya
		U01	Terminal Tanjung Priok - Terpadu Pulo Gebang
		U02	Semper - Cilincing - Rorotan
		U03	Terminal Tanjung Priok - Pulo Gebang
		U03A	Terminal Tanjung Priok - Pulo Gebang
		U04	Rawamangun - Kelapa Gading
		U05	Tanjung Priok - Cilincing
		U06	Tanjung Priok - Walang Baru
		U07	Tanjung Priok - IGI
		U08	Tanjung Priok - Semper
		U09	Tanjung Priok - Cilincing
		U10	Sunter - Kota
		U11	Muara Baru - Kapuk

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
	MIKROLET	U13	Artha Gading - Kelapa Gading
		M01	Kampung Melayu - Senen
		M01A	Kampung Melayu - Senen
		M02	Kampung Melayu - Pulo Gadung
		M04	Rawa Sari - Cililitan
		M06	Kampung Melayu - Gandaria
		M06A	Jatinegara - Gandaria Raya Bogor
		M08	Tanah Abang - Kota
		M09	Tanah Abang - Kebayoran Lama
		M09A	Tanah Abang - Kebayoran Lama
		M10	Tanah Abang - Jembatan Lima
		M11	Tanah Abang - Meruya
		M12	Pasar Senen - Kota
		M13	Kalideres - Kapuk
		M14	Tanjung Priok - Cilincing
		M15	Tanjung Priok - Kota
		M15A	Tanjung Priok - Kota
		M16	Pasar Minggu - Kampung Melayu
		M17	Pasar Minggu - Lenteng Agung
		M17A	Pasar Minggu - Jagakarsa
		M18	Kampung Melayu - Pondok Gede
		M19	Cililitan - Kranji
		M20	Pasar Minggu - Ciganjur
		M20A	Pasar Minggu - Cipedak
		M21	Pulo Gadung - Kampung Melayu
		M24	Grogol - Srengseng
		M25	Grogol - Kota
		M26	Kampung Melayu - Bekasi
		M27	Kampung Melayu - Pulo Gadung
		M28	Kampung Melayu - Pondok Gede
		M29	Cililitan - Perumnas Klender
		M31	Kampung Melayu - Pondok Kelapa
		M32	Kampung Melayu - Perumnas Klender
		M34	Kalibata - Manggarai
		M35	Pasar Senen - Pisangan Baru
		M36	Pasar Minggu - Jagakarsa
		M37	Pulo Gadung - Pasar Senen
		M38	Grogol - Bendungan Hilir
		M39	Pademangan - Kota
		M41	Grogol - Toko 3
		M42	Mampang - Ragunan
		M43	Grogol - Angke
		M44	Karet Tengsin - Kampung Melayu
		M45	Roxy - Pasar Kopro
		M48	Cengkareng - Cipulir
		M49	Tanjung Priok - Sunter

KOTA/KAB	PENGELOLA	NO. TRAYEK	RUTE TRAYEK
		M53	Pulo Gadung - Kota
		M56	Kampung Rambutan - Bojong Menteng

Daftar Trayek Bus Perkotaan

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
AGRA MAS		Bandara Soekarno-Hatta - PGC Cililitan
		Bogor - Lebak Bulus
		Bogor - Tanjung Priok
		Bekasi Timur - Poris Plawad
		Cikarang - Poris Plawad
		Grogol - Ciawi
		Kampung Rambutan - Bogor
		Senen - Bogor
		Senen - Ciawi
AJA P	106	Senen - Cimone
	AC119	Kampung Melayu - Cimone
		Balaraja - Bekasi
		Balaraja - Kampung Rambutan
		Tangerang - Bekasi
BIG BIRD	JR 3	BSD City - Thamrin City
	JR 5	Kota Wisata - Blok M
	JR 6	Legenda Wisata - Grogol
	JR 7	Kota Wisata - Grogol
DAMRI		Bandara Halim Perdanakusuma - Bogor
		Bekasi Timur - Bandara Soekarno-Hatta
		Blok M - Bandara Soekarno Hatta
		Bogor - Bandara Soekarno Hatta
		Cikarang - Bandara Soekarno-Hatta
		Gambir - Bandara Soekarno-Hatta
		Harapan Indah - Bandara Soekarno-Hatta
		Kampung Rambutan - Bandara Soekarno-Hatta
		Kemayoran - Bandara Soekarno-Hatta
		Lebak Bulus - Bandara Soekarno-Hatta
		Pasar Minggu - Bandara Soekarno-Hatta
		Rawamangun - Bandara Soekarno-Hatta
		Serpong - Bandara Soekarno-Hatta
		Tanjung Priok - Bandara Soekarno-Hatta
		Thamrin City - Bandara Soekarno-Hatta
AYA SENTOSA UTAMA	157	Senen - Palem Semi
HIBA UTAMA		Depok - Bandara Soekarno-Hatta
KOSUB BERSAMA		Bogor - Bekasi
		Cibinong - Kampung Rambutan
		Cibinong - Tanjung Priok
KRAMAT DJATI		Bogor - Bekasi
		Bogor - Tanjung Priok
LORENA		Bogor - Kampung Rambutan
	AC02	Kampung Rambutan - Kalideres
	AC05	Blok M - Bekasi (Via tol Bekasi Timur)
	AC05	Blok M - Bekasi (Via tol Bekasi Barat)
	AC05A	Blok M - Harapan Indah
	AC121	Blok M - Cikarang

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
MAYASARI BAKTI	AC121A	Blok M - Jababeka
	AC125	Kalideres - Cikarang
	AC132	Lebak Bulus - Bekasi Timur
	AC25	Tanjung Priok - Bekasi Barat
	AC29	Kalideres - Bekasi
	AC34	Blok M - Poris Plawad (Cimone)
	AC42	Tanjung Priok - Cileungsi
	AC42A	Kalideres - Cileungsi
	AC43	Grogol - Cibinong
	AC52	Tanah Abang - Bekasi Timur
	AC52A	Tanah Abang – Jatiasih
	AC70	Tanah Abang - Kampung Rambutan
	AC70A	Tanah Abang - Cileungsi
	AC73	Kampung Rambutan - Ciledug
	AC74A	Kampung Rambutan - Poris Plawad
	Transjabodetabek	Blok M - Cileungsi
	P9A	Senen - Bekasi Timur
	P9B	Kampung Rambutan - Bekasi Barat
	P9BC	Kampung Rambutan - Cikarang
	P9BT	Kampung Rambutan - Bekasi Timur
	P14	Tanjung Priok - Tanah Abang
	P50	Tanah Abang - Bekasi
	P17A	Kampung Rambutan- Senen
	JAC	Bandara Soekarno-Hatta - ITC Cempaka Mas
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Lotte Shopping Avenue
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Mall Kelapa Gading
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Mall Taman Anggrek
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Plaza Senayan
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Scientia Square Park
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Ciputra World Kuningan
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Mall Tamini Square
	JAC	Bandara Soekarno Hatta - Mall Pondok Indah
	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno-Hatta
	JAC	Bandara Soekarno-Hatta - Cileungsi
	300	Kota - Bundaran Senayan
	350	Manggarai - Bundaran Senayan
	351	Tebet - Bundaran Senayan
	601	Palmerah - Bundaran Senayan
	602	Pasar Senen - Bundaran Senayan
	603	Tanah Abang - Bundaran Senayan
	604	Tosari - Bundaran Senayan
	605	Juanda - Bundaran Senayan
	606	Gondangdia - Bundaran Senayan
	JRC	Cibinong City Mall - Grand Paragon
	JRC	Cibinong City Mall - Plaza Senayan
	JRC	Grand Wisata - Kuningan
	JRC	Grand Wisata - Gajah Mada
	JRC	Grand Wisata - Pondok Indah Mall

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
DAMRI	JRC	Grand Wisata - Harmoni
	JRC	Grand Central Bogor - Tebet
	JRC	Grand Central Bogor - Juanda
	JRC	Grand Central Bogor - Manggarai
	JRC	Grandhika City Jatiwarna - Gandaria City
	JRC	Grandhika City Jatiwarna - Mall Ciputra Grogol
	JRC	Grandhika City Jatiwarna - Monas
	JRC	Grandhika City Jatiwarna - Plaza Senayan
	JRC	LRT City Bekasi - Grand Paragon
	JRC	LRT City Bekasi - Sunter Mall
	JRC	LRT City Bekasi - Kuningan City
	JRC	Mega City Bekasi - Plaza Senayan
	JRC	SDC - MRT Lebak Bulus
	JRC	Sentul City - Blok M
	Feeder Kereta Bandara	Stasiun Sudirman - Blok M
	Feeder Kereta Bandara	Stasiun Sudirman - Stasiun Gambir
	JRC	Tamansari Persada Bogor - Blok M
	JRC	Tamansari Persada Bogor - Juanda
	Transjabodetabek	Tangcity Mall - ITC Kuningan
	Transjabodetabek	Terminal Poris Plawad - Kemayoran
		Tanjung Priok - Leuwiliang
		Bogor - Bekasi Timur
		Bogor - Blok M
		Bogor - Rawamangun
		Grogol - Bogor
		Sentul - Blok M
		Tanah Abang - Ciawi
		Blok M - Galaxi Bekasi
	1	Poris Plawad - GOR Jatiuwung
	TP-1	Terminal Bekasi - Harapan Indah
	1	Blok M - Kota
	1A	Balai Kota - PIK
	1B	Stasiun Palmerah - Tosari
	1C	Blok M - Pesanggrahan
	DA1	Dukuh Atas - Sam Ratulangi
	1E	Pondok Labu - Blok M
PRIMAJASA	EV1	Blok M - Balai Kota
		Kampung Rambutan - Balaraja
		Tanjung Priok - Leuwiliang
SINAR JAYA	1F	Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan
	GR1	Harmoni - Bundaran Senayan
	1H	Stasiun Tanah Abang - Stasiun Gondangdia
	JAK1	Plumpang - Tanjung Priok
	1K	Cibubur - Blok M
	1M	Meruya - Blok M
	M1	Blok M - Kota
TRANS GALAXY	MR1	Blok M - Pakubuwono
ANS KOTA TANGERA	1N	Tanah Abang - Blok M

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
TRANS PATRIOT	1P	Terminal Senen - Bundaran Senayan
	1Q	Blok M - Rempoa
	1R	Terminal Senen - Stasiun Tanah Abang
	1T	Cibubur - Kota
	1U	TMII - Balaikota
	1V	Lebak Bulus - Bundaran HI
	W1	Pelabuhan Sunda Kelapa - Kota
	2	Pulo Gadung - Harmoni
	2A	Pulo Gadung - Rawa Buaya
	2B	ASMI - Harapan Indah
	2D	Kalideres - ASMI
	DA2	Dukuh Atas - Tanah Abang
	2E	Rusun Rawa Bebek - Pakin
	2F	Rusun Cakung Barat - Pulo Gadung
	2H	Rusun Jati Rawasari - Senen
	JAK2	Duren Sawit - Kampung Melayu
	2K	JGC - Harapan Indah
	L2	Pulo Gadung - Harmoni via Pramuka
	M2	Pulo Gadung - Harmoni
	MR2	Blok M - Kramat Pela
	3	Kalideres - Pasar Baru
	3A	Rusun Pesakih - Kalideres
	3B	Rusun Flamboyan - Kalideres
	BW3	Bus Wisata 3 Kesenian dan Kuliner
	3C	Rusun Kapuk Muara - Penjaringan
	3D	Penjaringan - Rawa Buaya
	DA3	Dukuh Atas - Kuningan
	3E	Sentraland Cengkareng - Puri Kembangan
	3F	Kalideres - Gelora Bung Karno
	JAK3	Pondok Labu - Lebak Bulus
	M3	Kalideres - Pasar Baru
	MR3	Blok M - Wijaya
	4	Pulo Gadung 2 - Tosari
	4A	TU Gas - Jelambar
	4B	Stasiun Manggarai - Universitas Indonesia
	4C	TU Gas - Bundaran Senayan
	4D	Pulo Gadung - Patra Kuningan
	DA4	Dukuh Atas - Kota
	4E	Pulo Gadung - Rusun Jatinegara Kaum
	4F	Pulo Gadung - Pinang Ranti
	GR4	Taman Kota Intan - Museum Bahari
	4H	Pulo Gadung 2 - Ragunan
	JAK4	Grogol - Jembatan Dua
	4K	Pulo Gadung 2 - Blok M
	L4	PGC 2 - Tosari
	M4	Pulo Gadung 2 - Tosari
	4M	Pulo Gadung - Kota
	5	Kampung Melayu - Ancol

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
	5A	Kampung Melayu - Grogol 1
	5B	Stasiun Tebet - Bidara Cina
	BW5	Bus Wisata 5 Wisata RPTRA
	5C	PGC 1 - Harmoni
	5D	PGC 1 - Ancol
	5E	Kampung Rambutan - Ancol
	5F	Kampung Melayu - Tanah Abang
	GR5	Kota Tua Explorer
	5H	Harmoni - Ancol
	JAK5	Semper - Rorotan
	5K	Kampung Melayu - Kota
	5M	Kampung Melayu - Tanah Abang (via Cikini)
	M5	Ancol - PGC 1
	MR5	Stasiun MRT Blok A - Radio Dalam
	5N	Kampung Melayu - Ragunan
	6	Ragunan - Tosari
	6A	Ragunan - Monas via Kuningan
	6B	Ragunan - Monas via Semanggi
	BW6	Bus Wisata 6 Makam Mbah Priok
	6C	Stasiun Tebet - Karet via Patra Kuningan
	6D	Stasiun Tebet - Karet via Underpass
	6E	Stasiun Tebet - Karet via Mega Kuningan
	6F	Stasiun Manggarai - Ragunan
	6H	Lebak Bulus - Senen
	JAK6	Kampung Rambutan - Pondok Gede
	6M	Stasiun Manggarai - Blok M
	M6	Ragunan - Harmoni
	6N	Ragunan - Blok M
	6P	Cibubur - Kuningan
	6Q	Epicentrum - Kasablanca
	6R	Ragunan - St. MRT Fatmawati
	7	Kampung Rambutan - Kampung Melayu
	7A	Kampung Rambutan - Lebak Bulus
	7B	Kampung Rambutan - Blok M
	BW7	Bus Wisata 7 Belanja Jakarta
	7C	Cibubur - BKN
	7D	Cawang UKI - TMII
	7E	Kampung Rambutan - Ragunan
	7F	Kampung Rambutan - Harmoni (via Cempaka Putih)
	JAK7	Tanah Abang - Tawakal
	L7	Kp. Rambutan - Kp. Melayu via Tol Tanah Merdeka
	7M	Kampung Rambutan - Pulo Gadung 2
	M7	Kampung Rambutan - Harmoni
	7N	Gandaria - Kampung Rambutan
	7P	Pondok Kelapa - BKN
	8	Lebak Bulus - Harmoni
	8A	Grogol 2 - Harmoni
	8C	Tanah Abang - Kebayoran Lama

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
TRANSJAKARTA	8D	Joglo - Blok M
	8E	Bintaro - Blok M
	JAK8	Roxy - Benhil (via Tanah Abang)
	8K	Tanah Abang - Batusari
	M8	Lebak Bulus - Harmoni
	MR8	Stasiun MRT Blok A - Pangeran Antasari
	9	Pinang Ranti - Pluit
	9A	PGC 2 - Pluit
	9B	Pinang Ranti - Kota
	9C	Pinang Ranti - Bundaran Senayan
	9D	Pasar Minggu - Tanah Abang
	9E	Kebayoran Lama - Jelambar
	9F	Rusun Tambora - Pluit
	9H	Cipedak - Blok M
	JAK9	Roxy Mas - Karet
	9K	Kampung Rambutan - Grogol 2
	9M	Pinang Ranti - Halimun
	M9	Pinang Ranti - Pluit
	MR9	South Quarter - Lebak Bulus
	10	Tanjung Priok - PGC 2
	10A	Tanjung Priok - Rusun Marunda
	10B	Penas Kalimalang - Rusun Cipinang Besar Selatan
	10C	Tanjung Priok - Pelabuhan Tanjung Priok
	10D	Tanjung Priok - Kampung Rambutan
	10F	Sunter Kelapa Gading - St. LRT Pegangsaan Dua
	10H	Tanjung Priok - Blok M
	JAK10	Tanah Abang - Kota
	10K	Tanjung Priok - Senen (via Taman BMW)
	L10	PGC 2 - Tanjung Priok
	M10	PGC 2 - Tanjung Priok
	11	Pulo Gebang - Kampung Melayu
	11A	Pulo Gebang - Rawamangun
	B11	Summarecon Bekasi - Tosari
	11B	Rusun Rawa Bebek - Penggilingan
	11C	Rusun Pinus Elok - Rusun Pulo Gebang
	D11	Depok - BKN
	11D	Pulo Gebang - Pulo Gadung Via PIKPTC
	JAK11	Tanah Abang - Kebayoran Lama
	11K	Rusun Komarudin - Penggilingan
	M11A	Pulo Gebang - Pulo Gadung 1
	11M	Rusun Rawa Bebek - Bukit Duri
	11N	Rusun Cipinang Muara - Jatinegara
	11P	Rusun Pondok Bambu - Walikota Jakarta Timur
	11Q	Pulo Gebang - BKT - Kampung Melayu
	11R	Rusun Cakung KM 2 - Bukit Duri
	S11	BSD - Jelambar
	11T	Pulo Gebang - Stasiun Cakung
	T11	Poris Plawad - Bundaran Senayan

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
	11U	Pulo Gebang - Stasiun Cakung (via Cilincing)
	11V	Pulo Gebang - Pasar Baru
	12	Penjaringan - Sunter Kelapa Gading
	12A	Kaliadem - Kota
	B12	Summarecon Bekasi - Tanjung Priok
	12B	Pluit - Senen
	12C	Rusun Waduk Pluit - Penjaringan
	12D	Rusun Sukapura - Sunter
	12E	History of Jakarta Explorer
	12F	Rusun Waduk Pluit - Rusun Marunda
	12H	Rusun Penjaringan - Penjaringan
	JAK12	Tanah Abang - Kebayoran Lama (via Pos Pengumben)
	12K	Asemka Explorer
	12M	Sunter Boulevard Barat - Harmoni
	S12	BSD - Fatmawati
	T12	Poris Plawad - Juanda
	13	Puri Beta - Tendea
	13A	Puri Beta - Blok M
	B13	Bekasi Barat - Blok M
	13B	Puri Beta - Pancoran Barat
	13C	Puri Beta - Dukuh Atas
	13D	Puri Beta - Ragunan
	13E	Puri Beta - Kuningan
	13F	Puri Beta - Kampung Melayu
	JAK13	Tanah Abang - Kota Intan via Jembatan Lima
	B14	Bekasi Barat - Kuningan
	JAK14	Tanah Abang - Meruya
	B15	Jatibening - Blok M
	JAK15	Tanjung Priok - Bulak Turi
	B16	Jatibening - Kuningan
	JAK16	PGC - Condet
	JAK17	Pulo Gadung - Senen
	JAK18	Stasiun Kalibata - Kuningan
	JAK19	Pinang Ranti - Setu
	JAK20	Lubang Buaya - Cawang UKI
	B21	Bekasi Timur - Grogol 2
	D21	Universitas Indonesia - Lebak Bulus
	JAK21	PGC - Dwikora
	S21	Ciputat - Tosari
	B22	Bekasi Timur - Juanda
	JAK22	Penas Kalimalang - Dwikora
	S22	Ciputat - Kampung Rambutan
	B23	Bekasi Timur - Manggarai
	B24	Bekasi Timur - Kalideres
	JAK24	Senen - Pulo Gadung (via Kelapa Gading)
	JAK25	Kalisari - Pasar Rebo
	JAK26	Duren Sawit - Rawamangun
	JAK27	Rorotan - Pulo Gebang

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
	JAK28	Pasar Rebo - Taman Wiladatika
	JAK29	Tanjung Priok - Rusun Sukapura
	JAK30	Citraland - Meruya
	D31	Cinere - Kuningan
	JAK31	Pondok Labu - Blok M
	S31	Bintaro - Fatmawati
	JAK32	Petukangan - Lebak Bulus
	JAK33	Pulo Gadung - Kota
	JAK34	Rawamangun - Klender
	JAK35	Rawamangun - Pangkalan Jati
	JAK36	Cilangkap - Cililitan
	JAK37	Cililitan - Condet (via Kayu Manis)
	JAK38	Bulak Ringin - Kampung Rambutan
	JAK39	Duren Sawit - Kalimalang
	JAK40	Pulo Gebang - Taman Harapan Baru
	JAK41	Kampung Melayu - Pulo Gadung
	S41	Pondok Cabe - Tanah Abang
	JAK42	Kampung Melayu - Pondok Kelapa
	JAK43	Tongtek - Cililitan
	JAK44	Andara - Lenteng Agung
	JAK45	Ragunan - Lebak Bulus
	JAK46	Pasar Minggu - Jagakarsa
	JAK47	Ciganjur - Terminal Pasar Minggu
	JAK49	Lebak Bulus - Cipulir
	JAK50	Kalideres - Puri Kembangan
	JAK51	Taman Kota - Budi Luhur
	JAK52	Kalideres - Muara Angke
	JAK53	Grogol - Pos Pengumben via Slipi
	JAK54	Grogol - Benhil
	JAK56	Grogol - Srengseng
	JAK58	Cilincing - Rorotan
	JAK59	Rawamangun - Rawa Sengon
	JAK60	Kelapa Gading - Rusun Kemayoran
	JAK61	Pulo Gadung - Cempaka Putih
	JAK64	Lenteng Agung - Aselih
	JAK71	Kampung Rambutan - Pinang Ranti
	JAK72	Kampung Rambutan - Pasar Rebo
	JAK73	Jambore Cibubur - Pasar Rebo
	JAK74	Term. Rawamangun - Cipinang Muara
	JAK75	Kampung Pulo - Halim (via Cililitan)
	JAK77	Tanjung Priok - Jembatan Hitam
	JAK80	Rawa Buaya - Rawa Kompeni
	JAK84	Kampung Melayu - Kapin Raya
	JAK85	Bintara - Cipinang Indah
	JAK112	Pulo Gadung - Tanah Merah
	JAK117	Tanjung Priok - Tanah Merdeka
	TRS1	Kalideres - Juanda
	TRS2	Poris Plawad - Blok M

PENGELOLA BUS	TRAYEK	RUTE TRAYEK
	TRS4	Cibubur - Blok M
	TRS5	Depok - Kampung Melayu - RSUD Kemayoran
	TRS6	Bogor - Jatinegara RS Premier
	TRS7	Bulak Kapal - Blok M
	TRS8	Bekasi Timur - RSUD Tebet
	TRS13	Bulak Kapal - RSUD Taman Sari
	TRS15	Bekasi Selatan - RS Duren Sawit - RS Mitra Keluarga Kemayoran

Lampiran VII
Panjang Jalan Rel Kereta Api Perkotaan
Tahun 2024

Panjang Rel Kereta Api Perkotaan

Panjang Rel Kereta Commuter Line

No	Jalur/Rute	Panjang (Km)
1	Bogor – Jakarta Kota	54,516
2	Citayam - Nambo	16,237
3	Manggarai – Kampung Bandan	14,990
4	Manggarai – Cikarang	39,195
5	Kampung Bandan - Jatinegara	10,386
6	Jakarta Kota - Tanjung Priok	7,374
7	Duri - Tangerang	19,297
8	Tenjo - Tanah Abang	48,151
9	Cikarang - Kedung Gedeh	11,771
10	Ancol - Rajawali	3,629
11	Bogor - Cigombong	19,662
	Total	245,208

Panjang Rel Kereta Light Rapid Transit

No	Jalur/Rute	Panjang (Km)
1	Cawang – Cibubur	14,890
2	Cawang – Dukuh Atas	11,050
3	Cawang – Bekasi Timur	18,490
4	Pegangsaan Dua - Velodrome	5,800
	Total	50,23

Panjang Rel Kereta Mass Rapid Transit

No	Jalur/Rute	Panjang (Km)
1	Lebak Bulus – Bundaran HI	15,700
2	Bundaran HI – Kota	5,800
	Total	21,5

Mengetahui,
Kasubdit Prasarana Transportasi
Pekeretaapian

Batara
NIP. 198108102005021001

Lampiran VIII
Daftar Integrasi Simpul Transportasi
Tahun 2024

Integrasi Simpul Utama di Jabodetabek

No	Simpul**)	moda	Radius***)	Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
1	Dukuh Atas	1. Stasiun Sudirman; 2. Stasiun BNI City; 3. Stasiun MRTJ Dukuh Atas; 4. Stasiun LRT Dukuh Atas (Jabodebek); 5. Halte Transjakarta Dukuh Atas 1; 6. Halte Transjakarta Dukuh Atas 2.	405 m	6	Sebagian Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2023	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
2	Jakarta Kota	1. Stasiun Jakarta Kota (transit); 2. Stasiun MRT Kota; 3. Halte Transjakarta Jakarta Kota 4. Terminal Tipe B Jakarta Kota	700 m	4	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
3	Grogol	1. Stasiun Grogol 2. Halte Transjakarta Latumeten Stasiun Grogol 3 Terminal Tipe B Grogol	530m	3	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
4	Tanjung Priok 1	1. Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Terminal Tipe A Tanjung Priok; 3. Stasiun Tanjung Priok.	600 m	3	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
5	Cawang Cikoko	1. Stasiun Cawang 2. Stasiun LRT Cawang Cikoko (Jabodebek) 3. Halte Transjakarta Cikoko St. Cawang	215 m	3	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2023	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
6	Kebayoran	1. Stasiun Kebayoran; 2. Halte Transjakarta Pasar Lama Kebayoran; 3. Halte Transjakarta Kebayoran Baru Velbak 2.	370 m	3	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
7	Jatinegara	1. Stasiun Jatinegara (transit); 2. Halte Transjakarta Jatinegara 2; 3. Halte Transjakarta Pasar Jatinegara.	445 m	3	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
8	Istora	1. Stasiun MRTJ Istora 2. Halte Transjakarta Gelora Bung Karno 3. Halte Transjakarta Polda Metro Jaya	370 m	3	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
9	Halim	1. Stasiun KCJB Halim 2. Stasiun LRT Halim (Jabodebek) 3. Bandara Halim Perdanakusuma	2,13 km	3	Sebagian Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019 2018 - 2021 2020 - 2025	Sistem dan simpul terpadu Fasilitas integrasi BRT Terintegrasi
10	Bogor	1. Stasiun Bogor 2. Stasiun Bogor Paledang 3. Terminal Tipe C Merdeka (sudah alihfungsi menjadi pasar)	555 m	3	Belum Terhubung	Kota Bogor	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar. 3. Pemda Kota Bogor	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2020 - 2022 2018 - 2019 2018 - 2024	park and ride integrasi moda pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
11	Kampung Rambutan	1. Terminal Tipe A Kampung Rambutan (Jabodebek); 2. Stasiun LRT Kampung Rambutan.	320 m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2023	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
12	Manggarai	1. Stasiun Manggarai (transit); 2. Terminal Tipe B Manggarai.	310 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2023	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
13	Juanda	1. Stasiun Juanda 2. Halte Transjakarta Juanda	150 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
14	Pasar Minggu	1. Stasiun Pasar Minggu; 2. Terminal Tipe B Pasar Minggu.	185 m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
15	Taman Kota	1. Stasiun Taman Kota 2. Halte Transjakarta Taman Kota	190m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
16	Sawah Besar 2	1. Stasiun MRTJ Sawah Besar 2. Halte Transjakarta Sawah Besar	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m Hasil monitoring Subdit Integrasi		

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)		Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
17	Mangga Besar 2	1. Stasiun MRTJ Mangga Besar 2. Halte Transjakarta Mangga Besar	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
18	Angke 2	1. Pelabuhan Muara Angke 2. Terminal Tipe B Muara Angke	570 m	2	Belum Terhubung		1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
19	Kampung Bandan	1. Stasiun Kampung Bandan 2. Stasiun MRTJ Kampung Bandan	0 m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
20	KRL Pasar Senen	1. Stasiun Pasar Senen 2. Terminal Tipe B Pasar Senen	280 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile	Terhubung dengan trotoar seadanya	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
21	Matraman	1. Stasiun Matraman 2. Halte Transjakarta Matraman Baru	140 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
22	Klender 1	1. Stasiun Klender 2. Halte Transjakarta Klender	85 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
23	Lebak Bulus	1. Stasiun MRTJ Lebak Bulus 2. Terminal Tipe B Lebak Bulus	300 m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023	park and ride
24	Blok M	1. Stasiun MRTJ Blok M 2. Terminal Tipe B Blok M	245 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023	park and ride
25	Sisingamaraja	1. Stasiun MRTJ ASEAN 2. Halte Transjakarta CSW	110 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
26	Senayan	1. Stasiun MRTJ Senayan 2. Halte Transjakarta Bundaran Senayan	215 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
27	Bundaran HI	1. Stasiun MRTJ Bundaran HI 2. Halte Transjakarta Bundaran HI	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
28	Sarinah	1. Stasiun MRTJ Sarinah 2. Halte Transjakarta MH Thamrin	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
29	Monas	1. Stasiun MRTJ Monas 2. Halte Transjakarta Monas	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
30	Harmoni	1. Stasiun MRTJ Harmoni 2. Halte Transjakarta Harmoni	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
31	Glodok	1. Stasiun MRTJ Glodok 2. Stasiun Transjakarta Glodok	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
32	Cawang	1. Stasiun LRT Cawang (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta BNN	235 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
33	Ciliwung	1. Stasiun LRT Ciliwung (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta Cawang Ciliwung	30 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
34	Pancoran	1. Stasiun LRT Pancoran (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta Pancoran Barat	50 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
35	Kuningan	1. Stasiun LRT Kuningan (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta Departemen Kesehatan	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
36	Rasuna Said	1. Stasiun LRT Rasuna Said (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta GOR Soemantri	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
37	Setiabudi	1. Stasiun LRT Setiabudi (Jabodebek) 2. Halte Transjakarta Setiabudi Utara Aini	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
38	Velodrome	1. Stasiun LRT Velodrome (Jakarta) 2. Halte Transjakarta Pemuda Rawamangun	145 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023	park and ride

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)		Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
39	Pulo Mas	1. Stasiun LRT Pulo Mas (Jakarta) 2. Halte Transjakarta Pulo Mas	315 m	2	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	perlu dilakukan relokasi halte trotoar terputus	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
40	Bekasi Timur	1. Terminal Tipe A Bekasi 2. Stasiun Bekasi Timur	585 m	2	Belum Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar.	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
41	Cibinong	1. Stasiun Cibinong 2. Terminal Tipe C Cibinong	425 m	2	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar; 3. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
42	Bojong Gede	1. Stasiun Bojonggede 2. Terminal Tipe C Bojonggede	275 m	2	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar; 3. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
43	Poris Plawad	1. Terminal Tipe A Poris Plawad 2. Stasiun Batu Ceper	155 m	2	Belum Terhubung	Kota Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2021	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
44	Soekarno - Hatta	1. Bandara Internasional Soekarno Hatta 2. Stasiun KA Bandara Soekarno Hatta	0 m	2	Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
45	Pulogebang	1. Terminal Tipe A Pulo Gebang	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023	park and ride
46	Pulogadung	1. Terminal Tipe B Pulogadung;	0m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
47	Kalideres 1	1. Terminal Tipe A Kalideres	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023	park and ride
48	Kalideres 2	1. Stasiun Kalideres	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
49	Duren Kalibata	1. Stasiun Duren Kalibata	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
50	Tebet	1. Stasiun Tebet	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
51	Palmerah	1. Stasiun Palmerah	0 m	3	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
52	Tanah Abang	1. Stasiun Tanah Abang (transit)	0 m	4	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2021 2020 - 2024	fasilitas integrasi BRT pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
53	Cikini	1. Stasiun Cikini	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
54	Karet	1. Stasiun Karet	0 m	4	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
55	Pesing	1. Stasiun Pesing	0 m	2	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
56	Bojong Indah	1. Stasiun Bojong Indah	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
57	Rawa Buaya	1. Stasiun Rawa Buaya	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
58	Universitas Pancasila	1. Stasiun Universitas Pancasila	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
59	Lenteng Agung	1. Stasiun Lenteng Agung	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
60	Tanjung Barat	1. Stasiun Tanjung Barat	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
61	Pasar Minggu Baru	1. Stasiun Pasar Minggu Baru	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
62	Gondangdia	1. Stasiun Gondangdia	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi		
63	Sawah Besar 1	1. Stasiun Sawah Besar	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
64	Mangga Besar 1	1. Stasiun Mangga Besar	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi		

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)	Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
65	Jayakarta	1. Stasiun Jayakarta	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
66	Duri	1. Stasiun Duri (Transit)	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
67	Angke 1	1. Stasiun Angke	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile	dibuat terpisah karena jarak lebih dari 800m	Hasil monitoring Subdit Integrasi	
68	Ancol	1. Stasiun Ancol	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
69	Rajawali	1. Stasiun Rajawali	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
70	Kemayoran	1. Stasiun Kemayoran	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
71	Gang Sentiong	1. Stasiun Gang Sentiong	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
72	Kramat	1. Stasiun Kramat	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
73	Pondok Jati	1. Stasiun Pondok Jati	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
74	Buaran	1. Stasiun Buaran	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
75	Klender 2	1. Terminal Tipe B Klender	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
76	Klender Baru	1. Stasiun Klender Baru	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
77	Cakung	1. Stasiun Cakung	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
78	Fatmawati	1. Stasiun MRTJ Fatmawati	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023
79	Cipete	1. Stasiun MRTJ Cipete	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023
80	Haji Nawi	1. Stasiun MRTJ Haji Nawi	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023
81	Blok A	1. Stasiun MRTJ Blok A	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2023
82	Bendungan Hilir	1. Stasiun MRTJ Bendungan Hilir	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
83	Setiabudi	1. Stasiun MRTJ Setiabudi	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
84	Ciracas	1. Stasiun LRT Ciracas (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
85	Taman Mini	1. Stasiun LRT Taman Mini (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
86	Equistrian	1. Stasiun LRT Equistrian (Jakarta)	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
87	Boulevard Selatan	1. Stasiun LRT Boulevard Selatan (Jakarta)	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
88	Boulevard Utara	1. Stasiun LRT Boulevard Utara (Jakarta)	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
89	Pegangsaan Dua	1. Stasiun LRT Pegangsaan Dua (Jakarta)	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
90	Tanjung Pasir	1. Pelabuhan Tanjung Pasir	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Banten; 3. Pemda Kab. Tangerang.	Last Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2024
											Rencana Induk dan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pasir

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)	Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
91	Muara Gombong	1. Pelabuhan Muara Gombong	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar; 3. Pemda Kab. Bekasi.	Last Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke
92	Kranji	1. Stasiun Kranji	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
93	Bekasi	1. Stasiun Bekasi	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2023 2018 - 2023	park and ride pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
94	Tambun	1. Stasiun Tambun	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
95	Cibitung	1. Stasiun Cibitung	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
96	Cikarang 1	1. Stasiun Cikarang	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar.	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2020 - 2024	pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
97	Cikarang 2	1. Terminal Tipe B Cikarang	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar.	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi; opendata.jabarprov.go.id (2023)		
98	Jatibening Baru	1. Stasiun LRT Jatibening Baru (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
99	Cikunir 1	1. Stasiun LRT Cikunir 1 (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		park and ride
100	Cikunir 2	1. Stasiun LRT Cikunir 2 (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
101	Bekasi Barat	1. Stasiun LRT Bekasi Barat (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		park and ride
102	Jatimulya	1. Stasiun LRT Jatimulya (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
103	Jatijajar	1. Terminal Tipe A Jatijajar	0 m	1	Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
104	Depok	1. Stasiun Depok	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
105	Depok Baru	1. Stasiun Depok Baru	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
106	Pondok Cina	1. Stasiun Pondok Cina	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
107	Universitas Indonesia	1. Stasiun Universitas Indonesia	0 m	1	Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
108	Harjamukti	1. Stasiun LRT Harjamukti (Jabodebek)	0 m	1	Terhubung	Kota Depok	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2021 2018 - 2019 2020 - 2024	fasilitas integrasi BRT integrasi moda pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
109	Baranangsiang	1. Terminal Tipe A Baranangsiang	0 m	1	Terhubung	Kota Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2019 - 2021 2018 - 2023	park and ride pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu
110	Cilebut	1. Stasiun Cilebut	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
111	Nambo	1. Stasiun Nambo	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
112	Pondok Rajeg	1. Stasiun Pondok Rajeg	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2027	park and ride
113	Citayam	1. Stasiun Citayam (transit)	0 m	1	Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2027	park and ride
114	Cilejit	1. Stasiun Cilejit	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
115	Parung Panjang	1. Stasiun Parung Panjang	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan; 2. Pemda Jabar; 3. Pemda Kab. Bogor	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
116	Tenjo	1. Stasiun Tenjo	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)	Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
117	Poris	1. Stasiun Poris	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
118	Tanah Tinggi	1. Stasiun Tanah Tinggi	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
119	Tangerang	1. Stasiun Tangerang	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
120	Cisauk	1. Stasiun Cisauk	0 m	1	Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019 2018 - 2019	park and ride integrasi moda
121	Cicayur	1. Stasiun Cicayur	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
122	Daru	1. Stasiun Daru	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019	integrasi moda
123	Tigaraksa	1. Stasiun Tigaraksa	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi	2018 - 2019 2018 - 2019	park and ride integrasi moda
124	Pondok Cabe	1. Terminal Tipe A Pondok Cabe	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
125	Cikoya	1. Stasiun Cikoya	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Tangerang	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
126	Pondok Ranji	1. Stasiun Pondok Ranji	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
127	Jurangmangu	1. Stasiun Jurangmangu	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
128	Sudimara	1. Stasiun Sudimara	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
129	Rawa Buntu	1. Stasiun Rawa Buntu	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
130	Serpong	1. Stasiun Serpong	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
131	Cigombong	1. Stasiun Cigombong	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
132	Maseng	1. Stasiun Maseng	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
133	Batu Tulis	1. Stasiun Batu Tulis	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Kementerian Perhubungan;	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
134	Cililitan	1. Terminal Tipe B Cililitan	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
135	Kampung Melayu	1. Terminal Tipe B Kampung Melayu	0 m	1	Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
136	Pinang Ranti	1. Terminal Tipe B Pinang Ranti	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
137	Ragunan	1. Terminal Tipe B Ragunan	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	Hybrid	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
138	Rawamangun	1. Terminal Tipe B Rawamangun	0 m	1	Belum Terhubung	DKI Jakarta	1. Pemda DKI Jakarta.	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi		
139	Leuwiliang	1. Terminal Tipe B Leuwiliang	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Jabar; 2. Pemda Kab. Bogor	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi; opendata.jabarprov.go.id (2023)		
140	Cileungsi	1. Terminal Tipe B Cileungsi	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Jabar; 2. Pemda Kab. Bogor	First Mile	Hasil monitoring Subdit Integrasi; opendata.jabarprov.go.id (2023)		

Simpul Transportasi Jabodetabek*)

No	Simpul**)	moda	Radius***)	Status ****)	Wilayah Administrasi	Kewenangan	Kriteria Simpul	Keterangan	Sumber	Timeline Pembangunan RITJ	Jenis Fasilitas Integrasi
141	Laladon	1. Terminal Tipe C Laladon	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, 2023	
142	Parung	1. Terminal Tipe B Parung	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Jabar; 2. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; opendata.jabarprov.go.id , 2023)	
143	Ciawi	1. Terminal Tipe B Ciawi	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Jabar; 2. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; opendata.jabarprov.go.id , 2023)	
144	Jasinga	1. Terminal tipe c Jasinga	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bogor	1. Pemda Kab. Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, 2023	
145	Bubulak	1. Terminal Tipe C Bubulak	0 m	1	Terhubung	Kota Bogor	1. Pemda Kota Bogor	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
146	Kayuringin	1. Terminal Tipe C Kayuringin	0 m	1	Terhubung	Kota Bekasi	1. Pemda Kota Bekasi	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2023	
147	BSD Sektor 1	1. Terminal Tipe C BSD	0 m	1	Terhubung	Kota Tangerang Selatan	1. Pemda Kota Tangerang Selatan	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan	
148	Cimone	1. Terminal Tipe C Cimone	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Tangerang	1. Pemda Kota Tangerang	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
149	Cibodas	1. Terminal Tipe C Cibodas	0 m	1	Belum Terhubung	Kota Tangerang	1. Pemda Kota Tangerang	First Mile		Hasil monitoring Subdit Integrasi	
150	Sukatani	1 Terminal Tipe C Sukatani	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Pemda Kabupaten Bekasi	First Mile	beralih fungsi menjadi parkir	Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. 2023	
151	Tambelang	1. Terminal Tipe C Tambelang	0 m	1	Belum Terhubung	Kabupaten Bekasi	1. Pemda Kabupaten Bekasi	First Mile	beralih fungsi menjadi parkir	Hasil monitoring Subdit Integrasi; Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. 2023	

56.29%

Catatan:

*) Data Simpul Transportasi merupakan kompilasi data hasil monitoring yang dilakukan oleh Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi, yang dilengkapi dengan data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait

**) Simpul transportasi meliputi stasiun (Stasiun besar, stasiun sedang, dan stasiun kecil), pelabuhan (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan), bandar udara (bandar udara pengumpul primer, bandar udara pengumpul sekunder, dan bandar udara pengumpan), serta terminal (terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C) yang berlokasi di wilayah Jabodetabek

***) Radius diukur dari jarak dari poros simpul moda transportasi (simpul moda transportasi yang terletak di tengah) ke simpul moda transportasi terluar

****) Simpul yang termasuk dalam kategori terhubung adalah simpul yang memiliki angkutan lanjutan dan jalur pejalan kaki (baik *at grade*, *elevated*, maupun *underground*) sebagai penghubung antara simpul utama dengan angkutan lanjutan

Mengarah,
Korabdit Integrasi Prasarana Transportasi



RACHMI SARI HATU
N.P. 19091011001563

Lampiran IX
Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024

Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Bulan	Unsur	Nilai	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Januari	Informasi	93,43	72	35	3	2
	Persyaratan	93,08	72	35	2	3
	Prosedur/Alur	92,27	72	37	1	2
	Waktu Penyelesaian	92,86	73	33	4	2
	Tarif/Biaya	92,03	71	38	2	1
	Sarana Prasarana	92,51	75	29	4	4
	Respon	91,34	74	33	3	2
	Konsultasi dan Pengaduan	92,59	72	36	0	4
Februari	Informasi	90,63	30	18	2	2
	Persyaratan	92,29	30	18	3	1
	Prosedur/Alur	92,92	34	16	1	1
	Waktu Penyelesaian	91,25	34	16	0	2
	Tarif/Biaya	94,48	34	16	1	1
	Sarana Prasarana	84,58	33	16	1	2
	Respon	88,13	36	14	0	2
	Konsultasi dan Pengaduan	93,02	35	15	1	1
Maret	Informasi	93,75	33	7	0	0
	Persyaratan	94,70	31	9	0	0
	Prosedur/Alur	95,31	33	7	0	0
	Waktu Penyelesaian	95,50	32	8	0	0
	Tarif/Biaya	95,03	31	9	0	0
	Sarana Prasarana	93,63	31	9	0	0
	Respon	93,18	28	12	0	0
	Konsultasi dan Pengaduan	93,32	30	9	1	0
April	Informasi	94,22	37	17	1	2
	Persyaratan	95,21	39	16	2	0
	Prosedur/Alur	93,82	32	22	2	1
	Waktu Penyelesaian	95,46	36	19	2	0
	Tarif/Biaya	92,06	30	25	1	1
	Sarana Prasarana	91,67	30	26	1	0
	Respon	92,35	29	27	0	1
	Konsultasi dan Pengaduan	92,76	29	26	1	1
Mei	Informasi	95,91	25	9	0	0
	Persyaratan	95,12	25	9	0	0
	Prosedur/Alur	95,70	27	7	0	0
	Waktu Penyelesaian	94,05	25	8	1	0
	Tarif/Biaya	97,02	29	5	0	0
	Sarana Prasarana	96,47	29	3	2	0
	Respon	94,33	26	7	1	0
	Konsultasi dan Pengaduan	96,75	28	6	0	0
Juni	Informasi	97,86	14	2	0	0
	Persyaratan	97,86	14	2	0	0
	Prosedur/Alur	96,97	13	3	0	0
	Waktu Penyelesaian	96,97	13	3	0	0
	Tarif/Biaya	98,1	14	2	0	0
	Sarana Prasarana	95,95	12	4	0	0
	Respon	95,95	12	4	0	0
	Konsultasi dan Pengaduan	95,12	11	5	0	0

Bulan	Unsur	Nilai	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Juli	Informasi	94,10	18	12	0	0
	Persyaratan	94,86	18	12	0	0
	Prosedur/Alur	94,86	18	12	0	0
	Waktu Penyelesaian	93,14	15	14	1	0
	Tarif/Biaya	93,14	15	14	1	0
	Sarana Prasarana	92,90	16	12	1	1
	Respon	93,13	15	15	0	0
	Konsultasi dan Pengaduan	93,86	18	11	1	0
Agustus	Informasi	92,48	55	19	4	0
	Persyaratan	93,62	57	18	3	0
	Prosedur/Alur	92,61	56	19	3	0
	Waktu Penyelesaian	92,79	56	20	2	0
	Tarif/Biaya	92,36	53	21	4	0
	Sarana Prasarana	89,80	54	18	3	3
	Respon	91,76	53	20	4	1
	Konsultasi dan Pengaduan	94,03	58	17	3	0
September	Informasi	100,00	3	0	0	0
	Persyaratan	100,00	3	0	0	0
	Prosedur/Alur	100,00	3	0	0	0
	Waktu Penyelesaian	100,00	3	0	0	0
	Tarif/Biaya	100,00	3	0	0	0
	Sarana Prasarana	100,00	3	0	0	0
	Respon	100,00	3	0	0	0
	Konsultasi dan Pengaduan	100,00	3	0	0	0
Oktober	Informasi	90,60	14	10	1	0
	Persyaratan	93,40	15	9	1	0
	Prosedur/Alur	92,80	14	11	0	0
	Waktu Penyelesaian	93,20	16	9	0	0
	Tarif/Biaya	92,40	17	8	0	0
	Sarana Prasarana	92,90	14	10	1	0
	Respon	92,10	12	13	0	0
	Konsultasi dan Pengaduan	91,30	13	12	0	0
November	Informasi	90,00	6	9	0	0
	Persyaratan	87,50	6	8	0	1
	Prosedur/Alur	91,25	8	7	0	0
	Waktu Penyelesaian	88,75	8	6	0	1
	Tarif/Biaya	90,63	7	8	0	0
	Sarana Prasarana	87,50	6	8	0	1
	Respon	88,75	8	6	0	1
	Konsultasi dan Pengaduan	88,13	7	7	0	1
Desember	Informasi	96,00	26	5	1	0
	Persyaratan	96,00	25	7	0	0
	Prosedur/Alur	96,38	26	6	0	0
	Waktu Penyelesaian	96,69	25	7	0	0
	Tarif/Biaya	98,23	27	5	0	0
	Sarana Prasarana	93,62	24	7	0	1
	Respon	97,54	28	3	1	0
	Konsultasi dan Pengaduan	96,45	26	5	1	0

Lampiran X
Ketepatan Waktu Layanan Bus Perkotaan
Tahun 2024

DATA PERJALANAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

NO	BULAN	JRC LORENA	TJR LORENA	TJR SINAR JAYA	JRC SINAR JAYA	JAC SINAR JAYA	JRC PT. ROYAL WISATA	JRC PT WIFEND	JAC LORENA	TJR PERUM DAMRI	JRC PERUM DAMRI
1	Januari	124	303	44	29	46	40	1.587	348	1.000	4.960
2	Februari	116	281	37	34	37	46	1.467	324	836	4.750
3	Maret	92	382	40	28	46	40	1.473	443	832	4.110
4	April	45	242	40	36	37	54	1.395	467	678	3.461
5	Mei	62	283	41	34	39	40	1.473	522	800	4.110
6	Juni	120	299	40	37	38	51	1.486	503	400	3.894
7	Juli	122	226	38	37	39	47	1.633	467	574	4.975
8	Agustus	124	275	37	38	38	43	1.587	489	776	4.759
9	September	292	100	39	37	38	48	1.419	496	692	4.324
10	Oktober	124	307	39	36	37	46	1.633	529	788	4.965
11	November	61	283	39	38	38	50	1.507	505	676	4.018
12	Desember	114	325	38	38	38	40	1.425	540	1.000	3.920
Jumlah Ritase		1.396	3.306	472	422	471	545	18.085	5.633	9.052	52.246
Jumlah Trip		2.792	6.612	944	844	942	1.090	36.170	11.266	18.104	104.492
Total Trip		183.256									

ON TIME PERFORMANCE ANGKUTAN UMUM

Layanan	Jumlah Perjalanan	Jumlah Perjalanan Tepat Waktu
Jabodetabek Residence Connexion	145.388	93%
Jabodetabek Airport Connexion	12.208	90%
Transjabodetabek	25.660	76%
Total	183.256	86%

Lampiran XI
Ketepatan Waktu Layanan Kereta Api
Perkotaan
Tahun 2024

Ketepatan Waktu Perjalanan Kereta Rel Listrik

No	Bulan	Jumlah	KRL Tepat	KRL Terlambat	Ketepatan
1	Januari	38.685	36.471	2.214	94,28%
2	Februari	35.271	33.280	1.991	94,31%
3	Maret	37.691	36.468	1.223	95,14%
4	April	33.967	31.623	2.344	94,66%
5	Mei	34.464	33.637	827	95,22%
6	Juni	33.554	32.514	1.040	95,49%
7	Juli	34.684	33.539	1.145	95,66%
8	Agustus	34.583	34.030	553	95,99%
9	September	33.352	32.918	434	96,28%
10	Oktober	34.924	34.156	768	96,43%
11	November	33.400	32.699	701	96,56%
12	Desember	34.935	33.747	1.188	96,56%
	Jumlah	419.510	405.082	14.428	96,56%

No	Bulan	Jumlah Gangguan			Jumlah Gangguan
		Sarana	Prasarana	Eksternalitas	
1	Januari	4	0	7	11
2	Februari	1	1	8	10
3	Maret	3	2	12	17
4	April	7	6	7	20
5	Mei	4	3	2	9
6	Juni	1	2	5	8
7	Juli	0	3	7	10
8	Agustus	1	5	6	12
9	September	1	2	6	9
10	Oktober	1	3	15	19
11	November	2	3	9	14
12	Desember	1	1	11	13
Jumlah Gangguan		26	31	95	152

Rata-Rata Gangguan Per Tahun			
1	Sarana	: Gangguan Sarana/Total Gangguan	17,11%
2	Prasarana	: Gangguan Prasarana/Total Gangguan	20,39%
3	Eksternalitas	: Gangguan Eksternal/Total Gangguan	62,50%

Lampiran XII
Kejadian Kecelakaan Angkutan Bus
Perkotaan
Tahun 2024

DATA PERJALANAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

[illegible]

DATA JUMLAH RITASE ANGKUTAN BUY THE SERVICE (BTS)

KOTA	KORIDOR	TAHUN 2024												TOTAL RITASE
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
BOGOR	1	3345	3120	3343	3275	3328	3179	3287	3058	3229	3211	3165	3144	38684
	2	3034	2824	3015	2863	3027	2885	3029	2824	2923	2921	2945	2952	35242
	5	3401	3158	3412	3312	3395	3375	3372	3143	3278	3286	3252	3258	39642
	6	3275	3128	3304	3207	3336	3212	3319	2961	3219	3219	3195	3697	39072
BEKASI	1			2891	2928	3040	2956	3038	3048	2941	3052	2927	2878	29699
DEPOK	1							1987	2887	2940	3038	2940	3038	16830
Total Ritase														199169
Total Trip														398338

Data Kecelakaan

No	Body	Kode Rute / Koridor	Waktu Kejadian	Hari	Tanggal	Lokasi Kejadian	Tipe Laka	Kronologis Kejadian	Dokumentasi
1	776	Suttle PIK	18:37	Rabu	10 Januari 2024	Putar balik Freshmarket.	Head on	ada saat bus DMR 776 selesai Menaik dan menurunkan penumpang di Freshmarket maka bus melanjutkan perjalanan kembali arah PIK 2 Extention. Pas diputar balik depan Freshmarket pas bus sudah di tengah tiba tiba ada mobil pribadi memaksa untuk jalan. Karena jarak terlalu dekat maka terjadi serempetan antara bus dan mobil pribadi tersebut.	
2	599	MCBMNS	18.30	Senin	22 Januari 2024	Monas	Sideswipe	sekitar pukul 19.20 wib unit 599 akan ke kiri pandangan blindspot disamping ban kiri depan pramudi mengenai mobil Sedan jazz bagian belakang samping kanan yang mengakibatkan kerusakan kecil (lecet kecil)	

No	Body	Kode Rute / Koridor	Waktu Kejadian	Hari	Tanggal	Lokasi Kejadian	Tipe Laka	Kronologis Kejadian	Dokumentasi
3	588	GCBCWK	07.30	Senin	29 Januari 2024	Prumpung lampu merah kejaksaan Jakarta timur	Angle	Kejadian jam 07:30 posisi di Prumpung lampu merah kejaksaan Jakarta timur..kronologi sama2 sdg menunggu lampu merah pas belok dr lampu merah hujan deras dan mobil di samping kanan TDK terlihat dan bersenggolan body kanan dgn bumper depan kendaraan tsb	
4	549	TMSJND	15.30	Senin	01-Apr-24	Pullman HI	Head On	Sekitar pukul 15.30 WIB saat bus berangkat dari Juanda menuju Pullman HI posisi lalin macet, saya menunggu jarak untuk Haluan dan posisi bus sedang direm tangan secara mendadak dari sebelah kiri bus ada mobil pribadi fortuner masuk memotong menyebabkan gesekan dengan mobil pribadi tidak dapat terhindarkan	

No	Body	Kode Rute / Koridor	Waktu Kejadian	Hari	Tanggal	Lokasi Kejadian	Tipe Laka	Kronologis Kejadian	Dokumentasi
5	625	GCBJND	05:35:00	Senin	13-May-24	Tol Jagorawi	Head On	Pada saat bus di tol Jagorawi, sekitar pukul 05.35 tepatnya di KM 24, gunung puteri, posisi bus di lajur kanan dan di depan bus ada mobil yg mengerem mendadak, yg menyebabkan bus DMR 625 mengerem tidak ketahan dan menghantam mobil pribadi tidak dapat terhindarkan	

Sumber: Perum Damri, 2024

Lampiran XIII
Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2024

Reformasi Birokrasi Tematik

Unit Kerja

Indikator

: Badan Pengelolaan Transportasi JABODETABEK

: Waktu penyelesaian proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek

Lembar Kerja Penilaian

No	Penilaian	Indikator	Bobot	Pilihan	Jawaban	Nilai	Penjelasan	Keterangan Indikator
1	Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan di	a. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 80% - 100% b. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 60% - <80% c. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 40% - <60% d. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 20% - <40% e. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai <20%	25	A/B/C/D/E	A	25,00	Rencana aksi berupa Penyederhanaan proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek telah dilakukan percepatan waktu proses perizinan melalui aplikasi perizinan online. Proses verifikasi perizinan online telah disederhanakan dan sesuai dengan SOP pelayanan Angkutan Sewa Khusus.	1) Kesesuaian realisasi/ pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan pada rencana aksi yang tertuang di Road Map RB Kementerian Perhubungan 2) Jumlah rencana aksi RB yang telah terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh rencana aksi RB
2	Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan	a. Pencapaian output di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 80% - 100% b. Pencapaian output di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 60% - <80% c. Pencapaian output di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 40% - <60% d. Pencapaian output di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 20% - <40% e. Pencapaian output di setiap triwulan yang ditentukan sebesar <20%	25	A/B/C/D/E	C	12,50	1. Capaian dengan target output pada rencana aksi sampai dengan triwulan III dimana target jumlah selama triwulan III adalah 5250 dan capaian output selama triwulan III adalah 2.899 kartu atau sebesar 55,21% (di penilaian C); 2. Ketidaksesuaian data jumlah kendaraan sewa existing dengan usulan/forecasting KP di lingkungan BPTJ agar inline renaksi.	1) Kesesuaian capaian dengan target output pada rencana aksi sampai dengan triwulan III 2) Jumlah realisasi output rencana aksi yang sesuai dengan jumlah output rencana aksi yang ditargetkan dibagi dengan jumlah output rencana aksi yang ditargetkan
3	Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);	a. 80% - 100% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. 60% - <80% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. 40% - <60% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. 20% - <40% pelaksanaan kegiatan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik e. <20% pelaksanaan kegiatan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	12,50	A/B/C/D/E	C	6,25	ukti pendukung bahwa seluruh kegiatan belum dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta didokumentasikan, hanya terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan saja	1) Kategori baik: adalah apabila seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta didokumentasikan 2) Jumlah pelaksanaan rencana aksi RB yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta didokumentasikan dibagi dengan jumlah seluruh rencana aksi RB
		a. 80% - 100% pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara berkala b. 60% - <80% pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara tidak berkala c. 40% - <60% pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara berkala d. 20% - <40% pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara tidak berkala e. <20% pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara berkala	12,50	A/B/C/D/E	E	0,00	Belum Terdapat bukti dokumen evaluasi secara berkala	1) Terdapat dokumen evaluasi secara berkala yang minimal dilaksanakan setiap semester 2) Jumlah pelaksanaan rencana aksi RB yang telah dilengkapi dengan dokumen evaluasi dibagi dengan jumlah seluruh rencana aksi RB
4	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	a. 80% - 100% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; b. 60% - <80% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; c. 40% - <60% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; d. 20% - <40% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; e. <20% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu;	25	A/B/C/D/E	C	12,50	Pelaksanaan kegiatan baru mencapai 55,21 % (di penilaian C), sehingga belum sepenuhnya mengalami Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai target pada rencana aksi;	1) Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai target pada rencana aksi 2) Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan sesuai dengan target waktu dibagi dengan jumlah seluruh rencana aksi RB
			100			56,25		

Attribution

Inspirasi Desain Sampul: Freepik



LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
TAHUN 2024

<http://dephub.go.id>



BPTJ 151

Codong Karya, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 lantai 15-16
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10110